# BRIGJEN KH. SYAM'UN

## Kiyai Panglima para Pejuang Kemerdekaan di Banten (1893-1949)

PEMERINTAH KOTA SERANG

© Pemerintah Kota Serang 2020

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang undang Nomor 19 Tahun 2002**
**Tentang Hak Cipta:**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 4g ayat (1) dan ayat (2) dipidana masing masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000 000.000 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau HakTerkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

# BRIGJEN KH. SYAM'UN

## Kiyai Panglima para Pejuang Kemerdekaan di Banten (1893-1949)

**Mufti Ali, Ph.D**

**Dr. Rahayu Permana, M.Hum**

**Farhan Alfuadi, S.Ud**

PEMERINTAH KOTA SERANG

**Brigjen KH. Syam'un, Kiyai Panglima para Pejuang Kemerdekaan di Banten (1893-1949)**

Penulis:
Mufti Ali, Ph.D
Dr. Rahayu Permana, M.Hum
Farhan Alfuadi, S.Ud

Editor:
Jemmy Ibnu Suardi, M.Pd.I

Penata Letak & Desain Cover:
Jemmy Ibnu Suardi M.Pd.I
Adi Nugraha, S.E

Cetakan I, April 2020
Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Serang
Bekerja sama dengan Yayasan Bhakti Banten
Komplek Cigadung Mandiri. Blok J No.10
Rt/Rw. 01/10. Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang. 42251

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
**Mufti Ali, Rahayu Permana & Farhan Alfuadi**
Brigjen KH. Syam'un, Kiyai Panglima para Pejuang Kemerdekaan di Banten (1893-1949)/Mufti Ali, Rahayu Permana & Farhan Alfuadi. – Serang: Pemkot Serang, 2020.

xv +160 hlm.; 14,5 x 21 cm
ISBN 978-602-53710-6-6

1. Brigjen KH. Syam'un, Kiyai Panglima para Pejuang Kemerdekaan. i. Judul

**WALIKOTA SERANG**

## SAMBUTAN WALIKOTA SERANG

Banten tidak kurang-kurang dalam melahirkan ulama dan pejuang, masyarakat Banten dikenal luas sebagai orang-orang kuat dalam menjalankan dan mengamalkan tradisi Islam. Tradisi Islam yang kuat di Banten ini banyak memberikan warna dan inspirasi bagi masyarakat di wilayah lain Indonesia.

Heroisme Banten tidak dikenal baru-baru ini, bahkan jauh sebelum kita mengenal Republik Indonesia secara terminologis, Banten sudah eksis dengan simbol-simbol Islam yang kuat. Salah satu sifat yang sejak dulu diamini oleh orang banyak adalah Banten dikenal sebagai wilayah anti penjajahan dan anti kolonialisme, sejak zaman Kesultanan sampai zaman perjuangan Kemerdekaan 1945, Masyarakat Banten sudah dikenal sebagai pejuang. Masa awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia juga banyak diwarnai dengan kisah heroisme yang tinggi di Banten.

Brigjen K.H. Syam'un adalah salah satu sosok pejuang dari Banten yang tidak boleh terlewatkan dalam lintasan sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional tahun 2018 silam adalah menjadi kewajiban bagi kita bersama, khususnya Pemerintah Kota Serang untuk mensosialisasikan Tokoh Besar ini.

Sebagai Bupati Serang yang pertama, Brigjen K.H. Syam'un menjadi *pioneer* dalam banyak hal. Diantaranya adalah beliau orang pertama yang menjadi Bupati Serang di masa Kemerdekaan, K.H. Syam'un juga menjadi orang Banten generasi awal yang belajar dan lulus dari Univesitas Islam ternama Universitas Al-Azhar, Mesir.

Dalam bidang pendidikan, beliau mendirikan dan mereformasi sistem pendidikan Pesantren dengan mendirikan Al-Khairiyah. Brigjen K.H. Syam'un adalah sosok langka yang dilahirkan dari rahim bumi Banten. Menjadi seorang Ulama, sekaligus Bupati pemimpin daerah, juga menjadi Panglima Militer tertinggi di Banten adalah beberapa predikat yang disematkan kepada Brigjen K.H. Syam'un. Buku Karya Mufti Ali, Ph.D dan timnya yang berjudul ***Brigjen KH. Syam'un, Kiyai Panglima para Pejuang Kemerdekaan di Banten (1893-***

***1949)***, menjabarkan dengan detail sosok mulia Brigjen K.H. Syam'un.

Semoga dengan adanya buku ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Banten, khususnya masyarakat Kota Serang, juga dapat menginspirasi dalam pembangunan Kota Serang kedepannya. Sebagai Kepala Daerah kami mendukung untuk menjadikan bacaan wajib bagi anak bangsa, para pelajar dan mahasiswa Indonesia, khususnya Banten. Sebagai penambah khazanah keilmuan dalam memahami sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

Serang, 30 Maret 2020

**Walikota Serang**

WALIKOTA SERANG

**H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si**

## SAMBUTAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SERANG

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *subhanahu wa taála*, atas berkat karunia dan inayah-Nya, buku yang merupakan naskah akademik usulan calon pahlawan nasional atas nama Brigjen KH. Syam'un berhasil kami terbitkan menjadi sebuah karya yang layak dibaca dengan narasi dan ilustrasi yang lebih menarik dan diberi judul ***Brigjen KH. Syam'un, Kiyai Panglima para Pejuang Kemerdekaan di Banten (1893-1949)***, Karya tulis ini sengaja kami terbitkan agar dapat dijadikan bahan bacaan dan dapat memperkaya khazanah sejarah kebudayaan masyarakat Kota Serang khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Di samping itu, penerbitan buku ini merupakan refleksi dari tingginya penghargaan kami kepada tokoh dan pejuang dari Serang.

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Mufti Ali, Ph.D., beserta tim yang telah melakukan kajian dan riset dengan penuh keseriusan sehingga kami yakin karya

ilmiah ini akan menjadi rujukan penting dalam pembangunan masyarakat kini dan yang akan datang.

Serang, 30 Maret 2020
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Serang.

**H. Wahyu Nurjamil, S.STP, M.Si**

## KATA PENGANTAR PENULIS

*Alhamdulillah* edisi dan penambahan data dan narasi atas buku ***Brigjen KH. Syam'un, Kiyai Panglima Para Pejuang Kemerdekan di Banten (1893-1949)*** dapat diselesaikan dengan lancar. Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* penulis ucapkan atas kesediaan Pemerintah Kota Serang untuk menerbitkan karya sederhana ini. Apresiasi mendalam atas ikhtiar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang dalam mensosialisasikan perjuangan para tokoh Banten yang namanya diabadikan dalam nama jalan atau gedung, dan lembaga di Kota Serang.

Penerbitan karya sederhana ini dimungkinkan berkat dukungan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, yang sangat visioner dalam membangun Kota Serang menjadi kota yang warganya dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan peradaban Banten. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak H. Syafruddin, S.Sos, M.Si dan H. Subadri Usuluddin, SH. Rasa hutang budi penulis haturkan kepada Bapak H. Wahyu Nurjamil, S.STP, M.Si, kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, seorang pejabat publik yang sangat sigap dalam pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Serang.

Banyak pihak telah men-*support* penulis untuk menyelesaikan buku ini. PB al-Khairiah dan Dinas Sosial Kab. Serang telah memberikan sebagian dukungan finansial dalam riset penulis ke Pusat Sejarah TNI AD di Bandung, Museum PETA di Bogor, Arsip Nasional di Jakarta dan wawancara sejumlah narasumber di Banten , Jakarta dan Jawa Barat. H. Ali

Mujahidin dan Kiai Alwiyan Q. Syam'un memberikan dukungan moril dalam penyelesaian karya ini.

Tiga asisten utama penelitian ini: Dr. Rahayu Permana, Farhan al-Fuadi, S.Thi dan Mardiyah, S.S patut diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam kontribusi signifikan mereka dalam penyelesaian karya ini. Penulis mengapresiasi kerja konstruktif *supporting team* dari Sultan Abul Mafakhir Institute (SAMI): Jemi ibn Suardi (editor), Adi Nugraha (lay outer), Usman, Romi, Rohman, Yusuf, Astri Lidya dan Miftahul Ulum dari Bhakti Banten Press. Penulis juga sangat terbantu banyak dalam riset-risetnya oleh dukungan moril dan materil dari kedua kakak penulis, Hj. Siti Hasanah, S.Pdi dan Siti Asiah, S.Pd, yang selalu semangat membaca karya-karya penulis. Istri, Intan D.S. dan tiga puteri penulis: Mehr, Mahira, dan Amira senantiasa menjadi motivator dalam penyelesaian riset dan publikasi penulis.

Karang Tanjung, Pandeglang, 15 Maret 2020

Penulis

*In Memoriam*, Ibu Eti Suhaeti dan Ibu Emmiliah, (Wafat 2019) veteran Tentara Pelajar RI (TRIP) Banten

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA SERANG .....v

SAMBUTAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA SERANG .....vii

KATA PENGANTAR PENULIS..... viii

DAFTAR ISI .....xi

BAB I

Riwayat Kehidupan K.H. Syam'un dan Pendidikannya..... 1

Kelahiran, Asal-Usul Keturunan dan Kehidupan Masa Remaja..... 3

K.H. Syam'un Belajar di Mekah ..... 8

Belajar Kepada Kiayi-Kiayi di Banten ..... 10

K.H. Syam'un Belajar ke Mesir ..... 11

Pulang Ke Banten dan Mendirikan Pesantren Citangkil ..... 16

BAB II

Menggagas Pembaruan Pendidikan Islam ..... 21

Pendidikan Nasionalisme di Al-Khairiyah ..... 29

Al-Khairiyah dan Kemunculan Kelompok Intelektual Baru ..... 33

Kiprah Anak Didik K.H. Syam'un..... 43

BAB III

Memasuki Dunia Militer di Masa Pendudukan Jepang Tahun 1943-1945 ..... 53

Jepang Mendarat di Banten ..... 55
Pembentukan PETA ..... 57
K.H. Syam'un menjadi Anggota PETA ..... 61
Resistensi Pemuda Banten terhadap Jepang ..... 66
Berita Proklamasi Tiba di Banten Kemerdekaan RI ..... 72
Jepang Menyerahkan Kekuasaan di Citangkil ..... 74
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat ..... 77
K.H. Syam'un menjadi Komandan BKR ..... 79
Orang-orang Jepang Meninggalkan Banten dan Beberapa Pertempuran Singkat ..... 81

BAB IV

Mempertahankan Kemerdekaan di Tengah Kemelut Politik ..... 85
Tentara Keamanan Rakyat di Banten, K.H. Syam'un Menjabat Panglima ..... 89
Pertempuran Kebayoran Oktober 1945 ..... 92
Gerakan Revolusi Sosial di Banten ..... 96
Teror Gulkut: Penculikan dan Pembunuhan terhadap Pejabat dan Pamong Praja ..... 99
Penyerbuan ke Markas Dewan Rakyat ..... 102
Rasionalisasi TKR: Menjabat Komandan Brigade I/Tirtayasa Juli 1946 -15 Maret 1947 ..... 104
Menyelesaikan Konflik Etnis di Tangerang Mei 1946 ..... 108
Menahan Serangan NICA di Perbatasan Banten ..... 110
Mengatasi Konflik antara Laskar Rakyat dengan TNI ..... 112
Menghadapi Agresi Militer I (21 Juli – 4 Agustus 1947) ..... 113

Brigjen KH Syam'un, Komandan Daerah Pertahanan I Banten . 116
Tukar Menukar Tawanan dengan Belanda ..... 117

BAB V

K.H. Syam'un Menjabat Bupati dan Mempertahankan Pemerintahan di Pedalaman Banten ..... 119
Krisis Hebat Akibat Agresi Militer II ..... 124
Laskar Bambu Runcing Mengacau di Banten ..... 128

BAB VI

Belanda Menyerang ke Serang ..... 133
Lolos dari Sanderaan Belanda ..... 136
Menjelang Wafatnya Brigjen K.H. Syam'un ..... 138
Penghargaan Pemerintah ..... 140

DAFTAR PUSTAKA ..... 144
INDEKS ..... 169

# BAB I

## Riwayat Kehidupan K.H. Syam'un dan Pendidikannya

K.H. Syam'un hidup di masa setelah Banten menyaksikan prahara besar yang melibatkan kekuatan militer Belanda besar-besaran, Geger Cilegon 1888. Ayahnya adalah seorang pejuang yang memimpin perlawanan rakyat Cilegon terhadap kolonialisme Belanda di Banten. Belanda sendiri masih menyimpan trauma setelah menghadapi perang Jawa yang digerakan oleh Pangeran Dipenogoro yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia, tidak saja Jawa. Dan tentu saja perang-perang melawan pemberontakan telah menyita seluruh kekuatan Belanda dari militer sampai ekonomi.

Banten termasuk daerah yang mengalami dampak krisis yang dialami Hindia Belanda pasca perang Jawa. Banten mengalami krisis moneter yang berkepanjangan. Pemerintah pada saat yang sama memberlakukan berbagai kebijakan yang memberatkan rakyat melalui pajak dan seluruh tanggungan sejenisnya untuk memulihkan kas negara yang lesu. Pada saat yang bertepatan rakyat tengah mengalami "spiritualisasi" praktek keagamaan dengan semangat fundamental yang kuat hasil dari persentuhan yang intens dengan pusat Islam di Hijaz melalui para haji.

Oleh karenanya gerakan Islam, misalnya gerakan tarekat memainkan peran yang kuat dalam menggerakan perlawanan rakyat. Bagi rakyat sendiri tarekat menjadi kekuatan batin yang mampu mendorong kesanggupan melawan. Maka Geger

Cilegon pun membawa kekuatan- kekuatan magis dari semangat jihad dalam perlawanan terhadap Belanda.

Para pejuang yang ditangkap Belanda tahun 1888

(Sumber: https://historia.id)

Momen sejarah ini secara tidak langsung telah memasok kekuatan memoriam ke dalam diri KH. Syam'un untuk tumbuh dengan kesadaran patriotisme yang kuat. Untuk mengantisipasi potensi perlawanan rakyat, Belanda berstrategi kembali dengan melakukan pendekatan lain yang lebih halus. Banten pada masanya berkembang sejalan dengan cita-cita *Europian centris*. Sekolah-sekolah Eropa banyak tumbuh menjamur setelah tahun 1900. Tetapi, K.H. Syam'un tidak terbawa arus, dan dia tetap ajeg di dalam lingkungan budayanya sebagai santri orang Banten dengan cara pandang yang terbuka.

## Kelahiran, Asal-Usul Keturunan dan Kehidupan Masa Remaja

KH. Syam'un dilahirkan pada tahun 1883 di kampung Beji desa Bojonegara-Cilegon. Saat itu Cilegon merupakan ibu kota afdeling Anyer sejak penetapannya pada tahun 1885, tiga tahun sebelum Geger Cilegon meletus pada tahun 1888. Ki Wasid, tokoh utama pemimpin gerakan perlawanan rakyat Banten tidak lain adalah kakek dari K.H. Syam'un. Ayahnya bernama Haji Alwijan dan ibunya bernama Siti Hajar. Tidak banyak informasi mengenai ayahnya. Rupanya ia memiliki aktifitas di Sumatra-Banten, dan meninggal di Sumatra saat K.H. Syam'un masih balita. Hubungan darah dengan Ki Wasid diambil dari ibunya, Siti Hajar, ialah putri Ki Wasid dari istrinya bernama Nyi Atiah (Ki Wasid memiliki satu orang anak laki-laki, adik Siti Hajar, bernama Haji Yasin, seorang paman bagi K.H. Syam'un yang memiliki pengaruh besar dalam karir K.H. Syam'un di masa-masa awal) yang berhasil meloloskan diri ke Mekah setelah kelahiran K.H. Syam'un (Permana, 2004: 13; Mufti Ali,dkk., 2016: 90-91; Mufti Ali, dkk., 2015: 1; Mufti Ali dan Bambang Irawan, 2015: 8).

Masyarakat Banten atau bahkan dunia, mungkin tidak akan dapat melupakan peristiwa letusan gunung Krakatau tahun 1883 yang dahsyat. Efek dari letusan gunung Krakatau terasa juga oleh masyarakat Batavia. Kaca-kaca jendela rumah warga pecah termasuk kaca-kaca jendela pertokoan sepanjang jalan *Risjwijk* (sekarang jalan Veteran), bau belerangnya pun tercium oleh masyarakat Batavia. Menurut berita yang beredar saat itu, Kapal Princes Welhelmina di dermaga Tanjung Priok

terlempar ke darat. Kapal W.H. Besse Amerika Serikat dengan nahkoda Baker yang baru tiba di Manila kandas di perairan sekitar kepulauan seribu. Menurut catatan Arsip Belanda sebagaimana dilaporkan oleh Lukman Hakim, di Tangerang tercatat 1.794 orang pribumi, 546 orang Cina yang meninggal dunia. Residen Jao van den Bosch termasuk *Controleer* P. Schalk menjadi korban dan meninggal dunia saat menghadiri pesta di Caringin. Di Anyer ada kabar juga Asisten Residen Th. W. Buijs bersama istri dan anaknya ikut menjadi korban termasuk 15 orang Belanda di sana. Pemerintah Hindia Belanda secara resmi dalam *press* rilisnya mengumumkan 36.417 orang meninggal dunia dalam bencana itu. Jumlah itu mencakup seluruh penduduk di sepanjang pantai Selat Sunda baik yang ada di pulau Jawa atau pun Sumatra. Banten merupakan wilayah terparah dengan korban jiwa sebanyak 21.565 orang. E. Pechter seorang karyawan Pelabuhan Merak tercatat sebagai satu-satunya orang Belanda yang selamat dari bencana itu di Merak sekaligus menyaksikan langsung dahsyatnya terpaan ombak Selat Sunda. Seorang lain yang bias disebutkan menjadi saksi mata peristiwa ini adalah Gaston seorang Kepala Pekerjaan Umum di Labuan menyaksikan peristiwa ini dari bukit dengan mengendarai kuda (Lukman Hakim, 2006: 171-176).

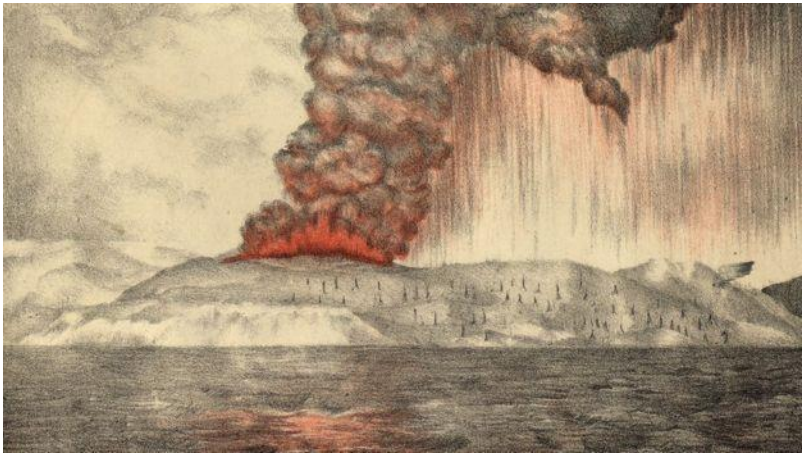

Ilustrasi letusan Gunung Krakatau tahun 1883 oleh seorang litograf dari Parker & Coward
(Sumber: https://www.bbc.com/indonesia )

Di antara pejabat pribumi yang selamat dari bencana alam yang dahsyat itu adalah kakak kandung dari Raden Bagoes Djajawinata yang Asisten Wedana Tajur bersama dengan istri dan anaknya yang masih kecil. Semula keluarga mengira ia sudah meninggal dunia. Setelah beberapa hari Asisten Wedana dari Tajur baru sampai ke Pandeglang menemui keluarganya Raden Adipati Aria Natadiningrat yang menjadi Bupati Pandeglang (PA. A. Djajdiningrat, 1996: 14-15).

Setelah peristiwa itu, pemerintah pusat melakukan pembangunan ulang dan memindahkan ibu kota afdeling Anyer ke Cilegon. P.A. Ahmad Djajadiningrat di dalam *Memoar*-nya menggambarkan dengan rinci kondisi kota Cilegon yang

dijadikan pusat ibu kota Afdeling Anyer. Sebagai akibat dari letusan gunung Krakatau, Anyer menjadi hancur. Anyer kehidupan ekonomi dan pemerintahan di Anyer menjadi lumpuh. Untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah pemerintah Banten memutuskan untuk memindahkan ibu kota afdeling Anyer ke Cilegon. Cilegon sebenarnya kota kecil hanya sebuah ibu kota distrik di bawah *Afdeling* Anyer. Di dalamnya ada tiga buah desa besar: Jombang Wetan, Jombang Tengah dan Jombang Kulon. Kota ini terletak di persimpangan dua jalan raya: dari timur ke barat terbentang jalan raya Daendels, antara Serang sampai Anyer dan Caringin; Satu jalan lainnya adalah jalan dari ibu kota Kramatwatu yang melewati *onderdistrict* Balagedong ke ibu kota *onderdistrict* Bojonegara (PA.A. Djajadiningrat, 1996: 46).

Selama kurun waktu antara 1883 hingga 1888, masyarakat Cilegon-Anyer-Caringin menghadapi kesulitan hidup yang hebat. Akibat bencana tersebut, laju perekonomian di tiga wilayah tersebut betul-betul lumpuh. Banyak lahan pertanian yang tidak dapat digarap lagi. Tanah luas sumber kehidupan masyarakat tiga wilayah itu banyak mengalami kekeringan dan gersang. Penyakit ternak, wabah demam, kelaparan telah memukul batin penduduknya. Belum di beberapa wilayah yang tidak langsung terimbas bencana, mengalami gagal panen. Sementara itu kebijakan perpajakan tidak meringankan penduduk (Sartono Kartodirdjo, 2015: 65).

Puncak dari keresahan sosial meletuslah perlawanan rakyat Cilegon. Sebuah perlawanan yang memiliki eskalasi yang

sangat luas dan besar. Para aktifisnya tidak saja membangun jaringan strategis di wilayah Cilegon, mereka melibatkan banyak jaringan di luar Banten untuk memenuhi segala kebutuhan persenjataan, logistik dan lain sebagainya yang dapat memperkuat dan menjadi jalan pelarian di waktu waktu dibutuhkan. Setidaknya ada 17 orang yang terbunuh dalam peristiwa tersebut oleh kaum pejuang, 7 orang terluka oleh para pejuang. Tetapi jumlah itu tidak sebanding dengan korban yang jatuh dari kalangan pejuang, ada 30 orang yang tewas dari kalangan pejuang, termasuk Ki Wasid di Cisiih. Jumlah ini belum ditambah beberapa pelaku yang dijatuhi hukuman mati (Sartono Kartodirdjo, 2015: 377).

Setelah berhasil melakukan penumpasan terhadap gerakan Geger Cilegon dan beberapa peristiwa susulan setelahnya, pemerintah Hindia Belanda tidak serta merta bersikap tenang. Kini para elit muslim di Cilegon menjadi perhatian pemerintah Belanda. Banyak kiayi yang dicurigai, dan rupanya mereka lebih suka kepada kiayi yang pengetahuan agamanya rendah atau biasa-biasa saja. Setiap ada kiayi yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan kuat, pemerintah selalu mencurigai dan memata- matai seluruh aktifitas mereka. Tidak terkecuali keluarga Ki Wasid, menjadi keluarga yang dimata-matai dan selalu dicari keberadaannya. Tentu saja, Siti Hajar, putri Ki Wasid memiliki tanggung jawab mengasuh tidak saja K.H. Syam'un, putranya ia juga menanggung hidup adik kandungnya. Untuk menghindari kejaran Belanda Siti Hajar dibantu kerabatnya dan beberapa kolega Ki Wasid, Siti Hajar

berhasil melarikan diri ke Mekah. K.H. Syam'un saat itu berusia 5 tahun (Muhyidin, 1990: 32).

Foto K.H Syam'un

**K.H. Syam'un Belajar di Mekah**

Tradisi belajar ke luar negeri memiliki catatan panjang di tengah masyarkat Banten. Tentu saja mayoritas pelajar memilih belajar ke Timur Tengah. Meningkatnya angka mukimin haji asal Nusantara di Mekah didorong oleh kemajuan teknologi transportasi yang diimpor pemerintah Belanda ke Hindia Belanda dan kebijakan- kebijakannya di bidang

penyelenggaraan ibadah haji. Martin van Bruinessen mencatat sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869 mukimin haji dari Nusantara meningkat pesat dan mengalami puncaknya di tahun 1911-1912 dengan angka tertinggi 18.400 jiwa sebelum mengalami kemerosotan di tahun 1916-1917 yang memiliki angka 70 karena konflik politik yang terjadi di Mekah yang melibatkan gerakan Wahhabisme-Sa'udiyah (Martin van Bruinessen, 7).

Tidak jarang para aktifis yang menentang pemerintahan kolonial menggunakan paspor ibadah haji untuk dapat melarikan diri dari kejaran pemerintah. Beberapa orang tokoh perlawanan di Banten 1888 (Seperti Haji Sapiudin dan Haji Abdulhalim) dan Perjuangan 1926 melarikan diri ke Mekah untuk menghindari kejaran polisi militer pemerintah Belanda. Keluarga Haji Wasid, tokoh fenomenal pemberontakan 1888, meninggalkan Banten dan bermukim di Mekah sampai beberapa tahun kemudian (1889-1891). Siti Hajar berhasil berangkat ke Mekah atas bantuan seorang ulama dari Garut Syekh Musyadad membawa serta putranya Syam'un yang masih balita dan adik laki-lakinya Yasin yang masih remaja melalui jalur laut (Mufti Ali, dkk., 2015: 10).

Sejak tahun 1874 gerakan modernisasi pendidikan Islam yang digerakan oleh Madrasah Shaulatiyah cukup menarik minat para pelajar asal Nusantara. Kecuali setelah memasuki tahun 1930-an, banyak guru dan murid Shaulatiyah asal Nusantara (tidak termasuk para pelajar asal Malaysia, Brunei dan Singapura) banyak alumni yang keluar dari

madrasah ini dan mendirikan Madrasah Daarul Ulum di Mekah. Kalangan muslim modernis asal Nusantara memang banyak yang belajar di dua Madrasah ini yang dengan begitu banyak memberi pengaruh pada timbulnya gerakan modernisasi pendidikan di Nusantara di samping gerakan pembaruan di Mesir. Mekah di tengah arus modernisasi itu tetap menjadi batu loncatan yang amat penting bagi sebagian besar para pelajar muslim asal Nusantara (Martin van Bruinessen, 9).

Tidak dapat dipastikan apakah KH. Syam'un pernah menimba ilmu di Shaulatiyah seperti keterangan Martin van Bruinessen tentang daya tarik madrasah ini di mata pelajar asal Nusantara. Informasi lisan yang dapat dikonfirmasi menjelaskan K.H. Yasin putra Ki Wasid yang tidak lain paman KH. Syam'un sendiri adalah guru pertamanya selama usai remajanya dihabiskan di Suq Lail- Mekah (1905-1910) sebelum K.H. Yasin pulang ke Banten pada tanggal 22 Februari 1910 yang disambut oleh penduduk Cilegon yang mencemaskan pemerintah Belanda (Mufti Ali, dkk., 2015: 11).

**Belajar Kepada Kiayi-Kiayi di Banten**

Setelah kepulangannya bersama Haji Yasin ke Banten, K.H. Syam'un berusia kanak-kanak. Di Banten ia menimba ilmu kepada beberapa kiayi di beberapa daerah afdeling Cilegon. K.H. Ahmad ibn Rafi' adalah salah satu guru K.H. Syam'un dari Kosambi Cinangka. Ialah guru yang memberi dasar-dasar keagamaan yang ikut membentuk karakternya di masa depan. Setelah menyelesaikan belajarnya di pesantren K.H. Ahmad,

K.H. Syam'un kembali belajar kepada pamannya. Haji Yasin di Beji.

Setelah menginjak usia remaja, K.H. Syam'un melanjutkan studinya kepada seorang kiayi di Delingseng, ialah Kiayi Sa'i-Delingseng sekitar tahun 1898-1900. Kemudian ia melanjutkan belajarnya ke jenjang lebih tinggi pada tahun 1901-1904 di bawah asuhan K.H. Jasim Kamasan, pada tahun yang sama ia juga belajar kepada Buya Thayib Pangoreng. Saat belajar di Pangoreng kelihatannya ia sudah tumbuh cukup dewasa. Di sana ia sempat menikah dengan Nafisah binti Haji Abdul Karim dan membuka kegiatan majlis ta'lim (Mahmud Bachtiar, 2014: 176-178).

Rupanya ia tidak merasa cukup setelah belajar kepada guru-guru kenamaan di Afdeling Cilegon. Seperti kebanyakan kaum santri yang belajar di Mekah, menggunakan momen ibadah haji untuk bisa menemui guru-guru tertentu yang sedang banyak digandrungi. K.H. Syam'un pun melakukan hal yang sama, belajar di Mekah sambil menunaikan ibadah haji.

**K.H. Syam'un Belajar ke Mesir**

Memasuki abad 20, tradisi belajar ke Timur Tengah mulai mengalami perkembangan, tidak hanya berorientasi ke Makah-Madinah tapi juga Mesir. Mesir menjadi pusat perhatian para pelajar Indonesia dan banyak menarik minat para pelajar untuk belajar di Universitas al-Azhar. Menurut Yudhi Latif, Jamaludin al- Afghani memberi angin segar bagi perkembangan Al- Azhar. Perubahan orientasi yang terjadi pada para pelajar muslim Indonesia dari Mekah ke Mesir, salah satunya karena

daya tarik pemikiran-pemikiran reformisme Jamaludin al-Afghani yang dipercaya akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa (Yudhi Latif, 2004: 106).

Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Ismail Abdul Muthalib adalah dua tokoh ulama Nusantara yang bermukim dan menjadi guru terpenting setelah al-Nawawi dan Zaini Dahlan yang menjadi simpul perkembangan terbaru di akhir abad 19 ini. Setelah meninggalnya Syekh Nawawi dan Syekh Zaini Dahlan jalur belajar para pelajar Indonesia mulai beralih ke Mesir. Peralihan jalur belajar dari Mekah ke Kairo berlangsung mengikuti jejak Syekh Ismail Abdul Muthalib, seorang guru berasal dari Padang yang tiba di Mesir tahun 1894-1895 (M. S. Putuhena, 2007: 326). Sementara Syekh Ahmad Khatib pengganti al- Nawawi lebih terbuka terhadap arus baru pemikiran Islam. Setidaknya ia membiarkan murid-muridnya berkenalan dengan pemikiran pembaruan Islam khususnya gagasan Muhamad Abduh (Jajat Burhanudin, 2004: 181).

Dua kondisi tersebut mendorong terjadinya eksodus pelajar Indonesia ke Kairo dengan angka yang cukup besar dan terus mengalami pertambahan tiap tahunnya, kondisi tersebut akan menentukan perkembangan paradigma keagamaan Indonesia di kemudian hari. Menurt Martin van Bruinessen, hampir tidak ada informasi yang akurat menyebutkan jumlah pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir sebelum abad 20. Kecuali setelah memasuki pertengahan abad 19. Pada pertengahan akhir abad 19 tercatat ada 30 *riwaq* di kompleks Al-Azhar yang dihuni oleh pelajar dan mahasiswa

berasal dari berbagai negara: Jawa, Turki, Kurdi, dan Arab Iraq (Martin van Bruinessen, 1994: 144). Pertumbuhan komunitas *Jawa* yang cukup signifikan sebenarnya terjadi setelah tahun 1912. Tahun 1900-an kondisi *riwaq Jawah* yang menampung mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar sudah tidak lagi bisa menampung mahasiswa baru dari Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 1912 para penghuni *riwaq* mendirikan asosiasi khusus penghuni *riwaq,* Jama'ah Setia Pelajar (JSP). JSP mengusahakan pengembangan riwaq agar bisa menampung mahasiswa baru dari Indonesia (Burhanudin, 2004: 183).

Berdasarkan catatan Konjen Belanda di Kairo dalam lampiran E dari *Bedeverslag* 1914/1915 yang termuat dalam lampiran IV dari buku *Historiografi Haji Indonesia* karya M. Saleh Putuhena, disebut-sebut ada 37 orang mahasiswa Indonesia yang tiba di Mesir untuk menuntut ilmu di Universitas al-Azhar. Sebagian besar dari mereka ada yang sudah tinggal satu tahun di Mekah, dan ada juga yang sudah tinggal delapan tahun dengan usia yang variatif. Usia termuda 15 tahun dan tertua 44 tahun. Mereka semua berasal dari berbagai daerah di Nusantara: Sambas (11 orang), Sumatra Utara (6 orang), Pandeglang (4 orang), Palembang (2 orang), Padang (2 orang), Martapura (1 orang), Batavia (1 orang), Banten (1 orang), Serang (1 orang), Kendal (1 orang), Pekalongan (1 orang), Lampung (1 orang) dan Bengkulu (1 orang). Jumlah tersebut semakin bertambah banyak setelah tahun 1912. Di antara mahasiswa asal Pandeglang yang perlu disebutkan adalah Hadji Inoeng Sama Boa, Hadji

Mohamad Noer Labuan, dan Mohamad Oemar Pandeglang (Putuhena, 2007: 362-363).

Catatan ini menandakan periode awal orang- orang Banten yang belajar ke Al-Azhar setelah wafatnya Syekh Nawawi Tanara. Pada saat yang bersamaan Kairo tengah bergeliat untuk menjadi sentral studi Islam dunia yang bergaya modern. Sistem yang diterapkan Al-Azhar tidak sama dengan tradisi Mekah yang kebanyakan para gurunya mengajarkan kitab di Masjid al-Haram dan rumah-rumah mereka pribadi, meski pun di sana telah berdiri juga Madrasah Showlatiyah yang dibangun untuk melayani kebutuhan pendidikan madrasah bagi orang- orang India. Karena madrasah ini bersifat eksklusif untuk orang-orang India, maka jarang sekali orang Indonesia yang belajar di Showlatiyah, mereka lebih tertarik untuk privat dengan para syekh di Masjid al Haram.

K.H. Syam'un terhitung ke dalam kelompok pelajar Banten dalam gelombang pertama sebelum tahun 1915 saat Al-Azhar tengah menjalankan usaha moderniasi managemen dan kurikulum untuk pertama kalinya. Al- Azhar, pusat pendidikan Islam tertua ini, untuk pertama kalinya melakukan reformasi sistem pendidikan dan managemen administrasinya di bawah kepemimpinan Syekh Salim al-Bishri (1909-1917), seorang ulama al-Azhar yang disebut oleh jurnal *al-Waqa'iy al-Mishriy* sebagai tokoh agamawan yang paling berpengaruh di Mesir pada tahun 1915 (Indira Falk Gesink, 2010: 229), berdasarkan arahan 'Abdullah Nadim, Muhammad 'Abduh, and Muhammad al-Zawahiri. Berdasarkan narasi Indira Falk Gesink,

para alumni periode ini dipersiapkan untuk menghasilkan para ulama yang "melek" urusan kepemerintahan setidaknya mereka dapat mengambil peran sebagai *qadhi* (Indira Falk Gessink, 2010: 226-227).

Pada kurikulu Al-Azhar yang seperti inilah K.H. Syam'un belajar dan tumbuh sebagai ulama Banten kharimatik yang berpandangan modern dan cakap di bidang fiqih serta melek persoalan kenegaraan.

Al-Azhar sendiri telah mengalami usaha modernisasi di tahun 1908 dengan menerapkan sistem klasikal. Semula pengajaran di Al-Azhar sama dengan di Masjid al Haram, pengajaran dilakukan di masjid dengan tanpa ada sistem berjenjang. Sejak tahun 1908 itu Al- Azhar menerapkan tiga jenjang pendidikan: pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dan terus dilakukan pemantapan dalam beberapa periode; pada tahun 1911 Al-Azhar, di bawah kepemimpinan Syekh Salim al-Bishri, mengembangkan durasi 5 tahunan untuk semua jenjang. Dan tahun 1930 disempurnakan lagi menjadi pendidikan dasar 4 tahun; menengah 5 tahun; dan pendidikan tinggi 4 tahun, kecuali pendidikan tinggi keterampilan yang menghabiskan waktu 5 tahun. Sejak tahun 1930 Al-Azhar telah membuka tiga fakultas utama: usuludin, syari'ah dan bahasa Arab (Abudin Nata, [ed], 2013: 193). Perubahan-perubahan signifikan di Al Azhar ini telah menarik perhatian dan minat para santri dari Indonesia, termasuk dari Banten, bahkan Banten pun ikut mengirimkan santri-santrinya ke Al-Azhar. Mereka kembali ke tanah air masing-masing

dengan membawa serta semangat dan ide-ide modernisme Islam dan nasionalisme yang kuat. K.H. Syam'un setelah menyelesaikan studinya di Mesir memutukan untuk kembali ke Mekah dan membuka pengajaran agama di sana kepada para pelajar asal Banten dari kalangan mukimin dan jama'ah haji.

**Pulang Ke Banten dan Mendirikan Pesantren Citangkil**

Haji Jasin, memiliki kedudukan yang penting di tengah masyarakat Cilegon, khususnya Beji. Charles William mencatat selama tahun-tahun 1910 sampai 1914 sudah dua kali pulang pergi Mekah-Banten. Kedatangan pertamanya pada tanggal 25 Februari 1910 membawa serta dua istri dan sepuluh anaknya telah mengundang kecurigaan dari kalangan pemerintah Belanda. Trauma Geger Cilegon yang meletus tahun 1888 masih membayangi alam pikir orang-orang Belanda. Kedatangan Haji Jasin yang disambut hajat besar di Beji dinilai oleh pemerintah Belanda sebagai tanda akan terjadinya gelombang anti penjajah yang bernafas 'pan-Islamisme' seperti pernah terjadi pada kasus Geger Cilegon. Bagaimana pun Haji Jasin adalah anak dari Ki Wasid, seorang pimpinan utama Geger Cilegon. Pada saat yang sama Haji Ahmad ibn Abdul Karim, putra Syekh Abdul Karim-seorang guru tarekat paling utama di tahun-tahun itu yang karomahnya juga banyak dimanfaatkan oleh para pemberontak 1888, pulang ke Banten. Kehadiran kedua tokoh ini telah mengundang polemik antara Overdyun dan Ahmad Djajadiningrat yang menuntut Dr. G.A.J.Hazeu penasihat Gubernur Jenderal Idenburg menurunkan Snouck Hugronge pada bulan Februari tahun 1911 untuk melakukan

investigasi menyeluruh terhadap penduduk muslim di Banten (M.C. Williams, 1984: 161-163).

Dalam proyek itu Achmad Djajadiningrat diminta membantu melakukan observasi terhadap kaum muslimin di Cilegon dan para kiayi di sana. Hal ini diakui oleh Achmad Djajadiningrat di dalam memoarnya (A. Achmad Djajadiningrat, 1996: 185). Meski hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan Overdyun. Achmad Djajadiningrat menilai bahwa mayoritas para kiayi di Cilegon tergolong kelompok kiayi yang memiliki pengetahuan agama yang tidak terlalu dalam, kecuali mereka dikultuskan melalui asumsi mistikal, bahwa mereka memiliki keramat dan oleh karenaya diikuti dan dituruti segalanya oleh para murid mereka (A. Achmad Djajadiningrat, 1996: 187).

Adapun para *Bestuur* di Banten, terpengaruh "hajipobia" yang dinilai oleh Achmad Djajadiningrat adalah sikap yang berlebih-lebihan. Termasuk dalam kasus Haji Jasin dan Hadji Ahmad Bin Abdul Karim. Overdyun pun melaporkan kepada Gubernur Jenderal polemik antara dirinya dengan Achmad Djajadiningrat. Achmad Djajadiningrat dinilai kontraproduktif dengan langkah- langkah pemerintah yang berusaha mengantisipasi lebih dini terhadap potensi perlawanan rakyat terhadap pemerintah kembali meletus (M. C. Williams, 1984: 163). Melihat situasinya tidak menguntungkan, Haji Jasin pun kembali ke Mekah pada tahun 1912 untuk tujuan yang kurang jelas. Setelah dua tahun di Mekah, Haji Jasin kembali ke Banten pada tahun 1914. Tepatnya pada bulan Desember Haji Jasin

kembali ke Banten. Kali ini ia datang ke Banten bersama keponakannya K.H. Syam'un. Haji Jasin memilih tinggal bersama kakak perempuannya dan K.H. Syam'un di Citangkil sebuah distrik di luar wilayah Cilegon. (M. C. Williams, 1984: 165).

Kepulangan keduanya ke Banten dihalang-halangi oleh pihak Belanda. Saat itu Gubernur Jenderal Graff van Limbung mengeluarkan larangan memasuki Banten untuk kedua orang ini. Kartawinara atau Kiayi Haji Abdul Aziz, melakukan lobi-lobi kepada pihak pemerintah dengan jaminan nyawanya sendiri agar Gubernur Jenderal memberikan izin atau mencabut larangan kembali ke Banten (Mahmud Bachtiar, 2014: 180). Atas jaminan ini baik Gobee atau Graff akhirnya memberikan izin kepada kedua orang ini beserta keluarganya kembali ke Banten. Di Citangkil inilah keduanya merancang sebuah pesantren tradisional yang menjadi wadah dakwah keduanya mempersiapkan masa depan anak-anak Banten (M. C. Williams, 1984: 165).

Pesantren ini merupakan cikal bakal dari Perguruan Al-Khairiyah yang kemudian direlokasi akibat proyek PT Krakatau Steel. Saat itu, pesantren belumlah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang bercirikan modern. Pesantren ini tidak mengajarkan baca tulis latin, kecuali setelah modernisasi tahun 1925-an, karena tokoh Haji Jasin terbilang kiayi yang menolak menggunakan huruf latin dan bahasa asing, kecuali Arab menjadi bahasa yang wajib dipelajari oleh para santri melalui

kitab- kitab ajar di pesantren. (Mufti Ali, dkk., 2015: 51; M. C. Williams, 1984: 163-164).

Ada 25 orang santri yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di pesantren ini berdasarkan memori kolektif dan data yang bisa diakses. Diantara mereka ada Sembilan orang yang memiliki peran besar dalam perkembangan Al-Khairiyah berikutnya, mereka adalah K.H. Ahmad Ambon, K.H. Ali Jaya Delingseng,

K.H. Abdul Jalil Curawetan, K.H. Halimi Citangkil, K.H. Halimi Kubangkura, K.H. Asy'ari Kadulisung, K.H.Rasiman Rancaranji, Kiyai Muhamad Sufi Brugbug, dan K.H. Rafei Brugbug (Mufti Ali, dkk., 2015: 53).

Pada tahun 1919 K.H. Syam'un menikahi seorang gadis bernama Nyai Hasunah binti Sama'un dari Caringin. Dalam pernikahannya kali ini ia tidak dikaruniai keturunan. Tapi usia pernikahannya cukup lama. Nyai Hasunah inilah yang mendampinginya sebagai Bupati sampai bergrilya. Selain dengan Nyai Hasunah, K.H. Syam'un menikah dengan Nyai Adawiyah binti Rasdem pada tahun 1920 dan dikaruniai dua orang anak: Rahmatullah dan Ahmad Athoullah. Setelah beberapa tahun usia pernikahannya, K.H. Syam'un menikah lagi dengan Nyai Fauzah binti Abdul Fatah, darinya ia memiliki anak Faridah (Meninggal saat bayi) dan Fathullah. Terakhir kalinya ia menikah dengan Nyai Mahdiah binti Yasin memiliki anak Qosid dan Abdul Karim (Mahmud Bachtiar, 2014: 182).

# BAB II

**Menggagas Pembaruan Pendidikan Islam**

Mesir membuka alam pikirnya secara lebih luas. Sepulangnya dari Mesir, ia mengalami transformasi diri yang hebat. Dari seorang santri tradisionalis, terpapar alam pikir Mesir yang modernis, setelah tahun 1914 K.H. Syam'un menampilkan diri sebagai seorang muslim tradisionalis-modernis.

Al-Khairiyah mungkin satu-satunya buah pikir K.H. Syam'un yang sangat brilian untuk zamannya. Tahun-tahun itu memang dunia Islam tengah bergeliat setelah tersadarkan oleh banyak propaganda pergerakan Islam di Timur Tengah, terutama Mesir. Berkembangnya sekolah-sekolah ala Belanda memicu kalangan terpelajar muslim di beberapa daerah di Indonesia melakukan modernisasi pendidikan Islam yang semula hanya berupa pesantren dan surau-surau.

Al-Khairiyah yang digagas oleh K.H. Syam'un menjadi membuka perubahan yang mendasar dalam tradisi pendidikan Islam di Banten. Tidak saja dalam tataran konsep dari Pesantren ke Madrasah, tetapi orientasi pengembangan pendidikan pun beralih dari Mekah ke Mesir. Dan Al-Khairiyah telah menjembatani banyak santrinya melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Di antara mereka ada yang bersentuhan langsung dengan pergerakan bangsa seperti K.H. Abdul Fatah Hasan dan K.H. Sjadeli Hasan, kakak-beradik kader Al-Khairiyah yang berhasil mengangkat nama besar Al-Khairiyah tidak saja di kancah

regional tetapi di kancah nasional. K.H. Abdul Fatah Hasan menjadi salah satu profil kuat alumni Al-Khairiyah yang berhasil mengambil peran di dalam BPKI dan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan secara misterius.

Al-Khairiyah berhasil melahirkan kelompok intelektual muslim yang baru dan memasok sumber daya manusia yang progresif bagi pertumbuhan masyarakat Banten di kemudian hari, bahkan sampai sekarang banyak tokoh-tokoh intelektual muslim yang berhasil ikut membangun Banten paska menjadi provinsi di tahun 2000.

Cucu dari tokoh Peristiwa Geger Cilegon yang lahir pada tahun 1893 ini, berjasa besar dalam bidang pendidikan. Kiprah pendidikannya tidak hanya terasa di Banten tetapi juga di Lampung, Sumatera Selatan, DKI, Jawa Barat, dan bahkan Jawa Tengah. Seperti disebutkan dalam *Gunseikanbu* 2604, no inventaris 75 bahwa setelah menyelesaikan program studinya di Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir, K.H. Syamun mendirikan lembaga perguruan Al-Khairiah di Citangkil Cilegon Banten pada tahun 1925.

Berdasarkan survey pemerintah Keresidenan Banten jumlah pesantren dan madrasah mencapai 691. Pesantren Citangkil salah satu dari jumlah tersebut. Pesantren Citangkil adalah cikal bakal Madrasah Al Khairiyah yang didirikan oleh K.H. Syam'un. Didirikan untuk pertama kalinya tahun 1916 dan berjalan sampai tahun 1923. Di dalam pesantren tersebut K.H. Syam'un menyelenggarakan pendidikan tradisional yang mengajarkan kitab-kitab kuning kepada para santrinya seperti

lumrahnya pesantren-pesantren yang berdiri di Banten. Di tahun 1924 K.H. Syam'un menunaikan ibadah haji dan mukim di Mekah selama kurang lebih satu tahun. Setelah kembali dari Haji, ia mengaktifkan kembali kegiatan pendidikan di Citangkil. Rupanya pengalaman berhaji kali ini memberi inspirasi baru kepadanya. Ia pun mentransformasikan Pesantren Citangkil menjadi madrasah bergaya modern, ia namakan madrasah ini Al-Khairiyah (Mufti Ali, dkk., 2018: 14-18).

Pondok Pesantren Al-Khairiyah Lama di Delingseng Cilegon
(Sumber dokumentasi: Alwiyan Qosid Syam'un)

Dari kalangan Al-Khairiyah sendiri ada pengakuan bahwa nama Al-Khairiyah terinspirasi sebuah organisasi pergerakan pelajar muslim asal tanah Nusantara *Jama'at al-Khairiyah al-Talabiyah al-Azhariyah al-Jawiyah* yang dipimpin untuk pertama kalinya oleh Djanan Thaib. Ada kemungkinan K.H. Syam'un mengetahui bahkan menjadi anggota dari perkumpulan ini. Seperti dituturkan William Roff, para pelajar

asal Indonesia dan Malaysia banyak yang terlibat di dalam organisasi ini (William R. Roff, tth: 73; Mufti Ali, 2016: 171).

Dengan membawa nama itu sepulangnya dari Haji di tahun 1925, pesantren Citangkil yang dulu pernah dibinanya ditransformasikan menjadi sebuah madrasah ala institusi-institusi pendidikan Islam di Timur Tengah. KH Syam'un dinilai sebagai pembaharu pendidikan Islam di Banten (Maftuh, 2015: 222). Di lembaga pendidikan yang didirikannya ia memperbaharui metode pendidikan dan pengajaran Islam, yang dianggapnya usang dan tidak akan menyaingi kualitas dan kompetensi lulusan dari pada sekolah-sekolah ala Belanda. Untuk itu ia memperkenalkan kurikulum modern di mana ilmu-ilmu agama diajarkan berdampingan dengan ilmu-ilmu umum. Ia juga memperkenalkan sistem manajemen modern. Pengembangan madrasah al-Khairiyah dilakukan dalam dua tahap. 1933 Al-Khiriyah dikembangkan menjadi 11 tahun. Selama kurun 1925-1930 siswa yang belajar di Al- Khairiyah menghabiskan waktu 9 tahun. 2 tahun persiapan, 3 tahun madrasah Ibtidaiyah dan 4 tahun kelas Tsanawiyah. Setelah tahun 1933 Al-Khairiyah membuka kelas *mua'limin* (Mufti Ali, dkk, 2018: 22; Mufti Ali, 2016: 174-177).

Melihat perkembangan Al-Khairiyah begitu signifikan, para pengurus Al-Khairiyah harus mulai memikirkan jalan menjawab tantangan masa depan Al- Khairiyah. Maka didirikanlah sebuah Koperasi Boemi Putra oleh para pengelola Al-Khairiyah yang tidak lain mereka adalah para alumni pesantren Citangkil. Koperasi ini didirikan pada tahun 1928

yang tujuannya tidak lain untuk menopang masalah finansial Al-Khairiyah sekaligus menjadi wadah sosial-ekonomi untuk membantu masyarakat di sekitar Al-Khairiyah. Berangkat dari kesadaran persaingan pasar dengan pedagang asing yang sangat ketat, apalagi Cina berhasil menguasai perdagangan di Cilegon K.H. Syam'un berpikir bahwa Al Khairiyah haruslah memiliki sayap usaha yang mampu menjembatani petani-petani lokal agar mereka mampu berdaya dan meningkatkan kesejahteraan tanpa dikuasai oleh etnis Cina terlebih orang-orang Eropa. Berdirilah Koperasi Boemi Putra yang dipimpin oleh Abdul Aziz Kartawirawan. Kondisi perekonomian dan pertanian di Banten sejak tahun 1924 tengah mengalami kemerosotan. Tentu saja di luar persaingan dengan pihak asing, persoalan produktifitas pertanian dan perkebunan masyarakat Cilegon khususnya sedang kurang menguntungkan. Koperasi ini memiliki peran besar di tengah situasi ekonomi Cilegon yang demikian. Koperasi Boemi Putra banyak memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sekitar dengan dasar gotong royong. Sekian persennya dana yang dikelola koperasi ini diperuntukan membantu pasokan dana oprasional madrasah.

Koperasi Boemi Putra mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 20 Juni 1928 dengan susunan kepengurusan: K.H. Abdul Aziz sebagai ketua, K.H. Abdurahim sebagai sekretaris, K.H. Syam'un sebagai bendahara. Ada pun yang menjadi anggota adalah K.H. Aliudin, K.H. Kasiman, K.H. Sariman dengan masa jabatan 25 tahun lamanya (Mufti Ali, 2015: 69).

KH. Syam'un bersama pengurus Koperasi Bumi Putra tahun 1928
(Sumber: Mufti Ali dalam biografi KH. Syam'un 2015)

Pada tahun 1931, lima tahun setelah beroperasi madrasah ini, Al-Khairiyah mendirikan sebuah organisasi yang digerakan oleh para alumni, guru dan siswa dewasa, yaitu *Jam'iyat Nahsdhati Syubbanil Muslimin*, tepatnya tanggal 21 Juni 1931. Organisasi ini dipimpin langsung di bawah binaan K.H. Syam'un dan dipimpin oleh K.H. Ali Jaya seorang guru bantu di Al-Khairiyah. Salah satu tugas yang diemban organisasi ini adalah membantu pengembangan Al-Khairiyah untuk memperluas ruang pengabdiannya, termasuk pendirian cabang-cabang al- Khairiyah dan kaderisasi para alumni al-Khairiyah (Mufti Ali, dkk, 2018: 20).

Ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat sekelilingnya terpuruk, KH Syam'un yang memiliki motto hidup '*membangun umat tidak cukup dengan air kendi dan jampi, tetapi dengan ilmu pengetahuan*' tampil menawarkan solusi dengan mendirikan Koperasi Boemi Poetra pada tanggal 20 Juni 1928. Sebagai

seorang ulama yang progresif dan patriotik, ketika menyadari bahwa alumni lembaga pendidikan Islam belum mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial, KH Syam'un, bekerjasama dengan PEDATI (Persekutuan Dagang Tjilegon), perhimpunan para saudagar di Cilegon, mendirikan HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) Al-Khairiyah (Banten Bode, 1936). Pada tahun 1936 *Holandsch Inlandsch School (*HIS*)* di perguruan Al-Khairiyah pusat Citangkil. Pendirian HIS di Al-Khairiyah berangkat dari rasa keprihatinan K.H. Syam'un kepada pendidikan Islam tradisional yang tidak mampu bersaing dengan pendidikan Barat yang dikembangkan Belanda (Mufti Ali, dkk, 2018: 23-24). Yang menjadi guru HIS adalah alumni-alumni Al-Khairiyah seperti Chusnul Achyar (Pulo Merak), Idris (Bandung), Abdurahman (Lampung), Sahdi (Cianjur), Asjikin Hamim (Lampung), Sjahsiam (Cianjur) (Mufti Ali, dkk, 2018:24-25).

Eksperimen penerapan sistem persekolahan (HIS) dapat dianggap sebagai sebuah praksis dari pemikiran progresif seorang ulama visioner ini. Keberaniannya dalam mendirikan lembaga pendidikan yang berbasiskan ilmu-ilmu umum ini patut mendapatkan acungan jempol, karena keberaniannya berhadapan dengan konservatisme sebagian besar ulama Banten yang masih dengan teguh mengharamkan diadopsinya ilmu-ilmu umum yang menurut KH Syam'un wajib dikuasai untuk mengejar ketertinggalan dan mengatasi kebodohan. *Padvinderij* (Pramuka) juga didirikan oleh KH Syam'un untuk melatih siswa siswi Al-Khairiyah dalam *teamwork* dan melatih kemandirian

siswa siswi dalam mengatasi kesulitan hidup (Banten Bode, 1938).

Melalui organisasi yang dikelola oleh para alumninya ini Al-Khairiyah berhasil meraih pencapaian yang gemilang. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia Al-Khairiyah berhasil membuka cabang di berbagai daerah. Al-Khairiyah sudah memiliki 48 cabang di Banten, Lampung, dan Palembang hanya dalam kurun 1929 sampai 1945 (Mufti Ali, dkk, 2016: 180). Prestasi ini tentu saja hanya mungkin dicapai oleh militansi para pengurus dan para alumni yang didukung oleh relasi sosial yang baik. Dan K.H. Syam'un berhasil membangun itu di dalam tubuh para alumninya.

Al-Khairiyah terus mengalami perkembangan dan kemajuan dari masa ke masa meski pun mendapat penetrasi dari kalangan pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Al-Khairiyah menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang dicurigai oleh pemerintah sebagai tempat yang akan mencetak kaum pejuang melawan kolonial. Dalam tekanan politik seperti itu Al-Khairiyah tetap mampu bertahan sampai sekarang.

Siswa-siswinya berasal dari berbagai daerah di Indonesia: Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan bahkan dari Maluku. Lembaga pendidikan yang didirikannya berkembang sangat cepat. Sampai menjelang kemerdekaan, lembaga pendidikan yang didirikannya telah memiliki lebih dari 40 cabang yang tersebar di Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan sampai ia wafat, lembaganya ini telah memiliki lebih dari 70 cabang di seluruh Indonesia

(Mufti Ali, 2015: 174-9). Dan pada peringatan hari lahirnya Al-Khairiyah tanggal 11 Mei 2018 yang dihadiri oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo, disebutkan dalam Pidato Ketua PB Al-Khairiyah bahwa Al-Khairiyah telah memiliki 673 cabang dan tersebar di 7 provinsi di Indonesia. Berdasarkan catatan Pengurus Besar Al- Khairiyah tahun 1982 jumlah cabang Al-Khairiyah dengan berbagai jenis dan jenjang pendidikannya telah mencapai 417 buah, yang sebaran geografisnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Data Cabang Al-Khairiyah di Indonesia dalam Rentang 1925-1980**

| Nama Provinsi | ımlah Sekolah Al-Khairiyah | Rentang Tahun Berdiri | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Banten | 276 | 1925-1980 | |
| DKI Jakarta | 13 | 1961-1980 | |
| Jawa Barat | 5 | 1960-1980 | |
| Lampung | 108 | 1936-1980 | |
| Sumatera Selatan | 13 | 1960-1980 | |
| Jawa Tengah | 1 | 1980 | |

(Sumber diolah dari buku *Perguruan Islam al-Khairiah dari Masa ke Masa*, 1984: 64-70; Mufti Ali, 2015: 174-200)

## Pendidikan Nasionalisme di Al-Khairiyah

Sejak berdirinya tahun 1925 dan tiga tahun sebelum Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pengantar resmi pengajaran di Al- Khairiyah. Melalui penggunaan bahasa ini, Brigjen KH Syam'un ingin

menanamkan rasa nasionalisme kepada para murid-muridnya. (Mufti Ali, 2015: 64; M. Muhyiddin, 1990: 57) Wajar jika dalam dokumen NEFIS dalam file arsip *Allied Military Administration Civil Affairs Branch* tanggal 25 Maret 1946, KH Syam'un kemudian diidentifikasi dengan apelasi sebagai berikut:

*'deze man , de verwaarde Kyahi van Tjitangkil (Tjilegon) en [klein]zoon van de hoofdaanleger van de Tjilegon opstand noemde zich vroeger K.H. Samoen. Kenmachtige figuur met groot gezag.'*(*tokoh ini, seorang Kiai yang sangat kharismatik dan cucu dari Pemimpin Pemberontakan Cilegon, dulu dikenal dengan KH. Samaoen, merupakan seorang figur kuat dengan otoritas besar*. (lihat lampiran 3)

Pada lembaga pendidikan yang didirikannya itu, ia tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum tetapi juga menanamkan secara sistematis nilai- nilai patriotisme dan nasionalisme kepada para siswa dan siswinya. Nilai patriotis dan nasionalis tersebut tercermin dalam *Mars Syubbanun* Muslimin yang dilantunkan setiap hari menjelang belajar dan pada setiap kesempatan oleh para siswa-siswinya tidak hanya di Perguruan Al-Khairiyah pusat di Cilegon Banten tetapi di seluruh cabang- cabangnya yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia

*Mars*

*Kita Gerakan Pemuda Muslim Indonesia Diikat oleh Satu Ikatan, Agama Islam Kita setara di setiap jenjang dan barisan*

*Dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah Reff: Hai Bangsaku, Indonesia!*

*Bangkitlah dan gerak perkasa menuju Surga Di dalam perlawanan dan perang besar*

*Mempertahankan agama dan tanah air Indonesia Tepiskan rasa takut menghadapi kekuatan asing yang kuat Memang kini mereka tengah bersuka cita*

*Tepiskan rasa takut mengahdapi kekuatan asing*

*Sadari, di setiap kita ada Jaminan Allah yang Maha Agung*

(Sumber: Mufti Ali, 2015: 204).

Menurut salah seorang alumninya, Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., Mars ini masih terus dikumandangkan oleh para siswa-siswi Al-Khairiyah sampai akhir tahun 1960-an namun dalam konteks melawan ideology komunisme. (Wawancara, 22 Mei 2014). Di samping dengan Mars tadi, dalam kerangka menanamkan cinta tanah air (*hubbul wathan*) kepada para siswa dan siswinya, Brigjen KH. Syam'un juga mewajibkan para siswa dan siswinya menghapal tembang-tembang motivasi yang terdiri dari 30 Syair, yang masing-masing terdiri dari 2-4 bait tembang dalam bahasa Arab. Tembang-tembang ini disusun atas arahan dan supervisi KH. Syam'un sendiri dan dicetak dengan judul *Majmu'at al-Anasyid li Nahdat Syubban al-Muslimin* pada tahun 1937untuk para siswa dan siswi perguruan Al-Khairiyah. Penanaman sikap patriotik tercermin terutama dalam syair ke 7, 11 dan 17.

Syair ke-7:

*Kalian wahai para tunas-tunas muda*

*Cahaya cita-cita, bintang petunjuk dan orientasi ketinggian martabat*

*Berbaktilah kepada negerimu dan curahkanlah perhatian penuhmu*

*Apa yang telah kalian persiapkan untuk masa depanmu wahai para tunas-tunas muda?*

*Kiprah apa yang sedang kamu lakukan sekarang?*

*Agar negerimu bahagia [dan sejahtera] karenamu di masa yang akan datang*

Syair ke-11:

*Kedamaian, kedamaian, untuk bangsa kita kedamaian*

*Kita akan mencapai apa yang kita cita citakan untuk bangsa kita keamanan*

*Bangsa kita tinggi cita citanya berharap menggapai harapan yang besar*

*Kehinaan adalah kematian kehidupan, tidak ada kehidupan bagi orang yang hina*

*Barang siapa yang mencita-citakan kemuliaan ia mengingat kematian agar ia dapat hidup [optimis]*

*Bekerja bekerja sampai kapanpun bercita cita*

*Marilah kita marilah kita berjuang menjadi yang terdepan Kita optimalkan etos kerja tuk menjaga warisan leluhur kita Sungguh hal itu akan membuatmu jaya di dunia*

Syair ke 17:

*Wahai putera puteri bangsa*

*Negeriku adalah darahku kami akan menjaganya Dari ancaman yang datang dari lautan dan daratan*

*Reff: Negeriku bangsaku, kami adalah pemilikmu*

*Kami akan menjagamu, dengan jiwa raga kami, kami akan melindungimu*.

Maka tidak heran ketika Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, para siswa siswi dan kader Al-Khairiyah baik di pusat maupun di seluruh cabang- cabangnya mengikuti seruan Brigjen KH. Syam'un untuk mengikuti seruan Presiden Soekarno agar para pemuda dan pemudi dan seluruh warga Indonesia turut serta dalam mempertahankan NKRI. Para kader dan alumninya terlibat aktif dalam pasukan BKR/TKR, seperti Abdul Fatah Hasan, Syadli Hasan, Ali Jaya, Qurtubi Jannah, Syibromalisi, atau dalam Barisan Tentara Pelajar (TRIP) seperti Rahmatullah Syam'un, Rahmatullah Sidiq, dll (Maftuh, 2015: 205-215; Abdul Malik, 2009: 12)

**Al-Khairiyah dan Kemunculan Kelompok Intelektual Baru**

Syair-syair ini berhasil menanamkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang kuat ke dalam hati para santri Al-Khairiyah. Terbukti setelah kemerdekaan RI diproklamasikan banyak santri Al-Khairiyah terlibat di dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. K.H. Syam'un sendiri menjabat bupati Serang dan beberapa

muridnya aktif sebagai politikus menjadi anggota BKR dan TKR kemudian BPUPKI. Abdul Fatah Hasan, Syadeli Hasan, Ali Jaya, Qurtubi Janah dan lain sebagainya adalah tokoh-tokoh lapis kedua di Al-Khairiyah setelah K.H. Syam'un yang ikut terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI (Mufti Ali dan Permana, 2018: 11). Dua orang tokoh al- Khairiyah yang gugur sebagai kusuma bangsa di antara mereka adalah K.H. Syam'un dan K.H. Abdul Fatah Hasan. Tokoh yang terakhir ini akan kita perbincangkan dalam bab-bab berikutnya.

Kiprahnya di dunia pendidikan sudah tidak di ragukan lagi. Qurtubi Jannah misalnya beberapa kali memegang tampuk kepemimpinan menjadi Kepala Madrasah, kepala Madrasah Ibtidaiyah Pengoreng di jabatnya sebelum berangkat studi ke mesir yakni sejak 27 Januari 1950 sampai dengan Juni 1956, ia juga pernah menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mu'wanat al-Syuban Kaujon yang di jabatnya sejak tanggal 2 Februari 1977. Kepemimpinan kembali terlihat pada saat ia menjabat Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah IAIN serang dari tahun 1971 samapai dengan 1974.

Dalam bidang organisasi, ia sejak masih belajar telah aktiv di berbagai organisasi pelajar pertama yang di ikutinya adalah GPII (Gerakan Pelajar Islam Indonesia). Periode tahun 1950-1956, ia menjabat sebagai ketua GPII cabang Bojonegoro ketika GPII pusat menyelenggarakan pelatihan pengkaderan, ia mengikutinya selama 15 hari di Bandung (14-28 Maret 1954). Selain itu, ia juga aktif menjadi Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang Priode 1970-1972.

Sebagaimana umumnya para pelajar pada masa- masa tahun 1940-an yang tidak hanya belajar di ruangan- ruangan kelas, Qurtubi Jannah juga terlihat secara aktif dalam dunia kemiliteran, pada tahun 1945, ia berlatih kemiliteran di Bogor selama 3 bulan. Kemudian pada tahun yang sama, ia di beri pangkat Sersan Mayor dan menjadi Kepala Staf Barisan Markas Divisi 1000 Brigade Tirtayasa. Qurtubi Jannah wafat pada tahun 1977. Sebagai pangakuan pemerintah atas jasa-jasanya mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah menganugerahkan gelar Kehormatan Veteran Kemerdekaan RI tanggal 15 Agustus 1981.

Demikianlah beberapa alumni terbina lulusan Al-Khairiyah awal. Terlihat mereka tidak hanya mampu menjadi tokoh agama di daerah-daerah tempat mereka tinggal, akan tetapi mereka juga menjadi kader-kader yang heroik dengan melibatkan diri dalam upaya-upaya perjuangan kemerdekaan. Demikian halnya dalam keikutsertaan organisasi-organisasi kemasyarakatan, alumni Al-Khairiyah memiliki pilihannya masing-masing hal ini mengindikasikan bahwa alumni-alumni Al- Khairiyah masa awal cenderung bersikap tebuka dan toleran terhadap sikap dan pilihan orang lain yang berbeda dengan dirinya.

Beberapa riwayat Tokoh Al-Khairiyah ini memperlihatkan kontribusi Al-Khairiyah dalam melahirkan elit-elit agama dan masyarakat yang mampu bekerja sama dan bahkan menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan. Hal ini merupakan terobosan baru karena tidak sedikit para tokoh

agama di Banten yang menjauh dan menolak ikut menjadi bagian dari Pemerintah. Implikasi dari sikap seperti ini, lebih jauh, adalah tidak tersedianya tenaga-tenaga professional yang mau dan mampu memegang peran pada birokrasi pemerintah.

Ketika Banten menjadi Provinsi pada tahun 2000, hampir sebagian besar posisi strategis pemerintahan di pegang oleh orang-orang dari luar Banten yaitu daerah Priyangan. Modernisasi kota Cilegon menjadi bagian tak terpisah dari proyek Nasional yang digulirkan oleh Soekarno dalam rangka membangun satu bangsa yang baru mendapatkan kemerdekaan. Dalam istilah Soekarno masa-masa pembangunan Cilegon ada dalam periode *investment*, sebagai tahap lanjutan ketiga setelah periode revolusi fisik dan *survival*. Cilegon dipersiapkan sebagai kantong *investment* di bidang material. Karena menurutnya untuk membangun Indonesia, kita butuh pasokan besi dan baja serta yang lainnya, yang dianggap layak dipertimbangkan adalah Cilegon sebagai daerah segi tiga yang menghubungkan berbagai kantong biji besi Indonesia (Mufti Ali, dkk, 2016: 191).

Kalau kita bicara modernisasi Kota Cilegon menurut informasi koran Kompas, Minggu 10 Juli 1988, perubahan ini mulai terasa sejak awal tahun 1970. Ketika pemerintah pusat menetapkan Cilegon sebagai Kota Administratif pada bulan September 1986, pemerintah harus mengimbangi berbagai perubahan besar dengan banyak konsekuensi yang tidak sederhana. Koran Kompas menggambarkan diantara ciri perubahan menuju modernisasi secara cepat dapat dilihat dari berdirinya banyak fasilitas umum kelas atas yang mulai dibangun

di Cilegon. Seperti lapangan golf dengan kapasitas 16 *hole*, satu fasilitas olah raga mahal yang tidak dimiliki oleh kota Provinsi sekali pun, ada di Cilegon. Cilegon di tahun 1980-an memiliki enam bioskap dengan kualitas memadai. Enam tempat bilyar, tiga tempat permainan keterampilan, dan sebuah tempat rekreasi. Ada 22 hotel dan 15 rumah makan, bahkan dua diantaranya sudah menyajikan makanan asing (Kompas, Minggu, 11 Juli 1988: 1).

Belum lagi ditambah pelabuhan-pelabuhan kapal laut dengan kapasitas besar, bank yang tidak sedikit, lembaga asuransi dan lain-lain adalah indikator laju cepat Cilegon menjadi sebuah kota metropolitan di Banten. Cilegon telah menjadi incaran para investor asing, dan sangat dipertimbangkan dengan angka penduduk pada tahun 1980-an mencapai 200.000, Cilegon telah benar- benar menjadi kota yang tidak pernah tidur.

Perubahan yang pesat ini tentu saja efek dari berdirinya PT. Krakatau Steel dengan anak perusahaannya serta perusahaan-perusahaan lainnya. Kehadiran BUMN PT. Krakatau Steel yang merupakan penghasil tunggal untuk kebutuhan baja dan besi di Indonesia (Beroperasi sejak tahun 1978 dan didirikan tahun 1971 sebagai kelanjutan dari proyek yang sempat mandeg di tahun 1965) telah menjanjikan banyak kalangan, termasuk bagi berbagai pihak yang tinggal di Cilegon, PT. Krakatau Steel memberikan cipratan rezeki melalui dana CSR-nya atau dana-dana lainnya (Kompas, Minggu, 10 Juli 1988).

Tentu saja perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis yang cepat itu membawa serta problem sosial yang tidak sederhana di samping mendatangkan keuntungan yang optimistis. Dalam tinjauan kritis koran Kompas, program modernisasi atau industrialisasi Cilegon yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya tak ubahnya pemerintah Belanda di era kolonial yang memicu konflik sosial 1988. Kehadiran perusahaan bergengsi ini memang telah mendorong kemajuan yang sangat pesat. Namun tidak dipungkiri bersama laju kemajuan yang pesat itu, ketidakseimbangan sosial juga nampak mewarnai Cilegon yang sedang berlari itu. Seperti kepadatan penduduk yang meningkat tinggi mencapai angka 1.136 per kilometer. Pengembangan tata ruang Cilegon terbentur langsung dengan geografis yang dimilikinya, perbukitan di selatan dan lautan di bagian utara memaksakan pemerintah hanya dapat memanfaatkan setengah lahan saja. Belum lagi dipersulit masalah air bersih. Pasokan air dari Rawa Danau tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk kebutuhan air bersih masyarakat Cilegon (Kompas, Minggu, 11 Juli 1988: 1).

Meski modernisasi bagi masyarakat Cilegon menjadi satu hal yang tak terpungkiri lagi, tapi eksesnya cukup terasa, di mana norma-norma keagamaan yang kental pada masyarakat Banten berbenturan langsung dengan *lifestyle* yang modern. Tentu saja ada pergeseran budaya yang sangat besar dari agraris ke indusitrialis dengan konsekuensi tersingkirnya norma-norma religius oleh sekularisme yang lekat pada masyarakat industrialis.

Indikator sederhananya, posisi pesantren yang sangat sentral sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat mulai ditinggalkan. Hal ini diakui oleh kedua tokoh ulama Cilegon K.H. Rahmatullah Syam'un dari Al-Khairiyah dan K.H. Nadjiullah Luthfi dari Jauharunuqiyah saat diwawancarai oleh Kompas (Kompas, Minggu, 10 Juli, 1988: 1).

Seperti diakui oleh koran Kompas, bahwa pendirian PT. Krakatau Steel di Cilegon membawa komitmen politik kekuasaan dan politik sosial-budaya. Soekarno telah mencanangkan pembangunan perusahaan itu dengan nama PT. Trikora atas bantuan dan Uni Sovyet. Setelah pemberontakan PKI gagal pada tanggal 30 September 1965, dan kekuasaan beralih kepada Soeharto, maka perusahaan bergengsi ini dirubah menjadi PT. Krakatau Steel dan kembali dibangun pada tahun 1971 (Kompas, Minggu 10 Juli 1988: 1).

Uni Sovyet telah menanam dana investasi untuk proyek nasional Trikora sebesar 37.799.319 US dolar dengan dana dalam negeri sebesar Rp. 85 milyar (Bonnie Traya, 2016: 194). Bagaimana pun harus diakui bahwa Uni Sovyet dalam masa-masa *investment* Indonesia selalu menyiapkan bantuan-bantuan kerja sama kepada Soekarno. Sebagai contoh ketika Soekarno mencanangkan merebut Irian Barat dari tangan Belanda, Uni Sovyet adalah negera yang memberikan bantuan dana yang besar kepada Indonesia untuk kebutuhan pengadaan persenjataan, dana yang dikucurkan kepada Indonesia oleh Uni Sovyet mencapai 450 juta US dolar (Cantweld dan Utrecht, 2011: 228). Dalam posisi yang sama Amerika Serikat selalu

memberikan perhatian kepada dinamika politik Internasional di Indonesia. Amerika sendiri sangat menginginkan agar Indonesia berpaling dari Uni Sovyet.

Sementara waktu, Soekarno harus menyelesaikan banyak intrik politik antar dua kubu yang terus bersaing, kubu partai politik yang dibintangi oleh PKI dan PNI, kubu yang lainnya adalah TNI. Elit militer selama pemerintahan Soekarno telah mengambil peran penting di berbagai lini. Tidak saja menguasai administrasi sipil, mereka juga menguasai perusahaan-perusahaan milik negara. PKI sebagai Parpol yang tidak suka keterlibatan TNI melewati batas wewenangnya, sangat berharap dan memang terus mencari jalan menggeser kedudukan mereka khususnya kedudukan administrasi sipil dan perusahaan-perusahaan milik negara. Tentu saja PKI memiliki peluang besar menyingkirkan TNI dari dua ranah tersebut mengingat dalam sidang MPRS tanggal 11 April 1965, Soekarno mengakui kegagalan rencana Deklarasi Ekonomi (Dekon) delapan tahunan itu separuh besarnya disebabkan oleh militer. Selain adanya suap- menyuap antara elit militer dan perwira menengah untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan tertentu, belanja militer yang berlebihan ikut menggagalkan rencana pengembangan ekonomi nasional. Dan tentu saja pengaruh bantuan hutang dari negara asing untuk kepentingan impor dan proyek-proyek strategis telah ikut memperbesar dampak terhadap kegagalan DEKON (Cantweld dan Utrecht, 2011: 229-230). Termasuk di dalamnya proyek pembangunan pabrik baja Trikora, menjadi salah satu lahan yang gagal dibangun oleh Soekarno.

Peristiwa G 30 S-PKI telah menjadi pukulan telak kepada Soekarno sekaligus menandakan akhir perjalanan kekuasaan pemimpin revolusi. Tapi itu tidak menjadikan seluruh program pembangunan ekonomi gagasan Soekarno ikut berakhir. Kekuasaan Soeharto justru hanya bekerja melanjutkan seluruh pekerjaan Soekarno, termasuk PT. Trikora yang sempat tertunda akibat proses pengusutan dalang-dalang pemberontakan. Pada tahun 1966 pemerintah mengintruksikan seluruh proyek pembangunan yang didanai oleh negara sosialis harus segera dihentikan untuk mencegah banyak hal yang tidak diinginkan. Proyek ini pun kembali berjalan di atas puing- puing pembangunan yang gagal di masa Soekarno selama beberapa tahun dari tahun 1970-an sampai 1980-an. Perusahaan ini baru beroperasi pada tahun 1977, dan pembangunannya serta perluasan lahannya mulai diresmikan Soeharto pada tahun 1979, 1983, 1985, 1987. Soeharto pun dengan mantap melakukan diplomasi secara sosial-politik dengan rakyat Banten melalui tujuan proyek ini untuk mengangkat kehidupan rakyat Banten yang dalam waktu bersamaan justru tengah mengalami keresahan kemiskinan agraris (Mufti Ali, dkk, 2016: 195). Soeharto akhirnya tidak dapat menyelesaikan masalah pembangunan PT. KS dengan bersih. Sekarang masalah yang ditemui justru berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat Cilegon langsung. Pembangunan KS mendatangkan tanggapan negatif dari kalangan bawah. Pejabat Bapenas sendiri menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak melakukan koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah daerah. Bahkan persoalan ganti rugi lahan dengan masyarakat pun banyak yang

terkatung-katung. Terakhir diketahui ada 13 kasus yang sampai tahun 1996 masih ditangani pengadilan (Mufti Ali, dkk, 2016: 199).

Al-Khairiyah termasuk lembaga pendidikan yang terkena penggusuran tanah sejak era Soekarno. Berkaitan dengan ini, Mufti Ali pernah mengutarakan komentarnya dalam catatan editor untuk buku *Catatan Masa Lalu Banten* karya Halwaniy Michrob, bahwa pendirian PT. KS yang memakan lahan Al-Khairiyah adalah faktor strategis yang sistematis untuk mematikan potensi gerakan sparatisme yang tengah hangat pasca-kemerdekaan di Banten. Rencana mendirikan perusahaan baja dan besi di Cilegon tampaknya lebih dipaksakan ketimbang pertimbangan- pertimbangan ekonomis (Halwaniy Michrob dan Chudari, 2011: v). Pada kenyataannya Cilegon tidak memiliki pasokan biji besi dan baja yang cukup untuk produksi multinasional sebagaimana temuan riset Jawatan Geologi Bandung (Mufti Ali, dkk, 2016: 194). Di balik rencana pembangunan perusahaan ini ada peran Chairul Saleh yang menjabat sebagai menteri. Dengan dalih membangun kesejahteraan rakyat, secara perlahan wacana sparatisme yang kuat di Banten dapat dipadamkan. Spekulasi historis yang bermunculan dari pemerhati sejarah Banten modern menilai pembangunan PT. KS di Cilegon memiliki dua agenda penting: meredam gerakan sparatisme dan menghentikan segala upaya revitalisasi Kesultanan Banten dan melumpuhkan pusat pengkaderan pemuda dan pelajar Islam militan di Banten,

Perguruan Islam Al-Khairiyah milik K.H. Syam'un (Halwani Michrob dan Hudari, 2011: vii).

Penggusuran dan relokasi Al-Khairiyah telah berhasil mengurangi intensitas denyut jantung pusat Perguruan Islam Al-Khairiyah dalam mengalirkan semangat dan inspirasi mengembalikan Kesultanan Banten. Apalagi setelah K.H. Brigjend Syam'un wafat dalam pertempuran mempertahankan NKRI tahun 1949. Tentu saja relokasi paksa ini telah memicu konflik internal Al-Khairiyah dan pada saat itu terjadi, keteguhan Al-Khairiyah pun mulai memudar.

**Kiprah Anak Didik K.H. Syam'un**

Ali Jaya merupakan salah seorang santri K.H. Syam'un generasi pertama yang sangat berjasa terhadap perkembangan Al-Khairiyah baik pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Beliau lahir di Delingseng, Kebonsari, Cilegon pada tahun 1901. Ayahnya bernama Aldin. Tidak diperoleh keeterangan lebih lanjut mengenai siapa Aldin ini. Dimungkinkan ayahnya ini berasal dari kalangan umumnya masyarakat Delingseng saat itu.

Semasa kecil Ali Jaya belajar kepada guru mengaji di kampung halamannya, Delingseng, pada usia remaja beliau melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan

K.H. Syam'un. Pada masa ini beliau mengenal kitab-kitab berbahasa Arab yang lebih di kenal dengan istilah *kitab kuning*. Dipastikan masa ini beliau belum belajar ilmu- ilmu umum

maupun huruf latin. Oleh karena memang yang diajarkan K.H. Syam'un dalam pesantrennya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik itu.

Ketika K.H. Syam'un mentranformasikan pesantren menjadi madrasah, Ali Jaya memiliki peran yang sangat penting. Selain beliau di beri tugas untuk mengajar di madrasah tersebut, beliau pun piawai dalam menggalang dana untuk pengembangan pendirian gedung-gedung madrasah. Beliau tidak hanya mengunjungi para dermawan yang berada di sekitar Banten. Beliau juga seringkali mengunjungi Lampung dan sekitarnya dalam rangka mencari dukungan material.

Karena kemampuannya dalam mendapatkan dukungan masyarakat untuk pengembangan Al-Khairiyah maka ketika *Jam'iyyah Nahdat asy-Syuban al-Muslim* di bentuk pada tanggal 31 Juni 1931, beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai ketua pengurus (*voorzitter*).

Pada tahun 1929, di kampung halamannya Delingseng, Ali Jaya mendirikan Madrasah Al-Khairiyah. Madrasah ini merupakan Madrasah Al-Khairiyah cabang pertama. Hal ini mengisyaratkan bahwa kendatipun usianya saat itu masih relatif muda (kurang lebih 28 tahun) akan tetapi belliau sudah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya pencerdasan anak bangsa.

Tidak hanya itu, Ali Jaya, ketika zaman revolusi kemerdekaan, di tunjuk oleh Bupati K.H. Syam'un untuk menduduki jabatan Camat Cinangka. Konon, menurut

putranya, H. Humaedi, Ali Jaya sebenarnya menggantikan Camat sebelumnya K.H. Fatah Hasan yang dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan akut di Cinangka yaitu perampokan.

Ali Jaya, yang dikenal sebagai seorang pemberani dan ahli hikmat, menerima tawaran gurunya itu. Beliau di beri fasilitas seekor kuda yang seringkali dimanfaatkan untuk berkunjung ke kampung-kampung dan masuk keluar hutan sekitar Kecamatan Cinangka, Ali Jaya juga pernah menjadi kepala kantor Kecamatan Pulomerak yang ada di Kerenceng. Sedangkan yang terakhir kali jabatannya di pemerintahan beliau diangkat sebagai Camat Rangkasbitung.

Beliau di akhir hayatnya berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Akan tetapi belum sempat beliau ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasullulah, beliau terkena sakit, pada tahun 1982 beliau wafat.

Ketika ada program pemerintah mengenai pembangunan perluasan pabrik besi baja mengharuskan Madrasah Al-Khairiyah pindah ke lokasi yang baru, Ali Jaya mengusulkan agar pemerintah membangun kembali Madrasah tersebut lengkap dengan sarana dan prasarana belajarnya, seperti lapangan olahraga, aula pertemuan, asrama, kantin, dapur, masjid, perumahan guru, dan kantor. Tanah yang terkena gusuran segera di ganti menjadi luasnya tiga kali lipat dari luas tanah semula. Usulan Ali Jaya diterima yang kemudian di tuangkan dalam surat Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Gubernur Jawa Barat No. 336 tahun 1973.

Dengan demikian, bangunan Madrasah Al- Khairiyah pusat sekarang ini adalah bangunan baru hasil relokasi dari Al-Khariyah Citangkil Zaman dulu, peran dan jasa Ali Jaya yang mewakili pihak Perguruan Islam Al- Khairiyah untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan sangat besar.

Salah satu kader terbaik Al-Khairiyah lainnya adalah Muhamad Syadeli Hasan adik dari Abdul Fatah Hasan. Beliau juga merupakan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI). Mendapatkan pendidikan awalnya di Pesantren Al-Khairiyah pada tahun 1992. Ketika baru menduduki kelas satu Madrasah Tsanawiyah beliau sudah hafal kitab *Jurumiyah*, *Awamil* dan *Syarah ibnu Aqil*. Pada tahun 1932, beliau dinyatakan lulus dari MTs Al-Kairiyah. Bersama-sama untuk menimba ilmu di Universitas Al-Azhar. Beliau lulus pada tahun 1934 dan memperoleh ijazah *Al-Kahairiyah li al-Ghuraba*, ijazah kelas persiapan untuk kuliah stara satu. Syadeli muda hanya baru menamatkan Tsanawiyyah, karena tingkat Mu'alimin belum ada. Kemudian di tahun yang sama, yaitu 1934, beliau melanjutkan ke jurusan *Tadris Li ad-Dirasah Dar al- Ilmiah Darul Ulum Cairo (al-Jami'ah al-Qahirah)* dan lulus pada tahun 1939.

Setelah menamatkan kuliahnya di Universitas Al- Azhar dan Universitas Darul Ulum, beliau kembali ke almamaternya, Al-Khairiyah dan mengajar pada tingkat Tsanawiyah dan Mualimin pada tahun 1940. Selang beberapa tahun kemudian, Syadeli Hasan menjadi guru HIK Muhammadiyah Solo 1941-1943. Kemudian di angkat menjadi pengajar di sekolah tinggi Islam (UII) Yogyakarta (1945-1946), ADIA Jakarta (1960-1963),

Dekan Fakutas Syari'ah di IAIN Serang (1962-1979). Pada tahun 1979 beliau diangkat menjadi Guru Besar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati di Serang. Beliau pula tercatat sebagai anggota pendiri UII, UNISBA dan SMAN 1 Serang.

Ketika revolusi kemerdekaan, beliau memilih aktif sebagai tentara pelajar yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Paska kemerdekaan (1945-1959), sebagai pengejawantahan dari idealismenya di dunia politik, ia terjun menjadi anggota KNPI, wakil Ketua Badan Eksekutif Keresidenan Banten anggota Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Jawa Barat, anggota Dewan Keamanan Pertahanan Daerah Banten dan Konstituante (panitia Persiapan Konsitusi).

Di wilayah sosial kemasyarakatan, Syadeli Hasan di kenal sangat aktif dan penuh pengabdian. Di tengah- tengah kesibukannya sebagai ketua PB Pengurus Islam Al- Khairiyyah (1962-1980) berkeliling Banten, DKI, Jakarta, Lampung, Sum-Sel, Jambi, Syadeli Hasan tercatat sebagai anggota Dewa Kurator UNISBA, Akademi Ilmu Al- Qur'an Serang, dan menjadi Ketua MUI daerah Banten, ia juga turut menjadi anggota badan pendiri UII, UNISBA dan SMAN 1 Serang. PMI dan Pramuka masing-masing sebagai Pengurus dan anggota Majelis Pembimbing. Di kalangan para guru yang tergabung dalam PGRI Kab.Serang, Syadeli Hasan dikenal sebagai seorang anggota Dewan Penasehat (1976-1979).

Syibromalisi adalah murid K.H Syam'un yang berjasa besar dalam mempertahankan dan mengembangkan Madrasah

Al-Khairiyah. Lahir pada tahun 1908 dari keluarga sederhana. Ia adalah putra dari Ki Awi dan Nyi Rasmi yang tinggal di kampong Kelelet desa Warnasari Cilegon. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adik-adiknya bernama H. Halimi dan Misbach.

Pendidikan dasarnya di tempuh di kampung halamannya, Kelelet. Kemudian menginjak usia remaja, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Khairiyah dan lulus pada tahun 1937. Syibromalisi di kenal sangat menguasai ilmu-ilmu tata bahasa Arab dan ilmu Faraidh.

Di dalam struktur kepengurusan Perguruan Islam Al-Khairiyah Syibromalisi di percaya untuk mengurus masalah pendidikan. Baik kepengurusan di bawah Masriya Qasid Wasekh pada tahun 1943, maupun masa kepengurusan Syadeli Hasan pada tahun 1955, Syibromalisi selalu menjabat sebagai ketua seksi pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan putranya yang ke- 7, Muhammad Amin Syibromalisi, bahwa ayahnya tersebut bersifat sangat penyabar, sehingga kendatipun ada konflik internal di pengurusan madrasah tidak sampai menjadi runcing dan tumbuh perpecah. Beliau juga telah di ketahui telah hafal Al-Qur'an 30 juz. Tambah pula, selain ia menghasilkan karya berbahasa Arab, ia juga sering menggubah lagu-lagu yang berisi pujian-pujian kepada Rasulullah yang kemudian selalu di nyanyikan oleh para murid Al-Khairiyah ketika sebelum atau sesudah belajar mengajar di kelas ketika ada acara- acara peringatan hari-hari besar Islam.

Ketika masa-masa revolusi kemerdekaan, banyak guru-guru Al-Khairiyah yang menjadi pejabat pemerintah menjadi Camat atau Wedana di wilayah Keresidenan Banten. Syibromalisi, konon telah diberi amanat oleh K.H Syamu'un untuk tidak ikut mengangkat senjata dan diminta untuk fokus saja mengelola pendidikan Al- Kahiriyah.

Syibromalisi Awi wafat di Citangkil pada 24 Februari 1968 dalam usia 60 tahun. Ia di karuniai 12 anak dari hasil pernikahannya dengan Hajjah Sufro dari Kubangsawit. Berturut-turut mereka adalah anak perempuan (meninggal ketika masih kecil), K.H. Ahmad Syadeli, Drs. K.H M. Alisuf Sobri, K.H. Lettu (purnawirawan). Ahmad Suwidi, H. Ahmad Tahrir, Drs. K.H. Sa'adun Syibromalisi, K.H. M. Amin Syibromalisi, LML, Ubaidillah Syibromalisi, Dra. Hj. Badi'ah Syibromalisi, Eti Fatimah, M. Muhdi dan Abdul Muis Syibromalisi. Sebelum pernikahan dengan Hj. Sufro ini, Syibromalisi juga pernah menikah dengan Khodijah atau Kapol dari Jombang Cemara dan Hj. Faujiah dari kerenceng. Akan tetapi dari kedua pernikahan ini, Syibromalisi tidak memperoleh keturunan.

Karyanya yang sangat mengagumkan apabila diingat bahwa ia bukan lulusan Timur Tengah, adalah sebuah kitab kumpulan syair yang berjudul *Majmu'at al- Anasyid al-Muqarara bi 'I-madrasa al-Khairiyah Lijam'iyyat Nahdt al-Subban al-Muslim.* Kitab ini terdiri 30 bait syair yang menggugah para warga Al-Khairiyah untuk tidak hanya memotivasi untuk mengusai ilmu-ilmu dan mengajar Islam yang setinggi-tingginya, tetapi juga bagaimana dengan ilmu tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang

banyak. Syair-syair ini juga mengasah kepedulian para kadernya terhadap anak yatim, golongan miskin dan kaum yang tidak beruntung. Tidak kurang pentingnya, syair-syair ini menyulut para kadernya untuk cinta tanah air dan mengobarkan semangat patriotisme yang tinggi.

Abdul Aziz adalah adalah mantan Camat Cilegon yang sangat peduli terhadap keturunan K.H Wasyid dan perkembangan Al-Khairiyah. Nama asli tokoh ini adalah Kartawirana Bin Sarim. Beliau adalah putra seorang *ambetenaar* belanda. Oleh karena itu, di mata umumnya masyarakat waktu itu, Kaartawirana adalah keturunan Priyai yang secara sosial lebih disegani dan cukup berpengaruh. Namanya berubah setelah bergabung dengan K.H Syam'un untuk berjuang dalam bidang pendidikan menjadi K.H Abdul Aziz Kartawirana.

Ketika Kolonial Belanda melarang keturunan K.H. Wasyid untuk pulang ke kampung halamannya, Cilegon, Abdul Aziz yang berusaha membujuk Gubernur Jendral dan penasehat Urusan Pribumi saat itu masing- masing dijabat Graaf Van Linbrugh Stirum dan Gobee serta berani memberikan jaminan untuk tidak memberontak. Seperti tercatat dalam sejarah bahwa anak turunannya K.H Wayid tidak dibiarkan begitu saja bergerak leluasa melangkah. Pemerintah Kolonial Belanda selalu saja mengawasinya dengan ketat. Bahkan ketika

K.H Syam'un mendirikan Madrasah Al-Khairiyah Pemerintah Kolonial Belanda secara khusus mengutus Van der Plas untuk mengawasinya. Tidak berhenti sampai situ, pada masa Pemerintah Jepang mengutus tuan Hasan untuk memata-

matai dan melaporkan setiap yang dilakukan K.H. Syam'un. Dukungan Abdul Aziz terhadap K.H Syam'un tidak hanya berupa jaminan nyawanya yang di pertaruhkan agar K.H Syam'un diizinkan pulang ke kampung halamannya. Akan tetapi beliau secara aktif ikut mendirikan Madrasah Al-Khairiyah pada tanggal 5 Mei 1925.

Seperti diceritakan Putra K.H Syam'un, K.H Rahmatullah, bahwa K.H Syam'un tidak mampu baca- tulis huruf Latin. Akan tetapi Madrasah Al-Khairiyah sejak pendirian telah di masukan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnya. Oleh karena itu di perlukan orang lain yang telah mampu baca tulis latin yang telah melek organisasi modern. Orang tersebut tidak lain adalah Kartawirawan yang kemudian di kenal dengan K.H Abdul Aziz Kartawirawan. Lebih jauh lagi, Abdul Aziz Kartawirawan mempelopori Pendirian Koperasi Boemipoetra yang mendapat pengesahan resmi dari Pemerintah Belanda pada tanggal 20 Juni 1928 bertepatan dengan tanggal 8 Muharam tahun 1347 Hijriyah.

Di dalam *Satuten Kooperatie Oesaha Boemipoetra Tjitangkil* tercantum para pengurus (Lid *bestuur* koperasi sebagai berikut: K.H Abdul Aziz sebagai Presiden, K.H. Abdurrachim (sekertaris), K.H. Syam'un (Bendahara),

K.H Kasiman (anggota), K.H Aliuddin (anggota), K.H Safidudin (anggota) dan K.H. Sariman (anggota). Pengurus ini mempunyai masa kerja selama 25 tahun sejak tanggal disahkan. Dengan demikian, berdirinya Al- Khairiyah dengan digunakan sistem pendidikan modern dan masukannya ilmu-ilmu umum

dalam kurikulumnya semata-mata bukanlah sekedar karya K.H. Syam'un, melainkan hasil kerjasama dengan K.H. Abdul Aziz yang melek terhadap ilmu-ilmu umum dan sudah mengenal organisasi modern.

Al-Khairiyah telah berkontribusi terhadap masyarakat luas. Di masa-masa kemerdekaan Indonesia, di dalamnya Banten, tengah membutuhkan kelompok cendikia muda yang progresif dengan semangat heroik yang tinggi. Al-Khairiyah telah berhasil memenuhi kebutuhan tersebut.

# BAB III

## Memasuki Dunia Militer di Masa Pendudukan Jepang Tahun 1943-1945

Tidak banyak narasi sejarah yang dapat menggambarkan perjuangan heroik K.H. Syam'un selama masa pendudukan Belanda sampai tahun 1942. Seakan- akan masa-masa itu menjadi masa inkubasi bagi pemikirannya sebagai seorang ulama di dalam bilik-bilik pesantrennya yang kemudian tampil sebagai *daidancho* yang kharismatik di masa Jepang.

Setelah Jepang menduduki Banten dan melihat kaum muslim menjadi kekuatan perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menggerakan rakyatnya, Jepang melakukan pendekatan yang intens kepada kalangan muslim, terutama sekali kaum muslim dari kalangan tradisionalis. Pendirian Peta telah membuka jalan bagi

K.H. Syam'un untuk mendapat pendidikan militer yang akan ia jadikan senjata untuk menghantam balik kaum kolonial. Ia pun dipercaya sebagai seorang Daidancho, sebuah prestasi pribumi yang cukup gemilang di dalam sistem militer Jepang.

Jepang membuka gelanggang baru bagi sejarah heroisme di Banten. Masa ini berhasil memunculkan banyak tokoh-tokoh muda yang heroik dan menjadi pemain baru dalam sejarah Banten. Beberapa tokoh lama memang masih memainkan peran penting di masa itu.

Seperti K.H. Achmad Chatib, yang menjadi Residen Banten pertama dari kalangan pribumi, ia juga pelaku sejarah yang

sangat sentral di tahun 1926 di bawah masa Belanda. Jepang menganggap penting merekrut mereka untuk ikut di dalam barisan militernya sebelum berubah menjadi kekuatan penghalang yang lebih berat karena pengalaman-pengalaman

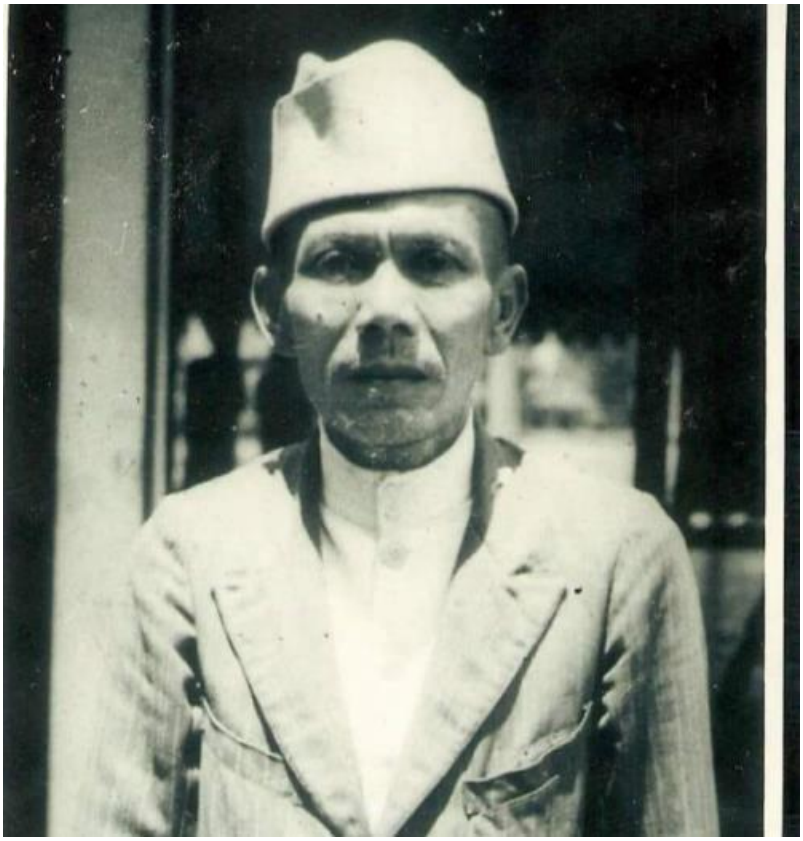

mereka yang terakumulasi.

Achmad Chatib, Resident Banten
(Sumber: Else Ensering, Banten in time revolution)

**Jepang Mendarat di Banten**

Setelah Jepang berhasil membekukan kekuatan-kekuatan Belanda di berbagai daerah luar Jawa sejak awal tahun 1942, Jepang mulai menargetkan penaklukan Batavia sebagai pusat kekuatan Belanda dan ibu kota Hindia Belanda. Berdasarkan pertimbangan strategis Banten dinilai daerah paling tepat untuk dijadikan jalan masuk menuju Batavia. Pada tanggal 1 Maret 1942 Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendaratkan pasukannya sebanyak 30.000 personil di teluk Banten dan mendarat di pantai sekitar Merak, Teluk Tasik Bojonegara, Carita dan Anyer (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 225; Yoesoef Efendi, ttt: 40).

Pasukan balatentara Dai Nippon yang baru mendarat.
(Foto: ww2australia.gov.au)

Dari Merak dan Bojonegara pasukan Jepang dibagi menjadi dua kekuatan koloni yang semuanya ditujukan mengepung Batavia dari dua arah Tangerang dan Bogor. Koloni pertama ditugaskan bergerak dengan rute Serang-Balaraja-Tangerang-Batavia; koloni kedua akan bergerak melalui jalur pedalaman dengan rute Serang-Rangkasbitung-Leuwiliang menuju Bogor. Tanggal

5 Maret 1942 Batavia berhasil dikuasai. Belanda yang sudah mundur satu hari sebelumnya harus berhadapan dengan perlawanan tentara Jepang yang tiba di Bogor karena Belanda telah memutuskan mundur ke Bandung melalui jalur Bogor-Sukabumi. Jepang berhasil mencerai berai kekuatan Belanda yang bertahan di Bogor (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 225).

Setelah Jepang menduduki semua daerah jajahan Belanda, mereka segera menyusun berbagai langkah politik strategis untuk menciptakan pemulihan keamanan dan ekonomi. Pemerintah Jepang merekrut rakyat Indonesia yang mau berkerjasama dengan Jepang, termasuk mereka yang pernah memangku jabatan di masa Belanda. Kolonel K. Matsui diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan wakilnya seorang pribumi R. Pandu Suryaningrat dan Atik Suardi sebagai pembantu Wakil Gubernur. Raden Hilman Djajadiningrat, seorang bangsawan Banten yang pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat untuk Keresidenan Banten, dipilih sebagai

Residen Banten (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 229; Nina Lubis, dkk., 2014:

238).

Dalam hal berhadapan dengan kaum muslimin, Jepang lebih bersikap terbuka dan mendekati kaum ulama, khususnya di daerah-daerah. Terbukti banyak tokoh ulama Banten yang direkrut Jepang untuk bergabung dalam segala usaha demi kepentingan Jepang dengan dalih kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh seperti K.H. Achmad Chatib dan K.H. Syam'un adalah contoh yang bisa kita sebut. Contoh lainnya, K.H. Abdul Fatah Hasan, seorang santri K.H. Syam'un dan kader pentingnya di Al-Khairiyah, terpilih aktif di pemerintahan. Sejak tahun 1942 sampai 1945 ia menjabat kedudukan sebagai anggota *Syuu Sangi Kai* atau Badan Keresidenan Banten. Waktu itu dewan ini beranggotakan beberapa tokoh penting di Banten K.H. Amin Jasuta, Syam'un Bakri, K.H. Ahmad Fatoni, Sutalaksana, Dr. Edi Sudewo dan lain-lain (Mufti Ali, dkk, 2015: 78).

**Pembentukan PETA**

Jepang sejak awal kedatangannya berupaya menarik simpatik rakyat Indonesia melalui propaganda Jepang akan memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda dan mempertahankan tanah air mereka dari rongrongan orang-orang Belanda dan Sekutu. Jepang mengeksploitasi rakyat Indonesia dengan berbagai cara semua dimaksudkan untuk

terwujudnya kepentingan Jepang. Pemerintah Jepang di Jawa sebenarnya mengerti betul kekuatannya yang lemah tidak mungkin dapat membendung serangan musuh-musuhnya baik itu Belanda atau Sekutu (Slamet Muljana, 2007: 8-9).

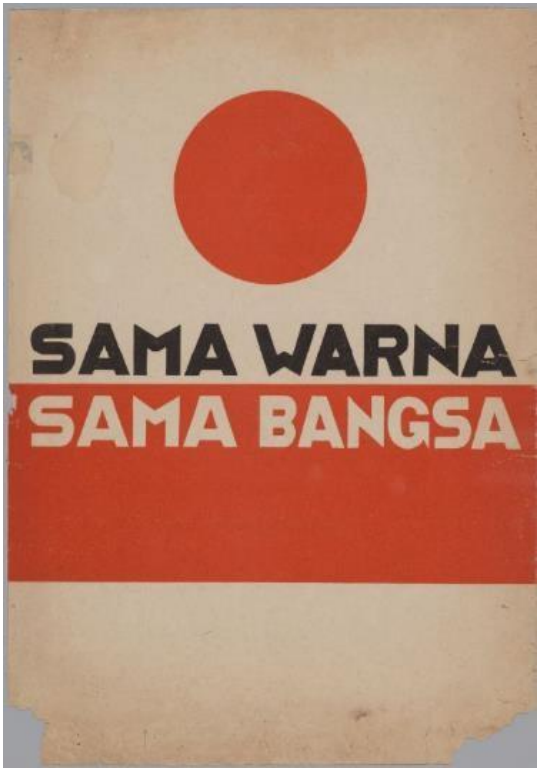


Propaganda Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia
(Sumber: nationaalarchief.nl)

Jepang mempropagandakan persaudaraan Asia Raya yang menghadapi musuh bersama, yaitu Sekutu juga Belanda. Sebuah propaganda yang cukup menggugah perasaan batin

rakyat Indonesia yang telah merasakan pahit berada di bawah kolonial Belanda, dan tentu saja negara-negara Eropa lainnya. Pada saat yang sama para pemimpin nasional mencari keuntungan dari propaganda Jepang untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya usulan para pemimpin nasional adalah mendirikan Peta, dengan narasi diplomasi bersama-sama rakyat Indonesia mempersiapkan kekuatan militer menghadapi ancaman Sekutu. Usulan ini pun diterima dan disetujui pemerintah Jepang.

Dalam bulan September atau Oktober 1943 pemerintah Jepang mendirikan Peta (Pembela Tanah Air) atas usul para Pemimpin Nasional. Kebijakan yang diterapkan di dalam pembinaan Peta membuka keuntungan besar bagi barisan nasional. Peta dipersenjatai senapan dan mendapat pelatihan militer biasa, yang terpenting adalah para pemimpin Nasional mendapatkan ruang yang cukup untuk membangun komunikasi bahkan mereka diberikan wewenang untuk menanamkan semangat Nasionalisme kepada para prajurit Peta (Slamet Muljana, 2007: 12). Suatu saat nanti Peta menjadi kekuatan militer untuk melawan Jepang.

Pengumuman ini pun disambut secara terbuka oleh para pemimpin Nasional dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Menurut narasi Slamet Muljana dua tokoh nasional yang memiliki peran penting di Peta adalah Soekarno dan Gatot Mangunpradja, keduanya adalah aktifis PNI yang menerima mandat dari Jepang untuk melakukan seleksi terhadap opsir-opsir Peta angkatan pertama (Slamet Muljana, 2007: 13).

Sebagai korps yang dimaksudkan sebagai pasukan gerilya, Peta merekrut para pejabat tradisional, para guru, para kiyai, dan orang-orang Indonesia yang pernah menjadi serdadu Belanda sebelumnya (M.C. Ricklefs, 2011: 308). Perhatian Jepang kepada kaum muslim lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi Jepang sendiri dukungan mereka akan memberikan pasokan tenaga untuk pertahanan dan tentu saja secara picik memperalat para pemimpin muslim menjadi kepanjangan tangan Jepang untuk meraup simpatik rakyat. Jepang mendorong para pemimpin muslim agar bergabung dengan mereka (Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht, 2011: 142). Peta salah satu wadah yang strategis bagi keterlibatan para pemimpin muslim terutama sekali di daerah-daerah.

Pendidikan Peta untuk angkatan pertama dilakukan di Jakarta. Dalam waktu singkat Soekarno dan Gatot mampu mengumpulkan pemuda-pemuda dari Jawa dan Madura. Kedua tokoh inilah kemudian yang berperan melakukan indoktrinasi kepada pemuda- pemuda Jawa-Madura. Tak kurang dari tiga ratus ribu pemuda yang bergabung dengan Peta sampai akhir 1944 (Slamet Muljan, 2007: 13). Pendidikan Peta kurang lebih berlangsung dua bulan terhitung dari bulan November 1943 sampai Desember 1943 (Mufti Ali, dkk., 2015: 115). Dalam tiga bulan tersebut para serdadu dibekali berbagai pelatihan militer, politik dan nasionalisme.

Peta dibagi menjadi tiga level Shudancho yang diisi para pemuda yang baru menyelesaikan sekolah dan belum memiliki pekerjaan, untuk sekedar menyebut ada tiga tokoh pemuda

terkemuka di Banten yang aktif sebagai Shudancho mereka adalah Ali Amangku, Umar Syarif dan Kamaruzaman (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 233-234), level di atasnya ada Chudancho yang diisi oleh anggota masyarakat yang memiliki kedudukan seperti guru, pegawai, pamong praja dan sebagainya; sedangkan Daidancho menempati level paling atas dalam barisan Peta mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki nama besar dan memiliki pengaruh luas di daerahnya, kebanyakan mereka adalah bangsawan dan para Kiayi. Para Daidancho asal Banten yang direkrut Jepang adalah K.H. Achmad Chotib, Entol Oyong, Uding Suriatmadja dan K.H. Syam'un, seorang tokoh Daidan yang akan banyak kita diskusikan di bawah mengingat perannya sebagai penjaga perbatasan maritim di perairan Anyer (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 234). Mereka dinilai lebih luwes dan dapat diajak kerjasama dibandingkan tokoh-tokoh lainnya yang lebih revolusioner.

**K.H. Syam'un menjadi Anggota PETA**

K.H. Sjamun pada masa pendudukan Jepang, menjadi anggota tentara Peta. Di sini beliau dididik prinsip-prinsip keterampilan dasar organisasi militer di lembaga Pendidikan di Bogor. Setelah selesai pendidikan di Bogor tahun 1943, ia diangkat menjadi *Daidanco* (komandan Batalion) di wilayah Serang. Hal ini dibuktikan adanya nama K.H Syam'un tercacat di lempengan tembaga di museum Peta di Bogor tahun 1943. Informasi mengenai K.H. Syam'un sebagai tentara Peta masa

pendudukan Jepang juga terdapat di koran *Asia Raja* no. 35 tahun ke 3. 1943. kemudian didukung pula berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Permana dengan Fatulllah Syam'un (2003), yang menyatakan bahwa K.H. Syam'un untuk masuk tentara Peta dibujuk langsung oleh Abdulhamid Ono utusan dari Jepang dengan alasan bahwa K.H. Syam'un mempunyai latar belakang pergerakan Islam.

Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Notosusanto, (1979: 14), bahwa sesuai tuntutan perang yang makin mendesak, pemerintah militer Jepang tidak saja membatasi diri pada pembentukan barisan pra militer, tetapi kemudian meluas dengan membentuk organisasi militer yang dikenal dengan nama tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA) atau *(Bo-ei Giyugun)*. Usulan itu datang dari R. Gatot Mangkupraja melalui suratnya yang ditujukan kepada *Gunseikan* (kepala pemerintahan militer) pada tanggal 7 September 1943 yang antara lain meminta supaya bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang tidak saja di belakang garis perang tetapi juga di medan perang. Pembentukan Peta merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam perkembangan politik Indonesia. Dikatakan sangat penting, karena di dalamnya umat Islam memegang peranan sejak dari pembentukannya. Setelah usulan pembentukan Peta oleh R. Gatot Mangkupraja kawan Soekarno, disetujui juga, maka pada akhir Oktober 1943, Jepang mengangkat para kyai sebagai *daidanco* dan *cudanco* (komandan batalyon dan komandan kompi).

Menjadi tentara Peta merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi K.H. Syam'un. Selama mengikuti pelatihan Peta, K.H. Syam'un meyakinkan bahwa orang Indonesia perlu memiliki keterampilan militer untuk menyongsong datangnya kemerdekaan. Bagi

K.H. Syam'un kesempatannya menjadi Tentara Pembela Tanah Air (Peta) merupakan jalan untuk mendidik dan menggembleng pribadinya dalam bidang kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang pada bulan Oktober 1943. Menurutnya bahwa:

*"Pendidikan ialah maoe membalas dendam sadja, pendidikan Islam sesoeai dengan kemiliteran. ini baik bagi pemoda-pemoeda kita. dan saja sering mentjeritakan pada mereka tentang penghidoepan dan perdjoeangan pahlawan-pahlawan Islam."* (lihat lampiran Sumber: Koran *Asia Raja*. no. 35 Tahun ke 3. 1943).

Dengan kata lain bahwa pendidikan kemiliteran sesuai dengan ajaran Islam yang baik sekali bagi pemuda- pemuda Indonesia dalam mempersiapkan diri dan mencetak kader pejuang. Penanaman nilai patriotisme oleh K.H. Syam'un pada santrinya bahwa untuk berperang memerlukan keberanian dan jiwa rela berkorban. Dimana nilai mati dalam perang sebagai kematian yang sangat mulia. Karena ulama dan santrinya memiliki kecintaan kehidupan tidak sebatas dunia, melainkan juga akhirat. Membela kemerdekaan bagi K.H. Syam'un dan santrinya sebagai kehormatan yang mulia, sekalipun gugur dalam perangnya.

Pada tanggal 8 Desember 1943 Pemerintah Jepang melantik kepala satuan-satuan Peta, termasuk di dalamnya para Daidancho di lapangan Gambir Jakarta. Setelah pelantikan tersebut K.H. Syam'un kembali ke Serang.

K.H. Syam'un menjabat Daidancho batalion III yang berkedudukan di Serang dengan pusat kekuatan militernya dipusatkan di Merak dan Anyer (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 234). Keberanian K.H. Syam'un sebagai Daidancho di Serang tercatat dalam fakta sejarah bahwa ia pernah ikut bertempur melawan tentara sekutu yang menggunakan kapal selam di pantai Bojong Anyer, tepatnya Anyer Kidul, yakni ketika diserang oleh tembakan-tembakan gencar yang berasal dari kapal selam Amerika dan tentara Sekutu (Permana, 2017: 60)

Pertempuran di Bojong ini mendapat perlawanan yang cukup berani dari prajurit K.H. Syam'un bahkan

K.H. Syam'un sendiripun ikut menembak dengan *jukikanju*. Penyerangan ini terjadi pada tanggal 30 Juni 1945, dimana pada saat itu, sekitar pukul 14.00 sore, datang rombongan tentara Jepang yang dipimpin oleh opsir yang berpangkat *Tai-i* (Letnan Satu) di wilayah Banten. Maksud kedatangannya adalah inspeksi pasukan, sekaligus memeriksa senjata. Tiba-tiba terlihat oleh mereka kapal selam Sekutu, tapi yang kelihatan hanyalah tiangnya saja sekitar setinggi setengah meter dari permukaan air, sedangkan bobot kapalnya tidak nampak. Opsir berpangkat *Tai-i* ini memerintahkan kepada *Cudanco* (komandan kompi) Samanhudi untuk menembaki kapal selam Sekutu, tetapi

perintah tersebut ditolaknya. Sampai kedua kalinya opsir itu memerintahkan Samanhudi untuk memberikan komando penembakan terhadap kapal selam Sekutu, tetapi tetap dotolak oleh *Cudanco* Samanhudi. *Cudanco* Samanhudi ini beralasan bahwa *Daidanco* K.H. Syam'un saja yang berhak memerintah sebagai Komandan Batalyonnya bukan opsir yang berpangkat *Tai-i* itu. Akhirnya opsir itu sendiri yang mengambil alih komando untuk menembaki kapal selam Sekutu. Peluru bermuntahan dari mulut *Jukikanju* (senapan mesin ringan), tetapi hasilnya nol. Kemudian *Cudanco* Samanhudi menyuruh *Tai-i* menghitung berapa peluru yang hilang. Ketika itu *Tai-i* tidak komentar apa-apa, menurut saja dan melaksanakan perintah sesudah itu ia pulang ke Serang (Permana, 2017:63).

Sepulang *Tai-i* itu, maka pada saat itu juga kira- kira pukul 04.00 sore *Daidanco* K.H. Syam'un untuk menanyakan kenapa ribut dengan *Tai-i* sebagai atasan. *Cudanco* Samanhudi menjawab yang berhak memerintah saya hanyalah *Daidanco* K.H. Syam'un sebagai pimpinan saya, orang lain tidak berhak memerintah saya. Walaupun setelah peristiwa kehadiran kapal selam Sekutu itu, tentara Peta *Dai san Daidan* (Batalyon III) yang dipimpin oleh *Daidanco* K.H. Syam'un bersiap-siap penuh, siang dan malam menjaga kemungkinan dari setiap ancaman terhadap pendaratan Sekutu. Pada tanggal 1 Juni 1945 sekitar pukul 02.00 malam, seluruh masyarakat di sekitar Anyer dikejutkan oleh suara tembakan dan dentuman meriam dan senapan mesin besar sehingga membuat panik masyarakat Anyer. Kemudian suara tembakan itu baru berhenti sekitar

pukul 04.00 malam. Pertempuran yang terjadi pada saat itu tidak menjadikan *Dai san Daidan* (Batalyon III) berubah pendiriannya dan tidak bergeser satu langkah pun, mereka tetap mempertahankan tempat itu. Karena kurangnya perlengkapan senjata, akhirnya *Dai san Daidan* (Batalyon III) tidak mampu memecahkan bobot kapal selam sekutu tersebut. Setelah pertempuran selesai, ternyata mercusuar banyak berlubang dan retak-retak terkena tembakan musuh. Satu prajurit mati dan dua prajurit luka-luka (Muhyidin, 1990: 31-32).

**Resistensi Pemuda Banten terhadap Jepang**

Pada akhirnya Jepang tidak dapat berlama-lama menikmati kekuasaannya di Indonesia, Amerika sudah berhasil mendaratkan kekuatan militernya di Australia. Sekutu sudah mendesak dari bagian Timur Indonesia, sedangkan Jepang belum berhasil memperoleh keuntungan material dari jajahannya di Indonesia. Jepang pun mendesak rakyat Indonesia – tentunya menggunakan lisan para pemimpin Nasional - untuk mengerahkan seluruh potensi rakyat, baik tenaga ataupun bahan pangan, untuk kepentingan Jepang yang sedang mengalami krisis.

Hubungan Jepang dengan umat Islam yang semasa awal-awal kedatangannya dengan propaganda yang memihak kepada kaum muslim, seketika berubah menjadi kebencian. Jepang menyadari dengan keterbatasan personel militer, mereka tidak dapat benar- benar melakukan pemulihan besar-besaran terhadap dampak peralihan pendudukan. Segera Jepang meminta para pemimpin Nasional mampu menyokong kekutan

Jepang dengan menyerahkan tenaga dan pangan yang dimiliki rakyat. Jepang dengan semangat fasismenya, merekrut para pemuda bahkan kaum terpelajar sekali pun, bergabung dengan militer Jepang utamanya Haiho untuk membantu militer Jepang, merekalah yang kemudian akan berdiri di garda paling depan di setiap pertempuran. Tidak saja itu, Jepang juga menuntut para pemimpin menyerahkan para lelaki dari rakyat Indonesia – utamanya di daerah-daerah – agar bergabung menjadi pekerja sukarela (*ramusha*). Sebelum kemudian para pemimpin menuntut pemerintah militer Jepang membentuk Peta.

*Ramusha* memiliki defenisi yang ambigu. Pemerintah Jepang menyempatkan ramusha sebagai tentara ekonomi yang dibentuk untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang akan melancarkan seluruh kegiatan militer, pemerintahan dan tentu saja perekonomian. Mereka berkerja secara sukarela. Namun pada prakteknya tidak jarang tentara Jepang memaksa seluruh pemuda bahkan dari kalangan pelajar untuk bergabung ke dalam ramusha. Para ramusha bekerja di bawah intimidasi militer yang kejam. Mereka diperlakukan bukan sebagai tentara, lebih sebagai tawanan yang sedang menjalani hukuman kerja paksa. Meski pada awalnya mereka direkrut sebagai tenaga kerja sukarela. Di Banten catatan sejarah ramusha terpenting ada di Bayah-Banten Selatan. Tambang terpenting di Bayah yang sudah bergerak sejak era kolonial Belanda, di bawah perusahaan swasta Belanda *NV. Mijnbouw Maatschappy Zuid Bantam (NV. MMZB)* sejak tahun 1939, adalah Tambang Cikotok dan

Cipicung (Iwan Herawan, 2017: 224). Tambang Cikotok diambil alih Jepang dan semua aktivitas pertambangan dihentikan, kecuali di lubang tambang Cirotan tetap berjalan untuk menambang timah hitam atau timbal yang merupakan bahan baku mesiu (Iwan Herawan, 2017: 224). Potensi bahan tambang lainnya yang dilirik Jepang untuk dieksploitasi adalah batu bara (Iwan Herawan, 2017: 225). Hasil tambang yang diperoleh digunakan untuk kepentingan perang dari mulai bahan bakar sampai bahan persenjataan.

Untuk mengelola urusan pertambangan pemerintah Jepang berkerja sama dengan Sumitomo mendirikan perusahaan pertambangan, yaitu *Bayah Kozan Sumitomo Kabusyiki Kaisya* atau *Mitsui Kosha Kabushiki Kaisya* atau masyarakat luas mengenalnya dengan nama *Bayah Kozan*. Tanggung jawab operasional perusahaan menjadi bagian Tentara Angkatan Darat ke-16 Jawa, sedangkan permodalan menjadi tanggung jawab Sumitomo (Iwan Herawan, 2017: 225). Berdasarkan catatan Tan Malaka di awal dibukanya penambangan Bayah ada 20.000 orang yang menjadi ramusha dan jumlahnya semakin menurun di akhir waktu menjelang Jepang meninggalkan Bayah menjadi 10.000 orang. Sementara untuk pembangunan jalur kereta api Malimping-Bayah ada 90.000 orang ramusha yang diturunkan. Menjelang akhir tahun 1943 ketika permintaan tenaga kerja semakin meningkat Jepang merekrut ramusha secara sitematik menekan seluruh kepada desa menyediakan tenaga ramusha. Bahkan tak jarang tentara Jepang menangkap para pemuda di jalan- jalan. Jepang

mempropagandakan slogan "Peningkatan produksi dan mobilisasi total," sebuah slogan yang sangat memaksa (Iwan Herawan, 2017: 230).

Nasib para ramusha sangat mengkhawatirkan mereka berkeja berat dengan peralatan seadanya dan asupan makan yang tidak layak. Banyak di antara mereka mati di tempat kerja, ada yang karena sakit, kelelahan, kelaparan sampai karena siksaan dan dibunuh tentara Jepang. Salah satu lokasi pemakaman massal yang bisa ditemukan di Bayah ada di kawasan Deker, Pulaumanuk yang memiliki luas hingga 38 Ha (Iwan Herawan, 2017: 231). Halwany Michrob menggambarkan sepanjang jalan Saketi-Bayah ditemui banyak mayat para ramusha tergeletak begitu saja di pinggir jalan, ditemukan juga di lokasi pembuatan lapangan kapal udara di Gorda, Cikande (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 236).

Kekejaman Jepang menyulut kemarahan rakyat dan menghilangkan kepercayaan kaum terpelajar, utamanya mereka dari kalangan pemuda yang progresif. Menjelang akhir tahun 1943 perlawanan di daerah-daerah mulai meletus. Di Caringin para Kiayi beserta para pemuka masyarakat merencanakan melawan, namun berhasil digagalkan oleh *kempetai*, mereka ditumpas secara kejam. Di Serang, Ce Mamat memobilisasi gerakan *Joyoboyo*. Kebanyakan anggotanya berasal dari buruh minyak dan perkebunan. Mereka mensabotase jalan-jalan kereta api antara Banjar dan Pangandaran. Pemerintah Jepang sangat terganggu dengan gerakan ini, dan di akhir tahun 1943 para pemimpin organisasi ini berhasil ditangkap. H. Sinting di

Kaujon-Serang, ditangkap dan ditembak mati. Ce Mamat pun tertangkap di Serang dan ditahan kempetai di Serang lalu dipindahkan ke Tanah Abang, Jakarta. Memasuki tahun 1944 banyak organisasi pemuda bermunculan yang sangat mengganggu. *Hizbullah, Sabilillah, Lasykar Wanita Indonesia, Barisan Pelopor, Barisan Banteng dan Barisan Indonesia Merdeka*. Ayip Dzuhri adalah salah satu tokoh pemuda terpenting di masa Jepang ia memimpin Barisan Pelopor cabang Serang, sekaligus menjadi anggota Barisan Indonesia Merdeka. Ketika Barisan Banten membuka cabang di Serang Ayip Dzuhri pun aktif di dalam organisasi ini, ia memimpinnya bersama dengan Abdulhadi. Barisan Banten dan Barisan Pelopor sebenarnya organisasi yang bergerak di bawah naungan pemerintah Jepang, tapi para aktifisnya memanfaatkan organisasi sebagai alat menghimpun kekuatan melawan Jepang. Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang bermarkas besarnya di Jalan Menteng, pun membuka cabang di Serang, Ali Amangku berkesempatan memimpin organisasi ini (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 239-240).

Else Ensering mencatat gerakan pemuda di Banten tidak lepas dari peran Tan Malaka – ia bersembunyi di Bayah dengan nama Pak Husein – Ce Mamat dan Ayip Dzuhri. Para pemuda kerap kali mengadakan pertemuan-pertemuan penting mempercepat kemerdekaan RI yang disebut-sebut oleh Tan Malaka, suatu kemerdekaan yang harus direbut dengan semangat merdeka seratus persen. Sebelum Tan Malaka mempropagandakan ide tersebut, pemuda-pemuda yang

terkoordinasikan dengan kelompok pemuda Menteng, telah lebih dulu siap merebut kemerdekaan. Bahkan mereka telah siap melakukan perang gerilya bilamana dibutuhkan (Else Ensering, 1995: 144).

Setelah peristiwa 1926, Tan Malaka diasingkan ke luar negeri. Dan baru kembali setelah Jepang menduduki negeri jajahan Belanda. Ketika ia kembali ke Indonesia, rupanya pemuda-pemuda eks-komunis masih mengidolakan sosoknya. Ia terhubung dengan Ce Mamat di Tangerang dan memilih tinggal di Bayah Banten Selatan. Di sanalah kemudian Tan Malaka menggerakan para pemuda untuk segera merebut kemerdekaan. Segala persiapan merebut kemerdekaan pun dimatangkan dengan seksama. Para pemuda terus memantau situasi politik di Jakarta. Ketika berita Sekutu menjatuhkan bom atom di Hirosima pada tanggal 6 Agustus 1945 menyusul tiga hari kemudian Nagasaki di bombardir kembali. (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 243). Pada tanggal 9 Agustus 1945, Tan Malaka mengkoordinir para pemuda untuk menyelenggarakan rapat tertutup di sebuah rumah seorang pemuda, Tahril, namanya, serang karyawan Gebeo, sebuah perusahaan elektronik Banten, Tan Malaka menyamarkan dirinya dengan nama Husin. Setelah pertemuan tersebut, para pemuda Banten mulai bergerak. Mereka menemui para daidancho Peta, K.H. Achmad Chatib, K.H. Syam'un dan Entol Teryana. Dengan maksud meminta dukungan militer kepada Peta, sewaktu-waktu apabila revolusi sosial terjadi melawan Jepang. Ayip Dzuhri, Abdurahman, Tahril dan Chasi'in adalah

para wakil pemuda yang menghadap para daidancho (Else Ensering, 1995: 145).

Pemerintah Jepang di Tokyo akhirnya mengumumkan kekalahnnya dan menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Satu hari kemudian tanggal 15 Agustus 1945 berita tersebut tersiar di Indonesia (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 243). Para pemuda pun memanfaatkan situasi ini sebelum sekutu berhasil mengambil alih tanah jajahan Jepang. Pemuda pun di bawah pimpinan Soekarni melakukan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan RI.

**Berita Proklamasi Tiba di Banten Kemerdekaan RI**

Tanggal 18 Agustus 1945 para komandan bataliyon di Banten diminta hadir pada saat pembubaran Peta di Bogor. K.H. Ahmad Chatib, Entol Teryana, K.H. Djunaedi, dan Samanhoedi seorang wakil dari K.H. Syam'un yang sedang sakit bersama-sama bertolak dari Banten ke Bogor. Pembubaran ini tetap dirahasiakan oleh Jepang. Jepang melihat Peta dan Haiho telah menjadi kekuatan militer yang kuat dalam saat kekuatan militer Jepang melemah akibat perang dahsyat dengan sekutu.

Mereka sangat khawatir akan terjadi pemberontakan militer yang dimobillisai Peta. Dengan dalih akan ada pergantian senjata baru, seluruh satuan Peta dilucuti, para prajurit diberi cuti panjang dengan membawa pesangon selama

tiga bulan dan beberapa bahan makanan pokok, mereka pulang ke kampung halaman (Mufti Ali, dkk, 20115: 123; Slamet Muljana, 2011: 49). Semua satuan Peta menyerahkan senjata pada tanggal 19 dan 20 Agustus 1945, kecuali satuan Peta di Malimping menolak menyerahkan senjata mereka, karena informasi pembubaran Peta sudah tercium sebelumnya. Setelah Entol Terjana kembali dari Bogor, para prajurit Peta ini baru mau menyerahkan senjata (Nina Lubis, dkk, 2014: 256; Slamet Muljana, 2011: 48). Ketika berita proklamasi mulai menyebar ke daerah-daerah, Peta – satu-satunya kekuatan militer Nasional yang diandalkan – tidak memiliki senjata, dengan begitu proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta di Jakarta tidak dapat mendorong lahirnya revolusi fisik yang berat. Meski begitu, di Jakarta di masa awal-awal proklamasi, sering diselenggarakan rapat-rapat terbuka – terutama di lapangan Maida – dengan ancaman militer Jepang yang masih kuat (Slamet Muljana, 2011: 48).

Berita proklamasi yang dibacakan Soekarno tidak langsung diterima rakyat di daerah-daerah. Berita tersebut baru sampai ke daerah sekitar tanggal 20 Agustus 1945. Chaerul Saleh mengutus empat pemuda Pandu Kartawinangun, Ibnu Parna, dan Abdul Muluk untuk berangkat ke berbagai daerah, sementara Chaerul Saleh sendiri datang ke Serang bertemu dengan Ali Amangku. Berita itu pun secara berantai sampai kepada para pemimpin Banten, K.H. Ahmad Chatib, K.H. Syam'un dan Suriakertalegawa (Else Ensering, 1995: 149; Nina Lubis, dkk. 2014: 255). Rakyat pun menyambut berita ini

dengan penuh suka cita. Setelah proklamasi dibacakan, sejak tanggal 18 Agustus 1945 PPKI secara estafet menyelenggarakan rapat-rapat yang berarti untuk mengisi proklamasi. Rencana Undang-Undang Dasar Negara, GBHN, pejabat Presiden-Wakil Presiden, bentuk pemerintahan dari tingkat pusat ke daerah, Dewan Pertimbangan Agung dan berbagai perangkat negara lainnya segera dipersiapkan (Slamet Muljana, 2011: 39- 48).

Pemerintahan daerah Banten dibentuk pada akhir Agustus 1945, setelah pemerintah pusat menetapkan pembagian daerah-daerah pada tanggal 19 Agustus 1945 (Slamet Muljana, 2011: 46). Banten saat itu mengalami kekosongan kepemimpinan. Para pemegang kepemimpinan bentukan Jepang, memilih meninggalkan Banten karena takut menjadi korban revolusi. Para tokoh Banten pun berkumpul di kediaman Dzulkarnaen Soeria Kartalegawa, seorang mantan dewan penasehat Keresidenan di era Jepang. Pada momen itu K.H. Syam'un turut menghadiri pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut diputuskan Dzulkarnaen Soeria Kartalegawa akan bertindak sebagai wakil masyarakat Banten untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang (Mufti Ali, dkk., 2015: 128).

**Jepang Menyerahkan Kekuasaan di Citangkil**

Berbagai upacara penyerahan dan migrasi para tentara Jepang segera digelar di berbagai daerah. Pada tanggal 22 Agustus 1945 bendera Jepang diturunkan di Serang. Banyak penduduk Jepang yang sudah meninggalkan Banten sebelumnya

dan berkumpul di Jakarta, mereka menghindari korban yang tidak berarti dari pihak Jepang, karena Serang sudah dipadati kerumunan rakyat Banten dari berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan pemuda. Sementara itu para pejabat pemerintahan dari kedua belah pihak menyelenggarakan pertemuan di Citangkil. Tokoh-tokoh penting Banten seperti yang sudah disebut di atas termasuk Raden Tirtasujatna, seorang residen yang dibentuk oleh pemerintah Republik. Raden Tirtasujatna dalam hal ini telah bertindak sebagai penerima mandat pemerintah pusat berdasarkan keputusan pemimpin Republik dalam pembentukan Kementerian dan Provinsi pada tanggal 19 Agustus 1945 untuk menggelar serah terima kekuasaan. Di dalam pertemuan tersebut, diselenggarakanlah penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Republik yang diwakili oleh para pemimpin Banten (Else Ensering, 1995: 149; Nina Lubis, dkk, 2014: 256, 258).

Semua orang bisa menangkap ada semangat politik primordialisme yang kuat dan tengah memanas. Wacana politik perlunya sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang non-kolonial dan pemimpin pribumi segera menguat di ruang-ruang publik saat itu. Menangkap ada kemungkinan terjadinya revolusi fisik di Banten untuk menyisihkan para penguasa non Banten dan eks kolonial, telah menempatkan Raden Tirtasujatna dalam perasaan terancam. Secara diam-diam ia pun meninggalkan Banten bersama sanak familinya pergi ke Bogor kota asalnya (Nina Lubis, dkk, 2014: 258).

Tentu saja kaum muda telah mendapatkan momentum yang tepat membentuk suatu pemerintahan yang primordialis, Banten harus dipimpin oleh para pemimpin pribumi. Angkatan Pemuda Indonesia (API) menyelenggarakan rapat umum di Serang pada awal bulan September 1945. Dalam pertemuan tersebut beberapa pemimpin Banten dihadirkan untuk membuat beberapa kesepakatan bersama. Di antara para pemimpin Banten yang hadir adalah K.H. Ahmad Chatib bertindak sebagai tokoh penjamin keamanan, Suriakertalegawa mewakili penguasa Jepang, dan Ali Amangku pimpinan API yang melakukan kontak langsung dengan para pemuda dan organisasi perjuangan (Else Ensering, 1995: 150).

Di dalam pertemuan itu semua unsur rakyat dan pemuda Banten mengangkat K.H. Ahmad Chatib menjadi Residen Banten. Suatu kedudukan yang belum mendapat formalitas dari pemerintah pusat. Ia mendapat mandat untuk memimpin kekuatan rakyat Banten. Sekaligus menjadi orang Banten pertama yang menduduki jabatan Residen (Else Ensering, 1995: 150), setelah dan sebelumnya, Banten dipimpin oleh unsur- unsur luar, termasuk Residen yang ditunjuk oleh pemerintah pusat setelah serah terima kekuasaan antara pemerintah Jepang dan Republik. Sedangkan K.H. Syam'un ditunjuk sebagai pemimpin kekuatan militer Banten (Else Ensering, 1995: 150). Untuk mengisi kekosongan jabatan Residen K.H. Ahmad Chatib diangkat sebagai Residen pada tanggal 19 September 1945. Suria Kertalegawa, semula menjabat Residen, sekarang ditunjuk menjadi Asisten Residen,

dan beberapa Bupati pun ditetapkan dalam ketetapan pemerintah pusat ini. Di antara tokoh yang ditunjuk menjabat kedudukan Bupati adalah Raden Hilman Djajadiningrat sebagai Bupati Serang, Raden Djumhana Bupati Pandeglang, Raden Hardiwinangun Bupati Lebak, mereka semua diarahkan meneruskan tugas dan pekerjaan di masing- masing daerahnya agar mampu menjamin dan mempertahankan kemerdekaan di seluruh wilayah. Untuk melengkapi struktur pemerintahan, pemerintah Republik membentuk Komite Nasional Indonesia yang ditempatkan dari tingkat kabupaten sampai pusat. Ce Mamat adalah Ketua KNI Kabupaten Serang, Raden Djajarukmana Ketua KNI Lebak dan Muhamad Ali KNI Pandeglang. Dalam waktu singkat K.H. Syam'un mendapat tugas membentuk Badan Keamanan Rakyat lokal yang melibatkan para pemuda dan eks-Peta, termasuk API digabungkan ke dalam satuan BKR (Else Ensering, 1995: 150).

**Pembentukan Badan Keamanan Rakyat**

Badan Keamanan Rakyat dicetuskan dari pikiran Soekarno. Pada tanggal 23 Agustus 1945 ia menyeru – melalui pidatonya– kepada para mantan prajurit Peta, Haiho, pelaut dan para pemuda untuk bergabung dengan BKR. BKR sendiri merupakan embrio untuk TNI yang dalam bahasa Soekarno disebut Tentara Kebangsaan Indonesia. Melalui seruan tersebut dibentuklah BKR dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Di samping untuk maksud menjaga keamanan rakyat, satuan ini juga dimaksudkan menjadi bagian dari badan penolong korban

perang. BKR tidak memiliki pimpinan sentral, sehingga mereka bergerak sesuai dengan selera mereka masing-masing (Slamet Muljana, 2011: 50). Dengan sifat begitu BKR di tingkat daerah dapat bekerja dengan bebas, hal ini memicu lahirnya konflik fisik di tingkat daerah- daerah. Mereka tidak memiliki persenjataan yang lengkap setelah Jepang melucuti persenjataan Peta. Untuk memperoleh persenjataan, mereka harus melucuti tentara Jepang. Di berbagai daerah meletus peperangan kecil yang justru dimenangkan oleh BKR. Dalam konteks ini Slamet Muljana berkomentar, Jepang sebenarnya tidak serius menghadapi tekanan dari BKR, hanya sekedar untuk mengalihkan perhatian sekutu dan terhindar dari tudingan Jepang mendukung Indonesia (Slamet Muljana, 2011: 51).

Ateng Djauhari, seorang utusan BKR pusat datang ke Serang bersama Harsono, seorang mantan *Yugekitai*, untuk menemui para bekas daidancho Peta agar segera membentuk BKR Banten yang tersebar sampai tingkat kabupaten. Keduanya bertemu dengan Entol Terjana di Serang dan membicarakan perihal pembentukan BKR Banten. Tapi Entol Terjana merekomendasikan K.H. Syam'un sebagai orang yang tepat untuk membentuk BKR dan memimpinnya. K.H. Syam'un pun bergerak dibantu Harsono, Soekarahardja, dan H. Makmur menyelenggarakan rapat pembentukan BKR di markas API. Dari rapat inilah terbentuk BKR Banten sampai ke daerah-daerah kabupaten (Mufti Ali, dkk., 2015: 131).

**K.H. Syam'un Menjadi Komandan BKR**

Salah satu tugas berat yang telah berhasil diemban dengan baik oleh KH Syam'un sebagai komandan BKR Banten adalah penyerbuan ke markas *kenpeitai* Jepang di Serang dan pengambilalihan senjata di lapangan udara Gorda. Beberapa minggu setelah kemerdekaan, utusan dari Ketua BKR pusat, dengan mengikuti arahan dari Entol Ternaja, seorang bekas *Daidan* Banten dan beberapa tokoh lain, datang menemui KH Syam'un yang diminta untuk segera membentuk pengurus BKR Banten. Setelah terbentuk pengurus BKR melalui rapat yang berlangsung tanggal 10 September 1945, banyak tugas-tugas berat yang harus segera diemban oleh Kolonel KH Syam'un, yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua BKR Banten, satu diantaranya memimpin perundingan dengan *kenpetai* agar menyerahkan senjatanya kepada BKR. Jepang membatalkan perundingan tersebut, akibat insiden tewasnya beberapa prajurit Jepang yang diserang oleh masyarakat di Warung Gunung, Lebak, ketika dalam perjalanan menuju Serang. Persuasi dengan jalan damai untuk mengambil alih senjata dari *kenpeitai* tidak berhasil, opsi selanjutnya adalah meminta paksa dari Jepang dengan menyerang markas mereka di Kota Serang. Setelah disepakati oleh KH. Syam'un, KH Tb. Ahmad Khatib, Ali Amangku dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Banten (ulama, jawara, pemuda, para pimpinan laskar) maka diputuskan untuk menyerbu markas *kenpeitai* pada Kamis tanggal 11 Oktober 1945 jam 5 pagi. Dimulai dengan pemadaman listrik dan evakuasi penduduk yang bertempat tinggal di sekitar alun- alun, pertempuran hebat

dimulai. (Berita Indonesia, 16 Oktober 1945). Setelah Jepang meninggalkan Banten, atas perintah Komandemen I/Jawa Barat pada tanggal 18 Oktober 1945 diadakan pertemuan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk Keresidenan Banten. Pertemuan tersebut berhasil membentuk Divisi I TKR yang diberi nama Divisi 1000/I yang ada di bawah Komandemen I/Jawa Barat. Secara aklamasi KH Syam'un diangkat sebagai Panglima Divisi dengan pangkat kolonel.

Susunan pimpinan Divisi 1000/I adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Panglima | : Kolonel KH Syam'un |
| Ajudan | : Mayor Soekarahardja |
| Kepala Staf | : Letnan Kolonel Soetalaksana |
| Kepala Bagian Penyelidik | : Mayor Tb. Salim Setiadinata |
| Kepala Bagian Siasat | : Mayor Tb. Samsoedin Noer |
| Kepala Bagian Organisasi | : Mayor Koesendidjaja |
| Kepala Bagian Perbekalan | : Mayor Hamdani |
| Komandan Detasemen/Batalyon Pengintai | : Mayor Ali Amangku |

(Suharto, 2001: 104)

Setelah pembentukan Divisi 1000/I dibentuklah slagorde organik di bawahnya. Divisi 1000/I terdiri dari dua resimen, yaitu Resimen I berkedudukan di Serang yang dipimpin oleh Letnan Kolonel KH Djoenaedi dan Resimen II yang berkedudukan di Rangkasbitung yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Agoes Djajaroekmantara. Selain Resimen I dan Resimen II, Divisi 1000/I mempunyai Batalyon Pengintai yang bermarkas di Sumurpecung dan langsung berada di bawah

komando Panglima Divisi 1000/I. Batalyon yang dikomandani oleh Mayor Ali Amangku ini memiliki tiga kompi, yaitu kompi I atau Kompi Markas yang berkedudukan di Serang yang dikomandani oleh Kapten Iski, Kompi II yang dikomandani oleh Kapten Oemar Sari bermarkas di Pandeglang, dan Kompi III yang dikomandani oleh Kapten Rd. Ahmad Moedjimi bermarkas di Rangkasbitung (Surat Mayor Soekarahardja kepada Ketua Yayasan Peta, 6 April 1982, lamp. II; Arsip Disjarah AD, Koleksi Dokumen Badan Perjuangan JABAR 1945-1946, no. inventaris 15; Siliwangi dari Masa ke Masa, 1979: 31- 2; Soeharto, 2001: 105)

**Orang-orang Jepang Meninggalkan Banten dan Beberapa Pertempuran Singkat**

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Jepang baru secara terbuka mengumumkan kekalahan mereka dalam perang melawan sekutu (Ricklefs, 2011: 320). Jepang lebih suka membiarkan rakyat Indonesia memilih nasibnya sendiri. Sebagai bagian dari proses pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke tangan pemerintah Republik Indonesia di Banten, K.H. Ahmad Chatib dan bersama-sama K.H. Syam'un meminta *Keinpetai* (Polisi Militer) di Serang menyerahkan seluruh kelengkapan militer mereka kepada BKR. Kesepakatan diantara pemerintah Jepang dan pemerintah Banten pun dibuat. Keinpetai menyerahkan seluruh perlengkapan militer Jepang kepada BKR dan sebagai imbalannya, Jepang meminta jaminan keamanan dari BKR dalam proses pengosongan wilayah Banten

dari pendudukan Jepang, yang direncanakan, mereka semua akan bertolak ke Jakarta dari lapangan Gorda. Ali Amangku bekerja menyebarkan informasi kepada seluruh lapisan rakyat Banten untuk ikut menjamin keselamatan orang-orang Jepang yang akan migrasi ke Jakarta dan kembali ke tanah air mereka dengan dalih bahwa ini adalah hasil kesepakatan para Kiayi dan Jepang (Else Ensering, 1995: 150; Mufti Ali, dkk. 2015: 133).

Ambisi Jepang menguasai Indonesia masih belum padam. Revolusi fisik pun meletus di berbagai daerah dan kota-kota besar. Indonesia sebenarnya tengah benar-benar berada di dalam kekacauan. Sekutu sudah mulai masuk dari arah timur, tentara Inggris sudah mulai masuk ke Jawa pada bulan Oktober. Militer Jepang masih berharap mendapatkan keberuntungannya kembali mendudukan kekuasaannya di Indonesia. Pada bulan Oktober itulah segera terebar rencana menghentikan arus revolusi secara rahasia. *Kenpetai* melakukan pembantaian terhadap kaum muda di Pekalongan tanggal 3 Oktober, dan pada tanggal

10 Oktober mereka sudah mendesak menduduki Bandung (Ricklefs, 2011: 324).

Dalam proses pemulangan militer Jepang, terjadi insiden yang dipicu oleh kompi militer Jepang dari Sajira yang tidak mau menyatakan menyerah. Mereka tiba di Gorda dan berangkat menuju Serang dengan perlengkapan senjata. Insiden berdarah pun tidak bisa dihindarkan terjadi di Warung-gunung. Konvoi mobil tentara Jepang menuju Serang dihadang oleh rakyat yang bersatu dengan BKR. BKR berhasil merebut satu

mobil pengangkut persenjataan dan empat orang tentara dari pihak Jepang tewas dalam insiden ini. Beritanya sampai ke tangan Kenpetaei di Serang, mereka pun menarik diri dan melanggar persepakatan sebelumnya. Dengan kekuatan yang mulai lemah di bawah tekanan yang lebih tinggi dari pada sisa kekuatan mereka, sebenarnya, tentara Jepang pun membuat barikade dan melakukan perlawanan dengan senapan mesin yang masih di tangan mereka. Perang pun pecah di antara militer Jepang dengan BKR Markas mereka pun dikepung dari segala penjuru. Pemuda, rakyat, kiayi dan para camat di sekitar Serang didatangkan ke ibu kota untuk mempersempit ruang gerak tentara Jepang dan memberi tekanan psikis yang menakutkan. Penyerbuan secara terbuka ke markas *Keinpetei* dilakukan pukul 9 Oktober pukul 04.30 dengan kode rahasia yang hanya dipahami antar mereka saja. Serangan terbuka ini belum bisa mendatangkan hasil, Jepang membalas serangan rakyat dengan senapan mesin, beberapa orang dari barisan rakyat Banten tewas tertembak. Keesokan harinya laskar rakyat yang dipimpin oleh Haji Muhamin, Ma'mun dan Nawi tiba memperkuat barisan pemuda. Pertempuran kembali meletus antara pukul 07.00 sampai 08.00 di markas Jepang. Hari berikutnya, Jepang menyerah, suasana berubah, kegembiraan dan keharuan pecah di pusat kota Serang, para pemuda menangis setelah pertempuran berhari-hari yang penuh ketegangan (Else Ensering, 1995: 151).

# BAB IV

## Mempertahankan Kemerdekaan di Tengah Kemelut Politik

Sampai bulan Oktober-November Indonesia masih terus bergejolak, dan rupanya bulan November menjadi puncak gejolak. Hampir tidak ada kepercayaan antar sesama yang benar-benar dapat dipercaya. Siapa pun dapat dicurigai sebagai musuh, siapa pun bisa dicurigai sebagai kaki tangan penjajah. Kekacauan-kakacauan terjadi di beberapa daerah di Indonesia setelah para pemuda dan seluruh rakyat mengetahui secara terbuka proklamasi kemerdekaan.

Kemenangan sekutu dalam perang Asia-Pasifik berdampak langsung terhadap kesetabilan keamanan di Indonesia yang baru saja memproklamirkan diri sebagai negara baru. Amerika yang menjatuhkan bom atom di pulau-pulau Jepang telah mendesak Jepang segerah menyerah kepada sekutu. Inggris yang dalam pembagian wilayah yang disepakati di antara negara-negara sekutu akan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang dan segera mendaratkan pasukannya di Indonesia. Antara bulan September dan pertengahan Oktober, tentara Australia telah masuk ke Indonesia dan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang di wilayah bagian Timur Indonesia. Inggris menduduki Jawa dan Sumatra. Tentara Australia menangkap siapa saja yang pro-republik, dan dalam keadaan terancam, raja-raja di wilayah Sulawesi Selatan yang pro-Republik, dengan berat hati, harus menerima pendudukan Australia. Di pertengahan September tentara Inggris sudah berhasil masuk Jawa melalui Jakarta yang di kemudian hari

menyusul menduduki jawa bagian tengah dan timur dan beberapa wilayah di Sumatra. Letjend Sir Philip Cristison seorang Panglima Inggris menerima tugas untuk menundukan Indonesia. Belanda sangat berharap dapat memanfaatkan situasi ini untuk menduduki kembali negeri jajahannya. Mereka telah membonceng tentara sekutu bahkan sebagian ada yang diselundupkan melalui jalur lain, khususnya Palang Merah Internasional (M.C. Ricklefs, 2011: 324; Slamet Muljana, 2011: 54-55).

Nasib Jepang menjadi tidak menentu, militer Jepang masih berharap dapat menduduki dan mendapatkan kekuasaan mereka di beberapa kota Besar dengan memanfaatkan legitimasi sekutu. Mereka bergerak atas nama sekutu dalm mulai mendesak orang-orang Republik mengosongkan beberapa kota besar seperti Bandung, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Magelang dan lain-lainnya, kecuali Banten yang masih tersisa di wilayah ujung barat pulau Jawa (Ricklefs, 2011: 324-325). Di luar sepengetahuan Jepang, Hebertus van Mook, seorang Wakil Gubernur Jenderal Belanda yang melarikan diri ke Australia saat Jepang merebut kekuasaan atas Indonesia, telah mengirim surat rahasia kepada Louis Mounbatten di Singapura, seorang Panglima tertinggi tentara Inggris di Asia Tenggara, van Mook berusaha meyakinkan Mounbatten, bahwa para para pemimpin Republik beserta pendukungnya adalah antek-antek Jepang yang telah menerima kemerdekaan yang dihadiahkan Jepang. Inggris tidak mengetahui banyak apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia yang baru merdeka itu, Louis Mounbatten pun

menelan mentah-mentah informasi yang kabarkan oleh van Mook agar tidak mengakui kemerdekaan Indonesia (Slamet Muljana, 2011: 54).

Ketika kapal induk sekutu mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945, terlihat tentara- tentara Belanda ikut serta dalam konvoi. BKR dan para pemuda mencurigai ada maksud Belanda kembali mencengkeramkan kukunya kembali di tanah Indonesia. Setelah itu bentrokan antara BKR bersama pemuda pejuang dengan Belanda dan sekutu pun kerap kali terjadi. Jakarta menjadi kota yang tidak aman lagi, seiring semakin meningkatnya jumlah prajurit Belanda yang membentuk satuan KNIL, bentrokan pun lebih sering terjadi di jalan-jalan perkampungan dan perkotaan. Bahkan pihak Belanda tidak segan-segan melakukan teror terhadap para pemimpin Indonesia. Kendaraan Sutan Sjahrir, Mr. Roem, dan Mr. Amir Syarifudin kerap kali menerima penembakan dari penembak gelap yang disinyalir dari satuan KNIL. Pemerintah Indonesia melihat perlu ada penguatan terhadap ketentaraan di tubuh BKR, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, BKR belum memiliki sistem kerja yang terkoordinir secara sistematis. Untuk kepentingan tersebut pemerintah mengeluarkan Dekrit membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945 (Slamet Muljana, 2011: 55). Satuan tentara yang disebut-sebut Sukarno dengan istilah Tentara Kebangsaan Indonesia.

Jakarta semakin mencekam, tentara Belanda, sekutu dan TKR beserta para pemuda pejuang terlibat adu teror, kerusuhan

di mana-mana. Lambat laun kerusuhan pun menyebar ke daerah-daerah di luar Jakarta. Menanggapi kondisi yang tidak aman, Sukarno dan Hatta bersama beberapa petinggi negara diungsikan ke Yogyakarta secara diam-diam pada tanggal 4 Januari 1946, dan Jakarta dikosongkan oleh pemerintah, tidak ada lagi aktifitas kepemerintahan di sana. Belanda justru mendapat angin segar, setidaknya mereka berpikir telah berhasil satu langkah menduduki kota yang dulu pernah mereka miliki dengan nama Batavia. Segera militer Belanda mendirikan *Natherlands Indies Civil Adminitration* atau NICA (Slamet Muljana, 2011: 55). NICA memburu para perusuh dan mendesak mereka ke daerah-daerah di luar Jakarta.

Mereka menjadikan Bandung sebagai target dan memerintahkan TKR dan para pejuang mengkosongkan Bandung, kota tempat dulu mereka menyerahkan Hindia Belanda kepada Jepang. Pertempuran-pertempuran antara Inggris yang dimanfaatkan dengan baik oleh NICA melawan tentara Indonesia yang paling hebat terjadi di Surabaya pada bulan November dan di Bandung pada bulan berikutnya. Inggris memanfaatkan tentara Jepang yang dipersenjatai kembali yang menyimpan harapan yang tidak jauh beda dengan Belanda, dapat kembali menduduki Indonesia (Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht, 2011: 153).

Sebagian pejuang di Jakarta terdesak dan melarikan diri ke Tangerang. Dengan alasan mengejar para perusuh yang lari dari Jakarta, tentara NICA menduduki Tangerang. NICA mengeluarkan ultimatum agar Tangerang dikosongkan. Tentara

Indonesia harus mundur empat kilometer sampa sebelah barat Cisadane. Tentara Indonesia pun atas perintah komandan Divisi II Tangerang meninggalkan Tangerang, pemerintahan sipil pun ikut mundur dan menetapkan Balaraja sebagai ibu kota Tangerang. Tangerang pun berhasil dikuasai NICA (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudari, 2011: 291).

Melihat tentara Indonesia mundur ke Balaraja, rakyat di Tangerang membentuk satuan Laskar Rakyat. Mereka menciptakan kegaduhan dan perlawanan terhadap NICA seadanya dengan kelengkapan yang tidak sebanding. Perlawanan rakyat Tangerang ini dipimpin oleh K.H. Ibrahim dari Sampeureum-Maja, K.H. Harun dari Tenjo, dan Jaro Tiking (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 291). Dengan kekuatan yang tidak seimbang gerakan Laskar Rakyat ini berhasil ditumpas dalam pertempuran yang ringan di Serpong, ada 189 orang dari Laskar Rakyat yang mati dan dikuburkan secara massal di Serpong, di kemudian hari tempat ini dikenal dengan nama "Makam Pahlawan Seribu" (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 291-292). NICA kemudian mengancam Banten setelah berhasil merebut Tangerang.

### Tentara Keamanan Rakyat di Banten, K.H. Syam'un Menjabat Panglima

Pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat sebagai bentuk mematangkan BKR. Semua anggota BKR lebur ke dalam TKR yang dipimpin oleh

Supriyadi. Sayangnya Supriyadi tidak dapat memimpin TKR, bahkan tidak pernah muncul, setelah aksinya menggerakan Peta Blitar memberontak kepada Jepang, lalu dikabarkan ia menghilang hingga Februari 1945. Para komandan melaksanakan rapat penting di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945. Dalam rapat itu pun akhirnya diputuskan Soedirman sebagai pimpian pusat. Bersamaan dengan penetapan pimpinan TKR, dibentuk juga divisi-divisi di tingkat daerah. Slamet Muljana menyebut secara eksplisit, K.H. Syam'un sebagai pejabat TKR divisi I yang membawahi daerah Bogor- Banten dan berkedudukan di Serang (Slamet Muljana, 2011: 51).

Sementara itu di Banten TKR baru dibentuk pada tanggal 18 Oktober 1945 atas perintah Mayor Jenderal Didi Kartasasmita panglima Komandemen I/Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut dibentuklah Divisi 1000/I di bawah pimpinan panglima K.H. Syam'un yang berpangkat kolonel. Divisi I ini memiliki dua resimen yang bertanggung jawab menjaga keamanan seluruh wilayah Banten baik di wilayah pedalaman atau di wilayah kota dan pantai. Resimen I yang berkedudukan di Serang dipimpin oleh Letkol. K.H. Djoenaedi yang memiliki tiga bataliyon, satu bataliyon ditempatkan di Serang dengan komandannya Mayor K.H. Abdullah. Bataliyon duanya ditempatkan di Cilegon di bawah pimpinan Mayor Samanhudi. Bataliyon tiga ditempatkan di Serang yang dipimpin oleh Mayor Tb. Samsudin Nur (Mufti Ali, dkk., 2015: 138).

Resimen II yang berkedudukan di Rangkasbitung memiliki tiga bataliyon, seperti resimen di Serang. Bataliyon I yang bermarkas di Rangkasbitung dipimpin Mayor Dudung Padmasukarta. Sedangkan bataliyon II dipimpin oleh Mayor Jatmika dan Mayor Suleman memimpin Bataliyon III (Mufti Ali, dkk, 2015: 138). Kekuatan militer di Serang nampaknya memiliki personel yang lebih lengkap guna memperkuat pertahanan kota. Resimen satu dilengkapi satu bataliyon pengintai yang bermarkas di Sumurpecung yang jalur struktur kerjanya langsung di bawah komando panglima Divisi I, K.H. Syam'un. Bataliyon pengintai ini dipimpin oleh Ali Amangku yang diberi kekuatan tiga kompi pasukan yang disebar di tiga daerah, satu kompi di Serang dua kompi lainnya di Pandeglang dan di Rangkasbitung (Mufti Ali, dkk., 2015: 139).

Kekuatan militer yang dimiliki K.H. Syam'un terhitung memiliki loyalitas yang kuat. Kekuatan TKR Banten telah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di dalam situasi politik dan keamanan yang tidak menentu baik kekacauan dari dalam atau tekanan- tekanan militer sekutu dan Belanda. Hanya berjarak kurang lebih satu bulan dari pembentukan TKR di Banten, kabar dari Jakarta segera diterima oleh para pemimpin Banten, sekutu di bulan Januari 1946 sudah mendesak ke Tangerang dan pertahanan TKR di Jakarta sudah mundur ke Balaraja. K.H. Syam'un dengan kekuatan ekstra harus sudah siap membendung tekanan militer sekutu dan Belanda.

**Pertempuran Kebayoran Oktober 1945**

Tugas berat sudah menanti KH Syam'un begitu diputuskan dalam rapat pembentukan TKR bahwa KH Syam'un ditunjuk untuk menjadi panglima Divisi 1000/1 dengan pangkat kolonel. Salah satu tugasnya adalah membantu para pejuang Republik dari Bogor dan Tangerang untuk menghancurkan konsentrasi pasukan NICA di wilayah Kebayoran. KH Syam'un pun mengutus tentara reguler pertama di bawah pimpinan Mayor Supa'at yang juga dibantu oleh 160 personil TKR dari wilayah Warung Gunung Lebak. Pasukan TKR Banten ini bertolak menuju Kebayoran untuk turut membantu TKR wilayah Tangerang, Bogor, dan Jakarta untuk menyerbu markas NICA dan melemahkan kekuatan moril mereka di wilayah perbatasan. Disebutkan bahwa dalam pertempuran tersebut banyak tentara NICA yang berhasil dibunuh dan markas mereka porak-poranda. Sementara dari pihak republik, satu orang tewas dan dua orang luka- luka akibat kena serangan mitraliur yang diarahkan dari tangsi mereka. Pertempuran sengit terjadi, dimana ribuan pasukan TKR dibantu oleh ribuan relawan dengan senjata senapan, golok, klewang dan tombak menghancurkan markas NICA di Kebayoran, yang menjadi tempat jaga dari 400 lebih tentara NICA. Kesulitan yang dihadapi pasukan Republik antara lain adalah NICA menggunakan perlindungan sipil dengan memasuki rumah-rumah penduduk agar dapat menghindari

serbuan dari pasukan republik (Berita Indonesia, 30 Oktober 1945)[1].

Pertempuran sengit yang berlangsung pada tanggal22-23 Oktober 1945 tersebut membuat puluhan tentara NICA meninggal. Sementara dipihak Republik, satu orang tewas dan dua orang terluka. Satu orang yang meninggal tersebut diberitakan adalah seorang kepala stasiun Parung Panjang yang sedang bertugas di sana. Pertempuran melawan NICA dilanjutkan pada tanggal 27 Oktober 1945. Pasukan Republik gabungan dari Banten, Tangerang, dan Bogor melakukan penyerbuan secara besar-besaran terhadap 200 orang pasukan NICA yang bermarkas di kantor Kewedanaan Kebayoran dan sebagian berlindung di rumah-rumah penduduk. Pasukan TKR dari Banten yang diwawancarai wartawan sepulangnya dari Kebayoran pada tanggal 28 Oktober mengungkapkan tekad mereka dengan ungkapan: *'Atau kita, atau NICA harus binasa.'* (Berita Indonesia, 30 Oktober 1945).

Tugas lainnya yang berhasil diemban oleh K.H. Syam'un sebagai komandan TKR adalah menumpas gerakan Dewan Rakyat pimpinan Ce Mamat yang berusaha menggulingkan Wakil Pemerintahan RI di Banten yang sah dengan menghancurkan markas gerakannya di Ciomas Serang dan Rangkasbitung, menangkap para pemimpinnya dan melucuti pasukannya. Ce Mamat alias Mohamad Mansur dilahirkan di Anyer. Pada tahun 1926 ia menjadi sekertaris PKI cabang

---

[1] Lihat lampiran I

Anyer. Setelah kegagalan perlawanan komunis 1926 ia melarikan diri ke Malaya dimana ia diterima menjadi anggota PARI yang didirikan Tan Malaka. Pada tahun 1930 ia pergi ke Palembang dan di sana bersama Mohamad Arif Siregar ia mendirikan klub studi politik. Dua tahun kemudian ia kembali ke Banten dan menjadi pokrol (pengacara yang tidak memerlukan izin khusus) yang sering membela para jawara di pengadilan. Selama masa pendudukan Jepang ia dan rekan-rekannya bersumpah untuk memutuskan setiap hubungan dengan orang-orang yang mendukung Jepang. Pada tahun 1944 ia dan rekan-rekannya ditangkap Jepang dan baru dibebaskan pada tahun 1945 (Williams, 1990: 286)

Dewan Rakyat mendapat dukungan beberapa ajakan masyarakat, terutama dari petani dan jawara. Mereka mengintimidasi masyarakat untuk membalas dendam kepada orang-orang Jepang, pamong praja dan polisi. Pada awal Oktober 1945 Dewan Rakyat mulai beraksi. Pada tanggal 12 Oktober 1945 mereka membebaskan tiga jawara, Achmad Sadeli, Mad Duding, dan Wadur, anggota mereka dari penjara utama di Serang. Pada tanggal 13 Oktober 1945 anggota Dewan Rakyat membunuh enam orang Eropa yang ditahan di penjara tersebut. Pada hari yang sama, mereka juga menangkap hampir semua orang yang meninggalkan tugasnya dari kantor kabupaten. Raden Oskar, Kepala Kepolisian dan Kolonel Entol Ternaya, Komandan Resimen III Divisi 1000/I, R. Sastradikarta, Wedana Ciomas ditangkap oleh mereka.

Sementara itu di beberapa tempat terjadi pembunuhan terhadap beberapa pamong praja, seperti Wedana Anyer dan Asisten Wedana Pabuaran, Tb. Entik Soerawidjaja. Mereka juga bergerak ke Baros, Petir dan Ciruas untuk memberhentikan dan bahkan membunuh para pejabat pemerintah di sana. (Soeharto, 2001: 114) Pada tanggal 27 Oktober 1945 Ce Mamat dan beberapa anak buahnya seperti H. Mu'min, Soleman, H. Achmad, dan H. Ma'mun menemui Residen Banten, K.H. Achmad Chatib. Mereka mendesak K.H. Achmad Chatib untuk menyerahkan kekuasaan kepada Ce Mamat. Karena terdesak, K.H. Achmad Chatib mengabulkan permintaan Dewan Rakyat. Keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 1945 keluar maklumat yang ditandatangani oleh Ce Mamat yang diperkuat oleh Bupati Serang Hilman Djajadiningrat dan disetujui oleh Residen Banten bahwa sejak hari itu kekuasaan Residen Banten berada di tangan Dewan Rakyat (Suharto, 2001: 115) Malam harinya mereka menculik Bupati Serang, Hilman Djajadiningrat, Patihnya, Asnawi, dan beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Serang. Mereka juga merebut dan menguasai jawatan-jawatan vital.

Melihat kejadian itu, K.H. Syam'un segera mengeluarkan surat perintah untuk menumpas gerakan Dewan Rakyat yang sangat anarkis ini. Dalam surat tersebut ia menegaskan bahwa seluruh Keresidenan Banten siap mempertahankan kedaulatan Republik. Seluruh rakyat dan para ulama yang menduduki jabatan pemerintahan di Banten serempak berjuang mempertahankan kedaulatan Negara. K.H.

Syam'un juga menegaskan bahwa rakyat Banten adalah warga Negara Republik Indonesia yang hanya mengakui Presiden Sukarno sebagai pemimpin Negara Indonesia merdeka. (Soekarahardja, Lamp. II, h. 3; Soeharto, 2001: 115-117)

Atas dasar perintah tersebut, maka kemudian pasukan TKR dari serang, Pandeglang, dan Lebak serentak menyerang markas Dewan Rakyat di seluruh tempat di Banten. Seluruh pimpinan Dewan Rakyat berhasil ditangkap, kecuali Ce Mamat yang melarikan diri ke Lebak dan kemudian kabur ke Bogor, tempat ia kemudian berhasil ditangkap. Selanjutnya ia diserahkan ke Komandemen I/Jawa Barat di Purwakarta dan dibawa ke Yogyakarta (Suharto, 2001: 122-123)

**Gerakan Revolusi Sosial di Banten**

Pada bulan November-Desember 1945 revolusi di daerah hingga pedesaan memasuki tahap baru. Para sejarawan sosial kerap kali menyebut situasi yang berlangsung bulan-bulan tersebut hingga memanjang ke tahun berikutnya sebagai masa 'revolusi sosial'. Revolusi yeng terjadi sebenarnya lebih menunjukan ketidak-puasan kelompok-kelompok masyarakat yang pro-Republik terhadap orang-orang yang dianggap memiliki kesetiaan yang diragukan, karena termasuk orang-orang yang pernah terlibat dalam pemerintahan kolonial. Rakyat bergerak mengikuti wacana politik kaum elit di pusat, saat Sukarno-Hatta dipandang sebagai orang-orang kolaborator Jepang dan Syahrir berikut orang-orang berhaluan kiri

ditempatkan secara kontras, sebagai kelompok revolusioner sesungguhnya.

Ricklefs menggambarkan fenomena revolusi di daerah-daerah telah berubah menjadi kejahatan-kejahatan tidak manusiawi. Para pemuda revolusioner di desa-desa bergerak atas nama 'kedaulatan rakyat' mengintimidasi, menculik, kadang kala membunuh para pejabat pemerintahan, kepala-kepala desa, dan anggota-anggota kepolisian yang dituduh tidak setia kepada republik atau karena korupsi, pencatutan, atau penindasan selama pendudukan Jepang (Ricklefs, 2011: 328). Revolusi sosial di Banten digerakan oleh Ce Mamat. Ia bukan orang baru di kancah pergerakan sosial di Banten, Ce Mamat alias Muhamad Mansur mantan aktivis 1926 yang berhasil meloloskan diri dari kejaran Belanda ke Malaysia melalui jalur Palembang berkat bantuan kolega-koleganya di Lampung, Palembang, Anyer dan Malaysia (Mufti Ali, 2017: 93).

Merujuk Else Ensering, gerakan Ce Mamat memiliki hubungan dengan gerakan Pemuda Menteng 31. Dalam pertemuan-pertemuan terakhir mereka, disepakati akan diadakan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan para pemimpin yang diindikasikan terpapar pengaruh kolonial asing, Belanda dan Jepang. Ce Mamat adalah orang yang ditugaskan oleh Abdul Muluk selaku pemegang kendali Menteng 31 untuk berangkat ke Banten, Yusuf ke Cirebon dan Joko Atmaji ke Surabaya.

Mereka membawa misi yang sama mengambil alih kekuatan rakyat atau "*rakyat mendaulat*". Dalam perjalanannya

ke Banten, Ce Mamat singgah di Tangerang selama satu hari untuk bertemu dengan Wikana dan pada saat yang sama, putra Haji Misbach mantan aktivis komunis 1920-an di Yogyakarta. Tidak lama setelah pertemuan tersebut revolusi rakyat di Tangerang meletus di bawah pimpinan Sutejo dan Syekh Abdullah seorang pimpinan laskar rakyat di Tangerang. Mereka mengkudeta bupati Tangerang Agus Padmanegara, seorang bekas pejabat kolonial yang tidak disukai rakyat. Suatu jalan dramatis bagi naiknya Haji Khaerun, seorang aktivis komunis tahun 1920 (Else Ensering, 1995: 144).

Ce Mamat telah menggerakan secara sporadis gerakan kudeta di berbagai daerah dengan nama Dewan Rakyat. Tampaknya gerakan kudeta di Tangerang berjalan sukses. Sekitar tanggal 20 Oktober Ce Mamat bersama Wikana dan seorang anak Haji Misbach menghadap KH. Achmad Chatib membawa pesan Chaerul Saleh atas perintah Abdul Muluk dari Menteng 31, agar K.H. Achmad Chatib, selaku residen Banten, berkenan melakukan *reshuffle* terhadap beberapa pejabat yang pernah menjabat di era kolonial baik di masa Belanda atau Jepang. Mereka beranggapan bahwa para pejabat tersebut rentan dimanfaatkan Belanda dan kontra revolusi. Sayangnya Residen Banten tidak memberikan tanggapan yang sejalan dengan harapan pemuda-pemuda ini. Gagal dalam usahanya tersebut, pada pukul 10 pagi tanggal 27 Oktober 1945, Ce Mamat menggerakan kekuatan dua truk jawara dan kelompok pemuda revolusioner yang didatangkan dari Tangerang untuk menduduki kantor Keresidenan Banten di Serang. Pada hari itu

yang ada di kantor Keresidenan adalah K.H. Syam'un, K.H. Achmad Chatib dan Abdul Hadi, seorang ex-digulis (Else Ensering, 1995: 152). Situasi malam itu sangat mencekam, K.H. Achmad Chatib tidak memiliki pilihan lain di bawah ancaman para jawara kecuali mengabulkan keinginan Ce Mamat.

K.H. Syam'un dan Ali Amangku dua tokoh militer terpenting yang ada di tempat tidak dapat berbuat banyak dan tidak mengerti mengapa K.H. Achmad Chatib menyetujui permintaan Ce Mamat. Menurut Else Ensering berdasarkan informasi yang didapat dari Ayip Dzuhri, K.H. Achmad Chatib menghindari pertumpahan darah. Ia paham betul karakter Ce Mamat saat aktif di PKI 1920-an termasuk seorang yang berdarah dingin, ia tidak akan segan-segan menumpahkan darah untuk kepentingan operasinya. Hari berikutnya Ce Mamat mengumumkan bahwa pemerintahan telah diambil alih Dewan Rakyat yang disetujui oleh K.H. Achmad Chatib (Else Ensering, 1995: 153). Kedudukan Residen masih tetap di tangan K.H. Achmad Chatib, tetapi Dewan Rakyat mengambil alih kendali atas fungsi Residen.

**Teror Gulkut: Penculikan dan Pembunuhan terhadap Pejabat dan Pamong Praja**

Dewan Rakyat dilengkapi dengan kelompok bersenjata yang terdiri dari jawara, pemuda revolusioner dan beberapa anggota TKR yang membelot ke Dewan Rakyat, kelompok ini dinamai *Laskar Gulkut*. Laskar inilah yang kemudian bergerak secara cepat melakukan penculikan terhadap beberapa pejabat

dan pamong praja yang tidak mereka sukai, segera setelah maklumat perebutan kekuasaan oleh Ce Mamat.

Dalam beberapa hari Dewan Rakyat dengan kekuatan Laskar Gulkut berhasil menguasai kota. Selain berhasil menduduki pusat pemerintahan, Dewan Rakyat pun berhasil menguasai penjara Serang. Pada dasarnya Dewan Rakyat tahu betul kekuatannya tidak akan mampu menang jika berhadapan dengan kekuatan TKR di Banten. Dan kudeta yang dia anggap berhasil itu disadari betul tidak akan mampu bertahan lama. Oleh karenanya, mereka beroprasi secara brutal. Menciptakan teror dan intimidasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang tidak sejalan dan tidak mendukung gerakan mereka. Pengambilalihan penjara, penculikan, pembunuhan dan perampokan tidak dapat dibendung, dalam situasi pihak pemerintah sendiri dalam keadaan terancam.

Pada malam hari Laskar Gulkut menculik R. Hilman Dajadiningrat dari rumahnya. Sebuah operasi yang dilakukan kelompok TKR yang menyebrang ke Dewan Rakyat. Hari berikutnya Oscar Kusumadiningrat didatangi lima orang pemuda dari Laskar Gulkut dan diculik dari rumahnya. Dua korban penculikan ini kemudian dijebloskan ke penjara Serang. Pada hari yang sama Laskar Gulkut pun berhasil menculik Entol Ternaya. Ketiganya kemudian dibawa ke Ciomas. Entol Ternaya telah lebih dulu di bawa ke Ciomas, menyusul setelahnya R. Hilman Djajadiningrat dan Oscar Kusumadiningrat tiba di Ciomas. Sementara Zulkarnaen Surja Lartalegawa berhasil meloloskan diri dari kejaran Laskar

Gulkut. Ia sangat memahami situasi yang tidak beruntung baginya seorang pamong praja eks-pegawai kolonial dan bukan orang Banten. Ia melarikan diri ke Sukabumi (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudari, 2011: 260).

Laskar Gulkut melakukan pembersihan ke daerah-daerah tingkat kecamatan dan desa-desa. Targetnya adalah sama pamong praja yang dianggap tidak pro rakyat dan pernah menjadi kaki tangan penjajah. Camat Baros dan Mantri Polisinya menjadi korban keganasan Laskar Gulkut, merea dibunung secara keji (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 261). Aksi teror Laskar Gulkut terus berlangsung sampai bulan Desember 1945. Di awal bulan Desember tersiar kabar penculikan kembali terjadi di Rangkasbitung, kini Bupati Lebak R. Hardjawinangun menjadi korban teror. Laskar Gulkut menculiknya dari rumahnya lalu dibawa ke Sumur. R. Hardjawinangun ditembak mati oleh sekelompok anggota Laskar Gulkut di jembatan Cisi'ih dengan tangan terikat, dan mayatnya dibuang ke sungai Cisi'ih (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 261).

Menyikapi perkembangan politik di Banten yang sedang memanas, Sukarno dan Hatta datang berkunjung ke Banten. Pemerintah daerah Banten menyelenggarakan rapat terbuka yang dihadiri oleh masyarakat luas di alun- alun Serang. Sukarno ingin memastikan situasi politik Banten dapat kembali stabil dengan kembali mendudukan Residen Banten pada tempatnya yang seharusnya setelah disabotase oleh aksi Dewan Rakyat. Pada tanggal 9 Desember itu Sukarno melalui pidatonya

berusaha menyatukan hati rakyat Banten dengan mengingatkan berkali-kali bahwa Banten telah melahirkan banyak pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan yang selama ini dicita-citakan bersama. Dalam seruannya juga Sukarno memerintahkan pembubaran Dewan Rakyat (Halwany Michrob, 2011: 261; M Yusuf Efendi, 2014:

40).

Kedatangan dua pimpinan negara ke Serang tidak menjadikan kondisi politik dan keamanan di Banten kembali aman begitu saja. Dewan Rakyat justru merespon seruan Sukarno di alun-alun Serang itu dengan lebih agresif. Sebagai balasan dari seruan Sukarno yang menginginkan Dewan Rakyat dibubarkan, Laskar Gulkut dari Ciomas menyerang kantor polisi Serang dengan cukup brutal, tetapi serangan ini berhasil dilumpuhkan oleh TKR dan mendesak Laskar Gulkut mundur kembali ke markas (Halwany Michrob, dan A. Muhajidin Chudori, 2011: 261). Pengejaran terhadap aktivis-aktivis Dewan Rakyat pun segera dijalankan.

**Penyerbuan ke Markas Dewan Rakyat**

Melihat situasi kota sudah memberi ruang leluasa kepada pemerintah untuk melakukan penindakan tegas,

K.H. Achmad Chatib, selaku Residen Banten memerintahkan kepada K.H. Syam'un untuk menumpas kelompok Dewan Rakyat sampai ke akar-akarnya. K.H. Syam'un akhirnya mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada seluruh markas TKR di setiap daerah melakukan penangkapan dan jika

dibutuhkan penumpasan Dewan Rakyat di setiap daerah. Komando operasi ini diberikan kepada Ali Amangku dan Tb. Kaking, dua orang kepercayaan K.H. Syam'un (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 260).

Pertama-tama TKR di bawah komando Ali Amangku dan Tb. Kaking bergerak membersihkan kota dari kendali Dewan Rakyat. Kini para komando TKR harus benar-benar hati-hati, mengingat sebagian anggota TKR ada yang ikut menyeberang ke Dewan Rakyat. TKR akhirnya dengan perlawanan yang tidak terlalu sulit berhasil melumpuhkan penjagaan Laskar Gulkut, berhasil menguasai penjara Serang. Kekuatan Laskar Gulkut sejak hari ketiga sudah mulai terkonsentrasi di markas besarnya di Ciomas (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 260). Setelah berhasil mengembalikan kota Serang ke tangan pemerintah yang sah, TKR pun bergerak menekan kekuatan Laskar Gulkut di pusat markasnya di Ciomas. Laskar Gulkut berhasil menguasai kantor Kewedanaan Ciomas, dan beberapa pejabat yang diculik disandera di lokasi tersebut. Mereka pun sudah menyiapkan sekelompok laskar yang bertugas menghambat perjalanan TKR ke Ciomas. Bentrok antar kedua kelompok pecah di jalan Serang-Ciomas. Dua anggota TKR gugur dalam bentrokan tersebut. Laskar Gulkut yang menghadang TKR adalah para jawara. Setelah berhasil melumpuhkan kelompok Laskar Gulkut, TKR melanjutkan pergerakannya ke Ciomas. Kekuatan Laskar Gulkut sudah terkonsentrasi di kantor Kewedanaan Ciomas. Mereka kini benar-benar terkepung dengan kekuatan

yang mulai lemah, kantor Kewedanaan dihujani tembakan berentet. TKR berhasil mengalahkan Laskar Gulkut, dan para beberapa pemimpin Dewan Rakyat telah lebih awal melarikan diri dari markasnya. Oscar Kusumadingingrat ditemukan terikat di sebuah pohon di belakang kantor kewedanaan Ciomas (Halwany Michrob dan A. Mujahidin Chudori, 2011: 261).

**Rasionalisasi TKR: Menjabat Komandan Brigade I/Tirtayasa Juli 1946 -15 Maret 1947**

Memasuki bulan November situasi politik dan keamanan di seluruh Indonesia semakin tidak menentu, bahkan sudah mencapai klimaks perseteruan dengan Inggris bersa-sama dengan Belanda. Pemerintahan pusat yang dipindahkan ke Surabaya mendapat tekanan militer dari Inggris. Dan tentu saja di bawah ancaman dibumi hanguskan oleh kekuatan penuh militer Inggris melalui corong sekutu, TKR bersama pemuda menggelorakan perang syahid "Merdeka atau mati." Sebuah perang yang tidak berimbang antara TKR-pemuda dan Inggris-NICA meletus pada tanggal 10 November 1945. Beberapa pengamat menilai perang penyerbuan ke Surabaya pada tanggal 10 November itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk balas dendam atas kekalahan Belanda di era Jepang.

Di bawah tekanan militer Belanda dan Sekutu bahkan Jepang yang masih tinggal di Indonesia menjadi kaki tangan sekutu yang bergerak di beberapa tempat. Pemerintah bersama-sama elit politikus, tetap bergerak seakan-akan tidak pernah terjadi kekacauan di kota-kota besar. Pemerintah pusat

mengeluarkan maklumat politik no. 1 tanggal 1 November 1945 menjawab usul KNIP untuk menyusun partai-partai politik yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat yang berbeda paham agar kemudian menjadi kekuatan pertahanan untuk melawan penjajah. Tentu saja usaha ini secara politis dipertimbangkan sangat penting untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Sementara itu BKR dengan tentaranya sedang bersitegang dengan musuh yang siap menyerang kapan saja. Sekutu dan NICA terus mendesak agar pemerintah Indonesia menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan (Slamet Muljana, 2011: 64).

Bulan-bulan selama kurun waktu 1946 bangsa Indonesia tengah memasuki masa terpenting tidak saja bagi perjuangan kemerdekaan, tetapi juga membentuk kedaulatan politik negara. Tidak bisa disangkal lagi, terbentuknya partai-partai politik yang banyak itu membuka keran perselisihan antara para elit politik. Sementara di luar percaturan politik dalam negeri sekutu dan NICA selalu siap menunggu waktu yang tepat memanfaatkan ragam kemelut dalam negeri untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Isu politik yang berkembang di masa-masa ini masih tetap bersinggungan dengan tema perseteruan antara kaum kolabolator dengan pro-rakyat. Sementara pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan menghadapi sekutu dan NICA. Perang selalu memakan korban materil dan jiwa yang –menurut pemerintah– harus dihindari sedapat mungkin. Di tahun-tahun inilah perundingan- perundingan penting digelar dengan pihak NICA yang difasilitasi Inggris dan

negara-negara lainnya yang kedua pihak percayai sebagai wasit. Sementara itu di tempat yang jauh, Ratu Belanda di Netherland, sudah mengintruksikan agar dibentuknya dengan segera Negara Federal Indonesia. Van Mook adalah orang yang tepat mewujudkan rencana tersebut di Indonesia, selain orang Belanda yang lahir di Indonesia, ia juga beraliran kolot dan termasuk inisiator gagasan kemerdekaan setengah- setengah ini. Perjanjian Linggarjati yang merujuk kepada suatu daerah didekat Cirebon dimana perjanjian antara pemerintah Belanda dan Indonesia bertemu dan membuat perjanjian yang berlangsung pada tanggal 7, 9 dan 14 Oktober 1946 dan berakhir pada tanggal 11-15

November 1946 (Slamet Muljana, 2011: 115).

Di dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa kedaulatan Indonesia berlaku untuk wilayah Jawa, Sumatra dan Madura. Di luar itu Belanda mendapat hak mereka untuk membentuk negara federal. Namun pihak Belanda mengingkari perjanjian ini dan tetap berambisi menguasai Jawa, Sumatra dan Madura. Akhirnya kedua belah pihak tidak dapat bersepakat. Dr. Louis Bell, seorang intelektual yang kolot seperti Van Mook, kala itu menjabat perdana menteri Belanda. Menyatakan pemerintah Indonesia tidak mematuhi hasil perjanjian. Van Mook diperintahkan melakukan aksi militer menangkap para pejabat dan kelompok nasionalis yang kontra Belanda mulai tanggal 20 Juni 1947 (Slamet Muljana, 2011: 115). Tujuannya hanya satu, membatalkan kemerdekaan RI yang sudah diproklamasikan dan dipertahankan sejauh ini.

Pemerintah RI segera mempersiapkan kekuatan militer dan beberapa strategi politik untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk menghadapi desakan militer Belanda. Usaha penting dilakukan pemerintah mereorganisasi TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1946. Menjelang akhir Januari, tepatnya tanggal 26 Januari 1946, pemerintah pusat kembali mereorganisasi TKR menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia) berdasarkan struktur organisasi tentara internasional (Mufti Ali, dkk.,2015: 155).

Di bulan Juli1946 Divisi 1000/1 dihapus untuk kemudian disusun bentuk Brigade I Tirtayasa yang meliputi Keresidenan Banten, Kabupaten Tangerang dan Bogor. K.H. Syam'un yang berpangkat kolonel ditunjuk menempati jabatan komandannya (Mufti Ali, dkk, 2015: 155). Hanya saja K.H Syam'un tidak memiliki banyak waktu menjabat jabatan ini, Desember 1946 Letkol. Sukanda Bratamanggala – seorang Priangan – ditetapkan sebagai penggantinya. Pada saat bersamaan, K.H. Syam'un ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Bupati Serang. Letkol Sukanda Bratamanggala ternyata orang yang kurang disukai oleh prajurit asal Banten. Karena dianggap tidak adil dan terlalu membawa semangat kedaerahan didalam tubuh tentara, ketika pertama menerima jabatan, ia membawa satu bataliyon asal Priangan dengan persenjataan yang lengkap. Untuk menangani konflik internal markas pusat TRI mengembalikannya ke Periangan dan diganti oleh Edi Sudewo (Mufti Ali, dkk., 2015: 155).

Selama menjabat komandan Brigade Tirtayasa K.H. Syam'un menghadapi banyak peristiwa penting. Di bulan Mei meletus konflik etnis antara orang Tionghoa dan pribumi di Tangerang. Pada saat yang sama Belanda tengah memperluas daerah dudukannya. Brigade Tirtayasa bergerak membendung tekanan NICA di perbatasan Banten. Di samping itu rasionalisasi di tubuh TRI memunculkan konflik internal yang melebar. Di tingkat pusat sendiri tengah terjadi perebutan kekuasaan atas TRI antara menteri pertahanan yang dijabat oleh Amir Syarifudin dari sayap kiri yang tetap menginginkan tentara dari unsur rakyat bertahan di dalam TRI di bawah naungan Menteri Pertahanan. Sementara Panglima Tinggi Angkatan Perang Republik Indonesia menginginkan personel TRI yang profesional dan tetap bergerak di bawah komando Panglima Tinggi (Slamet Muljana, 2011: 150). Permasalahan ini meluas ke tingkat bawah. Laskar rakyat bentukan kelompok kiri yang pernah dibentuk oleh Ce Mamat melakukan kekacauan di Ciomas, sebagai bentuk protes terhadap program rasionalisasi tentara yang dinilai menyisihkan mereka dari garis perjuangan rakyat selama masa revolusi.

**Menyelesaikan Konflik Etnis di Tangerang Mei 1946**

Peristiwa penting di Tangerang, tidak bisa dikesampingkan. K.H. Syam'un terhitung tokoh yang memiliki peran besar menyelesaikan konflik etnis yang melibatkan kelompok ekstremis Cina di Tangerang Selatan yang termakan hasutan Belanda. Konflik etnis ini sebenarnya dipicu oleh pendudukan Belanda yang membonceng kepada Pasukan Sekutu ke Tangerang, kemudian mengadakan aneka macam teror untuk memancing perlawanan dari para pejuang kita.

Setelah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi sangat kacau, Sekutu akan tampil dengan ultimatum yang menuntut agar tentara Republik dan badan-badan perjuangan bersenjata meninggalkan Tangerang sampai sejauh 4 km di seberang Cisadane. Ultimatum tersebut disebarkan Inggris dari udara pada tanggal 16 Mei 1946 dengan disertai penjelasan bahwa pihak pemerintah RI telah menyetujuinya. Mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat, TRI akhirnya mundur ke luar Kota Tangerang. Sementara badan-badan perjuangan rakyat akan mempertahankan Tangerang dengan sekuat tenaga dalam bentuk perlawanan gerilya.

Ketika TRI mundur, Sekutu bersama-sama NICA dan dibantu barisan Pouw An Tui menduduki Tangerang dengan leluasa setelah membobol pertahanan rakyat di Rawa Buaya, Bendungan Polor, Cipondoh, Serpong, dan Pakulonan. Musuh menduduki Tangerang pada 22 Mei 1946, dan pada pukul 13.00 mereka telah dapat menduduki kantor Kabupaten Tangerang yang sudah dikosongkan. Bendera Merah Putih yang masih berkibar di kantor tersebut kemudian diturunkan oleh anggota Pouw An Tui dan diganti dengan bendera Belanda. Sementara roda pemerintahan Kab. Tangerang dijalankan di Balaraja. (Matia Madjiah, 1986: 93-4)

Barisan Pouw An Tui yang masuk Tangerang bersama-sama dengan pasukan Inggris dan NICA telah bertindak sangat kejam terhadap penduduk, seakan-akan mereka hendak membalas dendam terhadap kekejaman yang pernah dialami mereka pada permulaan revolusi dari golongan kiri. Kekejaman

Pouw An Tui ini membangkitkan kembali kebencian rakyat terhadap orang-orang Cina. Kebencian rakyat makin bertambah karena semakin hari kekejaman Pouw An Tui semakin menjadi-jadi. Akhirnya kebencian rakyat terhadap etnis Cina meledak dalam bentuk pembalasan. Mereka membalas dengan membabi buta. Akhirnya orang-orang etnis Tionghoa yang berada di daerah RI yang harusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan menjadi sasaran.

Banyak orang Cina yang menjadi korban pembunuhan dan perbuatan kejam lainnya. Eksodus besar-besaran etnis Cina terjadi. Mereka pergi meninggalkan Tangerang dan mengungsi ke Tangerang yang dikuasai RI ke Serang dan ke Rangkasbitung.

Peristiwa ini menjadi masalah Nasional dan bahkan Internasional. Untuk turut mengatasi ini, Komandan Brigade I Tirtayasa, Kolonel K.H. Syam'un membentuk *task force* untuk menyadarkan masyarakat dari kekeliruan mereka. Tim ini terdiri dari alim ulama dan tokoh masyarakat. KH Syam'un mengerahkan mereka ke daerah Tangerang untuk memberi penerangan ke pelosok- pelosok. KH Syam'un sendiri turut serta bersama dengan Mayjen A.H. Nasution. Berkat upaya ini, akhirnya rakyat dapat disadarkan. (Kedaulatan Rakjat, 20 Juni 1946; Sin Po; Merdeka 10 Juli 1946; Matia Madjiah, 1986: 96).

**Menahan Serangan NICA di Perbatasan Banten**

Setelah Tangerang diduduki oleh NICA, maka dengan demikian Banten menjadi tidak aman dari pendudukan

Belanda. Batas-batas terluar Banten terutama yang bersempadan dengan Tangerang harus segera dijaga. Untuk mengatasi masalah ini, KH Syam'un selaku Komandan Brigade I Tirtayasa memerintahkan beberapa batalyon TRI untuk memperkuat pasukan di daerah perbatasan Banten dan Tangerang. Di antara pasukan yang dikirim itu adalah Batalyon II Mayor Samanhudi yang dipimpin langsung oleh Martono, Ajudan Komandan Batalyon II berkedudukan tiga kompi, masing-masing ditempatkan Kompi I Sunaryo di Sarakan, Kompi II Akhmad Bakri di Cimone, dan Kompi III Abdullah Isa di Jenggot. Di samping itu dikirim pula Polisi Tentara (PT) Batalyon X/GM/Banten dipimpin oleh Yusuf dengan komandan-komandan kampanye; Haerkusuma Djajamihardja, Salim Nonong, Ajip Dzuhri dan Sinting. Mereka ditempatkan di Kedaung Barat, Karang Serang, Gagarawakopi, Sepatan, dimana operasinya sampai melintasi Cisadane ke Sanggego, Kedaung Timur, Batu Ceper dan Bojong-Renged. Di daerah Balaraja ditempatkan batalyon yang dipimpin oleh Supaat, di jurusan Curug Pasar Genjer dan di Binong ditempatkan Kompi Subki, sedangkan di Cijantra ditempatkan Kompi Sanusi, yang kedua-duanya dari Polisi Tentara batalyon XI Banten.

Serangan serdadu NICA ke Jatiuwung memaksa TRI mundur ke Cikupa, pada tanggal 16 Juni 1946, dengan menggunakan senjata dan perlengkapan perang modern, NICA mengadakan serangan mendadak ke Curug, Mawuk dan Balaraja, sehingga terpaksa pasukan resimen di Tangerang kembali mundur sampai ke daerah Cikande. Untuk membantu

Resimen 40 Tangerang, Komandan Brigade I/ Tirtayasa, Kolonel K.H. Syam'un pada tanggal 18 Juni 1946 segera mengirimkan tambahan pasukan TRI dari Batalyon III yang dipimpin oleh Mayor TB syamsudin Noor di samping pasukan Banten yang sudah berada di Tangerang, Batalyon II dipimpin oleh Mayor Samanhoedi bersama dengan kesatuan-kesatuan laskar dan badan-badan perjuangan yang dipimpin oleh Ajip Dzoehri dan Ajip Samim dari *Hizbullah*, Supri Djamhari dari *Sabilillah* dan Haji Djamra dari Laskar Rakyat. Batalyon ini terdiri dari 4 kompi, yang masing- masing dipimpin oleh Kapten Sape'i Sofjan, Kapten Sunaryo, Kapten Saleh Djaisan, dan Kapten Memed Hadi. (Halwani Michrab & M. Chudari, 1993: 281-2)

**Mengatasi Konflik antara Laskar Rakyat dengan TNI**

Laskar Rakyat adalah badan perjuangan rakyat yang dibentuk oleh Ce Mamat dan kawan-kawan. Haluan badan perjuangan ini cendrung radikal dan revolusioner. Laskar ini hanya ada di Kabupaten Serang dan memiliki cabang di tujuh Kecamatan: Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Cinangka, Anyer, Mancak, dan Baros. Laskar Rakyat dipimpin oleh Che Mamat, Tb. Hilman, dan Ali Rachman. Pimpinan laskar rakyat tingkat Kecamatan dipimpin oleh beberapa orang yang berasal dari beberapa desa. Setiap anggota pimpinan mempunyai 10 sampai 25 anak buah yang fanatik dan loyal kepada pimpinannya. Anggota dari laskar rakyat ini kebanyakan adalah ulama yang

berjiwa jawara. KH. Achmad Chatib diangkat menjadi pemimpin besar Laskar Rakyat.

Laskar Rakyat yang dipimpin oleh Ce Mamat ini pernah membuat ketegangan serius dengan tentara. Pertentangan antara laskar dan tentara semakin hari semakin meruncing dan akhirnya tentara bertindak sangat tegas dengan melucuti senjata laskar yang dianggap membahayakan perjuangan. Tugas melucuti senjata laskar ini kebetulan dilakukan oleh para tentara yang kebetulan berasal dari Priangan. Akibatnya timbulah rasa sakit hati dan sikap antipati kepada tentara. Maka sebagai sesepuh ulama dan tentara yang disegani, K.H. Syam'un tampil mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik ini. Ketegangan dapat diatasi karena kharisma ulama ini. (Matia Madjiah, 1986: 128).

**Menghadapi Agresi Militer I (21 Juli – 4 Agustus 1947)**

Pada tanggal 21 Juli 1947 tepat pukul 19.00 para pemimpin negara, Soekarno, Syahrir dan Jend. Sudirman berpidato secara bergantian yang disiarkan melalui radio. Pidato-pidato yang berhasil membangunkan kesadaran rakyat dan menyulut semangat juang ini menyeru rakyat dari semua kalangan rakyat untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk akan terjadinya perang semesta yang besar, kemerdekaan yang selama ini sudah dipertahankan menjadi pertaruhan. NICA telah mengepung Ibukota dan beberapa kota besar lainnya (Slamet Muljana, 2011: 117).

NICA terus bergerak mengembangkan daerah kekuasaannya dan membentuk negara-negara kecil guna

mempersempit wilayah kekuasaan Republik. Belanda berhasil mencaplok daerah paling timur dari kepulauan Indonesia pada bulan Desember 1946. Melalui sebuah konfrensi sebelah pihak di Denpasar-Bali, Belanda memproklamasikan Negara Indonesia Timur. Sebuah langkah yang sebenarnya tidak pernah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Tetapi usaha mereka terhambat di beberapa wilayah yang memiliki jumlah mayoritas penduduk muslim, mereka pro-Republik Indonesia, seperti di Kalimantan kecuali di Pontianak, Belanda berhasil mengambil hati Sultan Hamid II dan mendirikan negara federal di sana pada bulan Mei 1947 (M.C. Ricklefs, 2011: 338). Kecuali Jawa yang sulit ditundukan, melalui sebuah diplomasi politik yang menguntungkan Belanda, di Linggar Jati.

Setelah kedua belah pihak tidak mendapatkan titik temu dalam konflik soal isi perjanjian Linggar Jati yang banyak menguntungkan pihak Belanda, Van Mook yang keras kepala dan berpandangan kolot, mengambil jalan militer. Tanggal 20 Juli 1947 Van Mook mengeluarkan perintah untuk melaksanakan aksi militer–meminjam istilah Ricklefs – 'aksi polisional'. Tepat tengah malam, pasukan-pasukan NICA yang sudah ditempatkan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang mulai bergerak melakukan invasi militer. Jawa Barat, wilayah ujung timur Indonesia, dan Jawa Timur berhasil di duduki Belanda (Ricklefs, 2011: 339). Kecuali Banten, mereka tertahan di perbatasan-perbatasan.

Merespon situasi politik yang semakin menegang setelah perjanjian Linggar Jati mengalami kebuntuan. Gubernur Jawa

Barat, M. Sewaka, melakukan perjalanan keliling ke wilayah-wilayah pedalaman di Jawa Bara (Bandung Selatan, Suka Bumi dan Banten). Dalam perjalanan keliling ini Gubernur menyampaikan intruksi kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pertahanannya bersiap sedia menghadapi kemungkinan serangan militer NICA ke daerah-daerah masing-masing. Karena ketegangan adu urat syaraf antara pemerintah Belanda yang diwakili Van Mook dengan Syahrir semakin meruncing (Nina Lubis, dkk., 2014: 266-267).

Setelah Van Mook mengeluarkan intruksi aksi militer tanggal 20 Juli 1947 tentara NICA melakukan oprasi militer di Jakarta Timur, Bekasih, Tambun dan beberapa daerah di Jawa Barat. Kekuatan Divisi Siliwangi di bawah Panglima A.H. Nasution terpecah-pecah untuk mengamankan daerah-daerah di Jawa Barat, satu bataliyon dengan persenjataan lengkap diturunkan ke Banten untuk bergabung dengan Brigade Tirtayasa. TRI di Banten segera mengalami penyesuaian dengan situasi yang tengah berkembang. Kolonel K.H. Syam'un digantikan oleh dua orang perwira secara berturut-turut. Letkol Sukanda Bratamanggala adalah perwira yang mendapat mandat dari Panglima Siliwangi menggantikan kedudukan K.H. Syam'un. Kemudian digantikan oleh Edi Sudiwo (Halwany Michrob dan A. Mujahid Chudori, 2011: 295; Mufti Ali, dkk., 2015: 149).

Ketika tentara NICA melancarkan aksinya di Jakarta, Brigade Tirtayasa di bawah desain Edi Sudewo menurunkan bantuan militernya ke Jakarta Barat, berusaha menikam tentara

NICA dari belakang. Sasaran utama serangan ini memukul mundur tentara NICA dari Tangerang dan sekitarnya. Mayor R. E. Jaelani mendapat tugas memimpin serangan dengan membawa tiga kompi pasukan. Peperangan pun pecah di Sepatan, Cimone, Karawaci. Gedung-gedung strategis, jembatan-jembatan penghubung berhasil dihancurkan guna menghambat laju pasukan NICA (Halwany Michrob dan A. Mujahid Chudori, 2011: 296).

**Brigjen KH Syam'un, Komandan Daerah Pertahanan I Banten**

Ketika Brigade I Tirtayasa dipimpin oleh Kolonel Dr. Eri Soedewo, komando pertahanan yang sempat membeku kembali dihidupkan. Kolonel KH Syam'un diangkat menjadi Komandan Komando Daerah Pertahanan I Banten pada bulan Mei 1947 (Matia Madjiah, 1986: 156). Selain menjabat sebagai Bupati Serang, dengan demikian K.H Syam'un juga masih memiliki pengaruh di dunia militer (Beberapa peran dan kiprahnya pada masa ini dijelaskan dengan seksama oleh bekas ajudannya, Mayor Sukaraharja dalam catatannya tahun 1982).

K.H. Syam'un loyal terhadap pemerintah Republik Indonesia dan mendukung penuh perintah Presiden kepada Semaun Bakri CS untuk membeli pesawat baru untuk Republik Indonesia dengan menggunakan 20 kg emas dari tambang emas Cikotok Banten Selatan. KH. Syam'un adalah seorang pejabat sipil dan militer Banten yang melepas kepergian pesawat RI- 002 Dakota pada 30 September 1948, yang pilotnya berkebangsaan Amerika, Bobby Freeberg, dari lapangan udara Gorda menuju

India dengan mengemban misi utama dari Presiden Soekarno untuk membeli pesawat baru untuk Republik Indonesia. Pesawat ini membawa lima orang penumpang: (1) Semaun Bakri, wakil Residen Banten, (2) Opsir Udara III Santoso, (3) Opsir Udara III Bambang Saptoadji, (4) Opsir Muda Udara Sumadi, dan (5) Sersan Mayor Suryatman. Pesawat ini membawa 14 peti emas, dengan berat kurang lebih 20 Kg dengan rencana penerbangan ke Tanjung Karang, kemudian ke Bukit Tinggi. Setelah meninggalkan Tanjung Karang, RI002 ini menghilang dan baru ditemukan tiga puluh tahun kemudian, pada tanggal 7 April 1978, oleh dua orang petani miskin dari Sumatera yang tengah merambah hutan di Gunung Punggur, Lampung Utara, untuk mencari ladang baru. (RI 002: Napak Tilas, 22-24; Pikiran Rakyat, 30 Juli 1978; Kompas, 30 Juli 1978; wawancara, Fuad Bakri, 26 Februari 2018)

**Tukar Menukar Tawanan dengan Belanda**

Dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi di perbatasan Tangerang, banyak tokoh-tokoh Banten yang ditawan Belanda saat berusaha menduduki Tangerang. Peran besar lainnya yang dilakukan K.H. Syam'un seperti tercatat dalam catatan bekas ajudannya adalah bahwa selaku Komandan Pertahanan Daerah I Banten, KH Syam'un pernah memerintahkan ajudannya untuk melakukan tukar menukar tawanan dengan pihak tentara Belanda di Cimanceri (Sekitar Jembatan Balaraja), Tangerang. Diantara tawanan itu adalah Tb. Saparuddin, eks Bupati Serang, yang saat itu tertangkap di Batavia ketika bertugas sebagai kurir.

# BAB V

## K.H. Syam'un Menjabat Bupati dan Mempertahankan Pemerintahan di Pedalaman Banten

Supriatna dan Wiyanarti (ed) (2008:317) menyatakan bahwa di Banten, di samping para jawara dan birokrat, kaum ulama/kyai menempati posisi penting, seperti tercermin dalam tipologi struktur sosial kekuasaan mereka. Sebagaimana diketahui, ulama memiliki otoritas tidak hanya pada bidang keagamaan tetapi dibidang sosial dan bahkan politik. Hal itu tercermin dalam fakta sejarah bahwa ulama diakui memiliki wibawa besar. Di samping karena status sosial ekonominya di atas rata-rata orang Banten, melalui pesantren yang didirikannya dan kitab kuning yang ditulisnya, ulama bertindak sebagai penerjemah doktrin-doktrin Islam yang otoritatif, dan sekaligus sebagai jembatan dari proses transmisi nilai-nilai keagamaan yang panjang atau sebagai pialang budaya. Hal ini juga terdapat pada sosok tokoh berpengaruh yakni

K.H. Syam'un.

K.H. Sjam'un di bidang pemerintahan pada bulan Januari 1946 diangkat sebagai Bupati Serang menggantikan Raden Hilman Djajadiningrat. Karena semenjak Proklamasi Kemerdekaan pemerintahan daerah mandeg yang membuat pamong praja terus menerus dalam keadaan bingung, sedang keamanan perlu dipelihara dan urusan yang lain harus berjalan, akhirnya rakyat dengan caranya sendiri melalui rapat-rapat terbuka mengangkat para pamong praja baru yang umumnya terdiri dari kyai dan ulama. Pergantian pamong praja dijalankan dengan jalan damai dan bijaksana. Demikian pula jabatan-jabatan Wedana, Camat,

bahkan sampai tingkat Kepala Desa mulai diganti dengan para Alim Ulama (Suharto, 2001:124).

Pejabat pamong praja baru di kabupaten Serang adalah sebagai berikut. Bupati Serang: K.H. Syam'un, Wedana Serang: Muhammad Padmadidjaja, Camat Serang: Muhammad Ubang, Camat Kasemen: K.H. Madzadzi, Camat Taktakan: M. Niti, Camat Waringin Kurung: K.H. As'ari, Camat Kramatwatu: Tb. Atja Atmakoesoemah, Wedana Ciruas: K.H. Soechari, Camat Walantaka: K. Azurum, Camat Kragilan: K.H. A. Koesen, Camat Cikande: K.H. Abdul Hamid, Wedana Pamarayan:

K.H. Ghazali, Camat Pamarayan: Tb. Mukri, Camat Cikeusal: K.H. Sarik, Camat Petir: K.H. Mukri, Camat Kopo: K.H. Soleh, Wedana Ciomas: K.H. Uding, Camat Ciomas: K.H. Soesa'i, Camat Pabuaran: K.H. Mahmoed, Camat Baros: Soemantri, Camat Padarincang: K.H. Halimi, Wedana Pontang: K.H. Samwani, Camat pontang: K.H. Zoehri, Camat Tirtayasa: H. Madsanan, Camat Carenang: K.H. Moestaja (Baca: Moestaya), Wedana Cilegon: K.H. Soehemi, Camat Cilegon: K.H. Soechari, Camat Bojonegara, K.H. Soleman, Wedana Anyer: M. Basari, Camat Cinangka: K.H. Alidjaya, Camat Mancak; K.H. Abdul Halim (Mufti, 2015: 149, Suharto, 2001:124-125).

Pada masa Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947, Banten diblokade. Blokade ini membuat Banten menjadi daerah yang tertutup. Belanda menjaga ketat daerah perbatasan terhadap arus orang dan barang kebutuhan sehari-hari yang masuk dan keluar daerah Banten. Pihak RI yang menjaga di perbatasan itu juga melakukan hal yang sama. Blokade ini mempunyai dampak

yang luas bagi Banten. Akibat Blokade itu, beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang biasanya didatangkan dari luar daerah Banten, misalnya Jakarta, semakin sulit diperoleh, akhirnya harga membumbung tinggi (Suharto, 1996:6).

Perjuangan K.H. Syam'un sebagai Bupati Serang, ditunjukkan dalam menangani masalah pemerintahan di Banten Utara yang masyarakatnya mengalami kekurangan makanan. Penyakit malaria mengamuk dengan hebatnya. Begitu juga penyakit *hongerudden* (biri-biri). Masyarakat banyak mengalami kekurangan makanan karena masyarakat tidak sanggup lagi mengerjakan tanah mereka semua karena tenaga mereka yang lemah (Soeara Merdeka, 1947: 3-4; Suharto, 1996:12). K.H. Syam'un selaku Bupati Serang, bersama-sama dengan pejabat Residensi Banten dan masyarakat berusaha mengatasi kebutuhan hidup masyarakat, dengan mendorong masyarakat agar membuat barang tertentu dan menggunakan barang-barang lain sebagai pengganti. Ada pula beberapa barang yang diperoleh dengan cara mencari dan membelinya di luar daerah Banten. Dalam keadaan yang sulit berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Banten untuk mengatasinya, antara lain, mengeluarkan aturan terhadap penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh Banten. Orang Banten dibolehkan membawa keluar hasil-hasil Banten dalam jumlah tertentu, untuk menghindari habisnya persediaan (Soeara Merdeka, 1947: 4; Permana, 2017: 101).

Dalam hubungan ini pemerintah daerah membentuk polisi ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat membuat beberapa jenis barang yang antara lain bensin, vaselin,

granat, garam, minyak tanah sabun dan obat-obatan yang mutunya lebih rendah. Untuk mendapatkan bensin, suatu komoditi vital, orang membuat bensin sendiri dari karet, dengan proses destilisasi. Beberapa orang cerdik dan penuh akal di bawah Kapten Widodo berhasil merekayasa bensin terbuat dari karet. Untuk membuat vaselin orang membuatnya dari kelapa sawit (Suharto, 1996: 22). Untuk membuat granat dan mortir, pabrik minyak kelapa "Mex Olie" di Rangkasbitung merupakan salah satu produsen mortir, akan tetapi karena mortir itu tidak dilengkapi alat pengontrol, setelah digunakan beberapa kali pelurunya tidak terlontar, dan meletus di dalam tabung. Selain itu dipabrik itu dibuat ranjau darat, bom tarik, dan granat bambu (Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudori, 1996: 283-285).

Untuk garam dapur, dibuat sendiri dari air laut di Pantai Selatan dengan menggunakan seng sebagai tempat penggodog untuk mendapatkan endapan garam. Untuk pengganti minyak tanah yang digunakan sebagai lampu penerangan, orang menggunakan minyak sawit. Untuk sabun cuci orang menggunakan buah kelerak. Ada juga orang yang mendirikan perusahaan sabun yang menggunakan peralatan sederhana. Untuk obat-obatan diperoleh dengan membuat sendiri beberapa jenis obat, seperti obat batuk dibuat dari daun sirih, bubuk kina dibuat dari kulit kina, obat buduk dibuat dari belerang yang dicampur minyak kelapa sawit. Perban dibuat dari kulit pohon pisang bagian dalam, vaksin cacar dibuat oleh dr. Satrio (pejabat bagian kesehatan Brigade Tirtayasa) (Madjiah, 1986:203-205).

Untuk mengatasi sulitnya masuk Oeang Republik Indonesia (ORI), ke Banten, uang kertas dibuat sendiri atas izin pemerintah pusat, uang itu bernama ORIDAB (Oeang Republik Indonesia Daerah Banten). Pengeluaran uang itu didasarkan jaminan emas dari Cikotok. Pembuatan mata uang itu dilakukan setelah pemerintah daerah Banten tidak dapat membayar gaji pegawai. Pemprakarsa pembuatan uang tersebut adalah pembantu Gubernur Mr. Joesoep Adiwinata dan R. Lumanauw, Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Keresidenan Banten.

Setelah dipersiapkan selama dua bulan sejak bulan september 1947, dengan menggunakan peralatan yang sederhana pada Desember 1947 beredarlah ORIDAB yang pertama dari kertas Rp 10,- dan Rp 5,-. (Suharto, 1996:16).

Blokade yang sangat ketat dan total oleh Belanda yang mengisolasi Banten selama kira-kira tiga tahun, dihapus setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Berkat kepemimpinan K.H. Syam'un sebagai Bupati yang kharismatik dan patriotik yang selalu memahami permasalahan rakyatnya dengan segala kesulitan dapat teratasinya dengan baik. Terbukti rakyat Banten begitu tahan, ulet dan dapat bertahan dalam penderitaan, ketika Belanda dengan blokade ekonominya yang ketat itu ternyata tidak berhasil menghancurkan rakyat dan pejuang Banten. Bahkan, blokade itu membuat pemerintahan daerah, tentara dan rakyat Banten bersatu padu. jelaslah bahwa ketahanan mental itu telah melahirkan ketahanan untuk menderita (Suharto, 1996:21; Madjiah, 1986:129).

Sengketa antara NICA dengan Indonesia akibat dari NICA melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Linggajati membawa kedua negara ke dalam peperangan yang hebat di beberapa kota besar di Jawa. Peperangan berlangsung selama kurang dari satu bulan. Persoalan Indonesia ini dibawa ke meja Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Keamanan pun meminta kedua belah pihak menghentikan peperangan. Pada Tanggal 4 Agustus 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan perintah menghentikan peperangan di Yogyakarta (Slamet Muljana, 2011: 119).

**Krisis Hebat Akibat Agresi Militer II**

Tanggal 18 Desember 1948 tepatnya pada pukul 11:30 malam, sepucuk surat dari pemerintah Hindia- Belanda yang disampaikan kepada Komisi Tiga Negara yang isinya menyatakan bahwa persetujuan gencatan senjata dibatalkan oleh pihak Belanda. Pemberintahuan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah Republik Indonesia yang masih berada di Jakarta. Jalur komunikasi kawat Jakarta-Yogyakarta rupanya sudah diputus malam itu juga. Oleh karena itu delegasi pemerintah Republik Indonesia atau Komisi Tiga Negara yang berkantor di Jakarta tidak dapat memberitakan isi surat tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Tanpa adanya pemberitaan lebih awal pagi hari, pukul 05.00 militer Belanda sudah bergerak dan menyerbu Yogyakarta habis habisan (Slamet Muljana, 2008: 201-202).

Masyarakat Yogyakarta tidak menduga bahwa mereka tengah menghadapi serangan mendadak. Informasi sementara yang

mereka terima Tentara Republik Indonesia akan melaksanakan latihan perang pada tanggal 19 Desember hari Minggu. Ketika bunyi ledakan bom dan rentetan tembakan terdengar di Maguwo, mereka masih mengira tentara Republik Indonesia tengah melakukan latihan perang. Mereka menghadapi *shock* yang berat saat mendapati tanda bendera Belanda yang berkibar di beberapa pesawat tempur, tank dan kendaraan-kendaraan yang melakukan konvoi. Situasi menjadi tidak terkontrol, semua lari menyelematkan diri menghindari medan perang di dalam kota. Hanya dalam satu hari Yogyakarta sudah terkepung. Pemerintah dan beberapa pemimpin negara yang berkumpul di istana segera mengambil keputusan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dikepalai oleh Mr. Sjafrudin Prawiranegara di Bukit Tinggi. Sayangnya intruksi itu tidak pernah diterima Sjafrudin. Kecuali saja, pemerintahan darurat di Sumatra dibentuk atas desakan beberapa tokoh di Sumatra yang telah menerima kabar pendudukan Yogyakarta. Sementara itu, keesokan harinya, tanggal 20 Desember 1948 Soekarno sudah memerintahkan kepada Jenderal Soedirman untuk memimpin perang gerilya di pedalaman dengan membawa beberapa pasukan yang tersisa. Dalam pertemuan yang dramatis antara seorang Kepala Negara dengan seorang pimpinan tentara, Soekarno meninggalkan pesan agar kemerdekaan harus dibeli dengan darah bukan dengan kekuatan diplomasi. Dan sekali lagi Soedirman berhasil membuktikan ketangguhan TNI dalam menghadapi Belanda. Dalam keadaan pemerintahan pusat sudah berhasil dibersihkan dengan ditangkapnya para pemimpin negara Soekarno-Hatta, Haji Agus Salim, Sutan Sjahrir, Mr. Moh. Roem,

Mr. A.G. Pringgodigdo, Mr. Assaat, dan Komodor S. Suryadarma pada tanggal 22 Desember 1948. Sementara itu Kolonel Nasution yang tengah melakukan perjalanan keliling di Jawa Timur sebagai Wakil Panglima Besar Tentara dan tutorium Jawa Tengah membentuk pemerintahan militer sementara untuk mengambil alih pemerintahan pada tanggal 25 Desember 1984 yang berlaku untuk seluruh tanah Jawa dengan persetujuan dari wakil kepala staf angkatan perang T.B. Simatupang dan Sukiman, Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah (Slamet Muljana, 2008: 202-208).

Sejak awal Belanda mengumumkan agresi militer pada tanggal 19 Desember1948 Eri Sudewo dan Jusuf Adiwinata terbang ke Banten melalui Rangkasbitung. Keduanya menemui K.H. Achmad Chatib untuk mengamankannya dari kemungkinan yang tidak diinginkan akibat tindakan militer Belanda yang sudah mengetahui ia seorang pro-Republik yang tentu saja akan menjadi target kekejaman Belanda (Else Ensering, 1995: 159). Dalam keadaan kekosongan pemerintah formal, banyak kelompok-kelompok militan yang tumbuh mengatasnamakan pengambil-alihan Pemerintahan Revolusi. Di Jawa Timur pasukan TNI tidak saja menghadapi serangan militer Belanda di kota, di pedalaman mereka berhadapan dengan tentara-tentara rakyat yang cukup ekstrem di bawah bentukan partai Murba yang dipimpin oleh Tan Malaka. Meski pun Tan Malaka memiliki alasan kuat karena memegang surat *statemen* dari Soekarno selaku Presiden RI untuk mengambil alih pimpinan revolusi, tetapi kondisinya tidak cukup menguntungkan TNI. Sedangkan TNI yang bermarkas di Jawa

Tengah mengambil jalan mundur ke Jawa Barat. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat mendapat sambutan hangat dari rakyat. Tetapi perang gerilya yang dilancarkan TNI mendapat hambatan dari anasir-anasir Daarul Islam pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat dan di Banten tidak saja Daarul Islam yang dihadapi TNI tetapi juga Pasukan Bambu Runcing pimpinan Khairul Saleh yang tidak senang dengan kepemimpinan Soekarno (Slamet Muljana, 2008: 208-209).

Pasukan TNI harus berhati-hati memasuki Banten. Tidak saja Pasukan Bambu Runcing yang mereka hadapi, di Banten pun bercokol tentara DI yang sudah berhasil menduduki beberapa desa di pedalaman Banten, utamanya di Banten Selatan. Pada tanggal 23 Desember 1948 Belanda sudah berhasil masuk ke Banten. Belanda dengan mudah menduduki kota-kota penting di Banten, seperti Serang. Pada peristiwa itu Belanda mengambil benda-benda pusaka dan benda-benda kesenian milik masyarakat Banten, bahkan sebagian ada yang dirusak. Meski begitu, rakyat Banten bersama sama dengan TNI melakukan perlawanan secara gerilya di hutan-hutan.

Rakyat bersama-sama pejabat pemerintahan mengosongkan kota-kota dan berpindah ke hutan-hutan. Para pimpinan rakyat Banten yang kebanyakan mereka para ulama seperti K.H. Achmad Chatib, K.H. Syam'un dan masih banyak lagi, mempertahankan pemerintahan daerah di hutan-hutan. Salah satu sebab Belanda menyerang Banten dengan kekuatan penuh melalui jalur darat, laut dan udara karena Banten tidak menerima putusan sidang Parlemen di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1948 yang membentuk

Wali Negara Pasundan. Memang beberapa mantan pejabat yang pernah berkiprah di Banten terlibat dalam kewalian tersebut, seperti Hilman Djajadiningrat dan R.A.A. Mukharam Wiranatakusumah seorang mantan Bupati Serang, dan melalui pemungutan suara di Parlemen, Mukharam memenangkan suara terbanyak untuk menjabat Kepala Wali Negara Pasundan dan Hilman menjabat Gubernur Jakarta Raya (Nina Lubis, Mufti Ali, dkk, 2014: 268-270).

**Laskar Bambu Runcing Mengacau di Banten**

Sejak putusan Presiden Soekarno untuk membentuk TNI agar memiliki kualitas yang memenuhi standar Internasional, para petinggi TNI kemudian melakukan rasionalisasi yang mengakibatkan beberapa laskar rakyat yang semula bernaung di bawah Tentara Republik tersisihkan karena kualifikasi-kualifikasi yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi. Brigade Gerilya Bambu Runcing adalah salah satu sayap militer rakyat yang tidak bersedia bergabung dengan TNI. Di bawah pimpinan Sutan Akbar yang juga pro kepada Khairul Saleh, Brigade ini kemudian dibentuk secara mandiri di luar TNI. Sutan Akbar membagi kekuatan Bambu Runcing ke beberapa divisi yang tersebar di beberapa daerah Banten, Bogor, Jakarta, Priangan dan Cirebon. Adapun Brigade Banten, ia maksudkan menjadi Divisi A dan dalam usaha memuluskan gerakannya, Sutan Akbar menemui K.H. Achmad Chatib sebagai Residen Banten agar mengakui dan menyetujui keberadaan divisi ini. Tapi sayang sang Residen menolak persetujuan tersebut (Else Ensering, 1995: 158).

Memasuki tahun 1948 Bambu Runcing berkembang dengan cepat dan mendapat simpatik dari beberapa laskar lokal. Dan sampai bulan Maret divisi ini telah menjadi kekuatan yang besar yang beraksi di pedalaman-pedalaman. Brigade Bambu Runcing ini telah dimanfaatkan oleh kalangan kiri yang anti Republik untuk melakukan kudeta. Banyak juga pejuang gerilya dari Karawang, Cikampek, dan Purwakarta yang bergabung dengan Bambu Runcing divisi Banten. Mereka masuk ke Banten melalu jalur Sukabumi-Pelabuan Ratu ke Banten Selatan (Melalui Malimping-Cibaliung). Ada juga yang masuk melalui jalur laut dengan menumpang kapal-kapal nelayan dan singgah di kampung-kampung nelayan (Else Ensering, 1995:158).

Berdasarkan kesaksian warga Sumur dan Cibaliung, K.H. Ahmad Chatib pernah ditawan oleh gerombolan Darul Islam yang berafiliasi juga dengan Brigade Bambu Runcing, di Leuweung Kolot yang letaknya di belakang Desa Sumur untuk kemudian dibawa ke Gunung Honje. Gerombolan yang mengatasnamakan Laskar Bambu Runcing dan dikalangan masyarakat Cibaliung laskar ini tersamarkan dengan kehadiran DI/TII. Setelah melaksanakan shalat Ashar di Masjid Al-Taqwa Sumur. Selain K.H. Ahmad Chatib yang ditawan Laskar Bambu Runcing di masa- masa pengungsiannya di pedalaman, Ahmad Patoni, K.H. Wahab (Asisten Residen Banten), Ki Sami'un ikut diculik untuk kemudian di bawah ke Dahu Cikeusik.

Peristiwa itu terjadi, menurut Ibu Rani binti Ralim (89 tahun), terjadi antara tahun 1948 atau 1949 tepatnya bulan Haji tanggal 12-13. Kehadiran Laskar Bambu Runcing di wilayah

tersebut sering kali tersamarkan dengan DI/TII, faktanya memang – berdasarkan kesaksian Ibu Rani – mereka menyebut diri DI/TII. Mereka berhasil menduduki kantor kewedanaan Cibaliung. Petugas-petugas keamanan dan beberapa tokoh masyarakat setempat dan beberapa pemuda yang dianggap menentang ditangkap dan ditahan di kantor Kewedanaan. Diantara kelompok masyarakat yang ikut ditahan antara lain Nurhani (Polisi), Caca, Lurah Dasim, Sarman. Sementara Sarman dan Dakeng dibunuh dengan tidak manusiawi karena melawan dan ada unsur dendam pribadi salah satu anggota Bambu Runcing kepada mereka.

Selama beberapa waktu di Cibaliung Laskar Bambu Runcing yang tersamarkan dengan DI/TII merekrut pemuda-pemuda setempat dan melakukan latihan militer setiap tengah malam sampai menjelang subuh. Para propagandis Bambu Runcing melancarkan propaganda negatif yang menuduh pemerintah berkhianat kepada rakyat, sedangkan TNI tidak lagi berpihak kepada rakyat dengan meninggalkan Jawa Barat. "*Tentara hideung, tentara urang*" begitu propaganda yang disuarakan oleh para pemimpin Bambu Runcing kepada masyarakat di Cibaliung. Sementara Khairul Saleh adalah pemimpinnya (Wawancara, Ibu Reni, Cibaliung, 20 Mei 2017).

Sebelum dilarikan ke Leuweung Kolot di Sumur, gerombolan Bambu Runcing, menawan K.H. Ahmad Chatib dan beberapa tokoh Banten di Cibaliung. Di antara tokoh Banten yang diculik adalah K.H. Ahmad Chatib, Ahmad Fatoni, Yusuf Martadilaga dan Abdul Wahab. Ketiganya disekap dengan tangan tetap terikat di atas kursi di sebuah rumah milik Ki Soleman,

Lurah Cihanjuang (dulu dikenal dengan nama Desa Blimbing). Untuk mengecoh jejak pengejaran yang dilakukan TNI, ketiga tawanan tersebut dipisahkan, Yusuf Martadilaga, Ahmad Fatoni dan K.H. Abdul Wahhab ditinggal di tempat Cihanjuang sedangkan K.H. Ahmad Chatib dibawa ke Cikeusik. Ahmad Fatoni dan Yusuf Martadilaga dibunuh dan dimakamkan di Hanjuang (Sekarang sudah dibangun monument).

Jauh sebelum peristiwa penculikan keempat tokoh Banten, Khairul Saleh diketahui melakukan kunjungan secara aktif dan menyebarkan propaganda kepada masyarakat Cigeulis sampai Sumur. Di antara propaganda yang disebarkan ke tengah masyarakat adalah cita-cita akan berdirinya negara Islam sudah dekat jika rakyat mau mendukung perjuangan DI/TII melawan pemerintah yang resmi. Tanggal 11 bulan Haji, setelah mengetahui ada pergerakan pasukan TNI dari Serang dan beberapa kekuatan juga bergerak dari Pangandaran yang baru tiba dari Yogyakarta, pasukan Bambu Runcing mulai bergerak meninggalkan Cibimbing pada pukul 4 sore menuju Situ Potong. Tapi pergerakan mereka bergerak lamban, di Situ Potong TNI sudah berhasil menyergap mereka dan sempat terjadi kontak senjata di Situ Potong. Karena mereka terdesak TNI, pasukan Bambu Runcing mundur ke Pasir Eurih. Pada pukul 11 malam TNI kembali memberikan tekanan kepada pasukan Bambu Runcing yang tersamarkan dengan DI/TII. Di Pasir Eurih kembali terjadi kontak senjata antara kedua belah pihak. Bambu Runcing DI/TII tidak dapat menandingi perlawanan TNI yang memiliki persenjataan dan personel yang

lebih lengkap, Laskar Bambu Runcing dan DI/TII akhirnya dapat dikalahkan (Wawancara, Madsupi, Cibimbing, 20 Mei 2017).

Penculikan ini berhasil ditaklukan oleh TNI Banten di bawah komando K.H. Syam'un yang sudah menjabat sebagai Bupati Serang saat itu. Perlawanan Bambu Runcing terakhir di Gunung Honje, mereka menyerah telak kepada TNI setelah terpojok di sebuah gua dan menyerahkan K.H. Ahmad Chatib dalam kondisi selamat (Wawancara dengan Muhamad Azhari bin H. Acang, (60 th) dan Muhamad Fatah bin Mad Hadi, Sumur, 23 Maret 2015).

# BAB VI

## Belanda Menyerang ke Serang

Banten, suatu daerah yang awalnya tidak diserang dan diduduki Belanda melalui Agresi Militer pertamanya, akhirnya diserang juga oleh tentara Belanda. Serangan terhadap Banten dilakukan oleh pasukan Brigade Infanteri I Divisi 7 Desember yang berkekuatan sekitar 1.000 personil di bawah pimpinan Kolonel Blanken, tentara Belanda bergerak dalam dua tahap. *Pertama*, mereka secepat mungkin menyerbu dengan mengikuti jalan raya untuk menduduki kota-kota dan pusat-pusat perhubungan. Pada tahap *kedua* mereka melancarkan operasi pembersihan kekuatan TNI sektor demi sektor. Selanjutnya, membentuk pemerintahan sipil dan merehabilitasi jalan yang rusak (Suharto, 1996: 6)

Pertahanan TNI di Banten sudah mulai melemah dan mengikuti intruksi panglima TNI tertinggi, Soedirman, untuk melakukan perlawanan gerilya semesta, TNI mundur ke pedalaman. Brigade Infantri I Divisi 7 Desember di bawah komando Kolonel Blanken yang berkekuatan 1000 tentara mendesak pertahanan TNI di perbatasan Banten.

Pasukan Belanda memasuki kota-kota dari mulai Tangerang melalui jalan kota untuk menyisir pos-pos pertahanan TNI. Target utamanya menduki pusat-pusat kota yang menjadi basis pertahanan TNI, Balaraja, Mauk sampai Cikande setelah kota-kota berhasil mereka duduki, mereka menguasai pusat-pusat perhubungan dan komunikasi yang ada

di kota untuk menekan sisa-sisa kekuatan di bagian dalam melalui informasi yang mereka sebar dari pusat-pusat perhubungan itu. Kemudian mereka melumpuhkan dan membersihkan kekuatan TNI sektor demi sektor (Machmud Bachtiar, 2014: 294). Strategi Belanda berhasil memenangkan tekanan demi tekanan, seperti tidak ada perlawanan berarti dengan cepat Belanda mampu masuk ke Banten.

Tanggal 23 Desember 1948 hari yang cukup menegangkan bagi TNI dan rakyat Banten. Bataliyon pertama dengan kekuatan penuh telah tiba di Tangerang melalui jalur laut dan berhasil masuk ke Tangerang pada pukul 06.00. Satu Bataliyon Infanteri yang didukung Artileri Medan, satu pleton Mitraliur, dua pleton Zeni, dan satu kompi angkutan bermotor dengan skuadron lapis baja. Bataliyon ini bertugas untuk menyisir jalan raya menuju Serang.

Satu bataliyon lainnya masuk melalui Mauk terus ke barat menuju Jenggot, lalu membelok ke selatan menuju Balaraja terus ke Keresek mengepung kota. Pertempuran terjadi di Balaraja, pasukan Jaelani yang mendapat perintah menghambat laju pasukan Belanda gagal dan tertekan oleh peperangan yang tidak seimbang, Kolonel Jaelani pun ditangkap (Machmud Bachtiar, 2014: 294).

Pada hari itu juga, pukul 09.00 pasukan Belanda sudah berhasil masuk Serang melalui Ciruas dan Pontang. Kini kekuatan Belanda didukung dengan kekuatan pesawat militer. Mereka menjatuhkan selebaran di Pasar Royal dan di depan asrama sekolah guru sambil menembaki dengan senjata mesin.

Pukul 12.00 konvoi tentara Belanda berhasil masuk ke pusat kota Serang dengan panser diikuti tank baja, mobil-mobil pengangkut tentara dan pengangkut peralatan perang. Pendopo Bupati Serang dihujani dengan tembakan mesin. Karena Belanda tahu ada sisa kekuatan inti di komplek itu yang masih bertahan. Perlawanan pun sempat diberikan oleh sisa kekuatan yang ada di komplek itu. Perang singkat pecah sampai pukul 15.00 (Machmud Bachtiar, 2014: 296).

Pada hari itu Bupati dan Residen Banten sudah mendapat laporan akan adanya pergerakan tentara Belanda menuju Serang dari Tangerang. Mereka bersama beberapa personel pejabat melakukan musyawarah di Gedung Dewan. Selain K.H. Syam'un dan K.H. Achmad Chatib yang hadir saat itu, Tb. Joesoef Adiwinata dan Tb. Soeria Atmadja masih hadir dalam ruangan tersebut. Rapat yang akan mengambil keputusan strategis dan taktik perang berjalan tegang karena Belanda sudah mengepung tempat itu. K.H. Achmad Chatib berhasil diloloskan ke gedung Komando Tirtayasa sebelum Belanda tiba. Tinggal dua orang pemimpin yang bertahan di gedung tersebut, K.H. Syam'un dan Tb. Oeding Soeria Atmadja.

Dengan diam-diam keduanya berhasil menyelinap ke Pendopo Bupati bermaksud menyelamatkan istri Bupati, Nyai Hasunah yang terjebak di Pendopo. Nyi Hasunah dengan cekatan mengganti baju K.H. Syam'un yang masih mengenakan pakaian dinas. Kini K.H. Syam'un sudah mengenakan pakaian biasa agar tidak dikenali Belanda, keduanya meyakini Belanda sebenarnya tidak begitu mengenal sosoknya secara persis.

Ketiganya pun ditawan Belanda tanpa perlawanan di gedung pendopo sampai pukul 14.00 (Machmud Bachtiar, 2014: 297).

**Lolos dari Sanderaan Belanda**

Pada masa Agresi Militer Belanda II, kiprah K.H. Syam'un yang berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Bupati Serang. Ketika pasukan Belanda datang ke Serang, Kolonel K.H. Syam'un, Patih Serang, Tb. Soeria Atmadja, dan beberapa pegawai lainnya terkurung di kantor Kabupaten Serang. Pada malam harinya, kedua pejabat, yaitu K.H. Syam'un dan Patih Soeria Atmadja dapat meloloskan diri dengan berpura-pura mengeluarkan mayat seorang perempuan pembantu K.H. Syam'un di dapur yang terkena peluru nyasar dari dalam rumah. Oleh pimpinan pasukan Belanda Jenderal Stoot Troep diizinkan (Permana: 2017:109-110; Machmud Bachtiar, 2014: 300).

Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh K.H. Syam'un dan Patih Soeria Atmadja untuk meloloskan diri menuju Tanjung, yaitu ke rumah Patih dekat penjara Serang dan bermalam di sana. Pada pagi harinya K.H. Syam'un pamit kepada patih melalui jalan samping kantor Kabupaten Serang (yang sekarang diberi nama Jalan Brigadir Jenderal K.H. Syam'un) melalui jembatan Kaujon dan terus ke Gunung Sari. Sementara Nyi Hasunah bersembunyi di rumah koleganya bernama Tuti Alawiyah atau Mastara Kabran (Machmud Bachtiar, 2014: 298).

Di Gunung Sari K.H. Syam'un bergabung dengan komando gerilya militer Sektor I Ali Amangku sesuai dengan rencana pelarian yang sudah disusun sebelumnya. Rahmatullah

Syam'un ikut serta ayahnya bergerilya. Perjalanan dilanjutkan bersama komando gerilya sektor I ke Gunung Cacaban di Anyer melalui Mancak untuk menggabungkan diri dengan kaum gerilyawan di peleton Anyer meliputi daerah Merak yang dipimpin oleh Letnan Muda Chaidir (Majalah Merdeka, 22 Januari 1949:5, Matia Madjiah, 1986:180; Machmud Bachtiar, 2014: 300)[2].

Pagi harinya Belanda menuju Pesantren Al- Khairiyah Cilegon (pesantren lama), dengan menggunakan mobil Bupati Serang, tujuannya untuk mengetahui keberadaan KH. Syam'un. namun sayang sekali tidak dapat ditemukan keberadaannya. Sewaktu Belanda ke Al-Khairiyah, ada seorang santrinya yang berasal dari Palembang yang mendekati mobil Belanda yang dikira oleh santri tersebut adalah K.H. Syam'un, santri tersebut ditembak oleh Belanda. Setelah penembakan, santri yang lain dan guru-guru langsung berlarian (Wawancara dengan Nawawi, 25 Mei 2018). Di dorong oleh semangat juang dan rasa nasionalismenya yang tinggi, K.H. Syam'un akhirnya berangkat dari Serang bersama 13 orang lainnya pergi ke Gunung Sari (Taktakan) untuk ikut bergerilya, dimana di wilayah itu sedang terjadi pertempuran sengit. Dari Tanjung kemudian ke jurusan daerah Anyer tepatnya Gunung Cacaban dengan melalui jalan Mancak dan ia di sana ia bertemu dengan H Sahim, salah seorang muridnya dari Al-Khairiyah.

---

[2] Lihat Lampiran II

K.H. Syam'un bertemu dengan gerilyawan di Gunung Cacaban. K.H. Syam'un tidaklah merasa pesimis untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Banten, yang akhirnya K.H. Syam'un bergabung dengan gerilyawan di peleton Anyer untuk ikut bergerilya dan mengangkat senjata. Di gunung Cacaban (Anyer) ini, beliau bergerilya melawan Belanda selama 40 hari yakni sekitar tanggal 22 Januari- 2 Maret 1949, pertempuran terjadi di Pasir Gadung (Wawancara dengan Nawawi Sahim, 20 Januari 2017; Machmud Bachtiar, 2014: 300).

Perintah gerilya Desa ini merupakan kewajiban seluruh patriot Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikeluarkan atas intruksi Panglima Komando Jawa yakni Kol A.H. Nasution. (lihat sumber: Intruksi pasukan Gerilya Desa No. 11/MBKD/49, 25 Januari 1949. Terdapat pada Himpunan Intruksi Pemerintah Militer dari Panglima Tentara dan Teritorium Djawa 1948-1949. Koleksi Markas Besar Angkatan Darat Bandung).

**Menjelang Wafatnya Brigjen K.H. Syam'un**

Pada usia ke 56 K.H. Syam'un meninggal dunia di gunung Cacaban Anyer, ketika ia bergerilya di gunung Cacaban (setelah surut 40 hari, bergerilya selama tanggal 22 Januari-1949, ia berangkat dari Serang sampai tanggal 1 Maret 1949 di gunung Cacaban). Sedangkan rute jarak yang ditempuh oleh K.H. Syam'un mulai dari Serang menuju ke Gunung Cacaban sekitar 10 km. Dapat dijelaskan disini berdasarkan hasil wawancara

Mufti Ali dengan Nawawi Sahim 28 Mei 2018, bahwa sebab meninggalnya K.H. Syam'un yakni selama dua hari berjalan kaki untuk semangatnya bergerilnya menuju Gunung Cacaban Ayer, ia kelelahan dan juga terkena penyakit cacar lalu beliau beristirahat di Gunung Cacaban Anyer. Selama empat hari K.H. Syam'un sakit (27 Pebruari-2 Maret 1949), ditemani oleh istrinya yang ada di Kamasan Anyer bernama Hj. Hasun. Akhirnya pada tanggal 2 Maret 1949 M/1 Rajab 1468 H, pukul 04.45 pagi K.H. Syam'un meninggal dunia. Pada siang hari sekitar pukul 14.00 oleh rakyat dan pasukan gerilyawan daerah peleton Anyer K.H. Syam'un dimakamkan di sana dengan upacara yang sederhana (Permana, 2017: 111).

Kabar wafatnya K.H. Syam'un kemudian di ketahui oleh pimpinan pasukan Belanda Jenderal Spoor, dan untuk memastikan kematiannya, Jenderal Spoor berniat untuk menggali makam K.H. Syam'un, namun oleh masyarakat tidak diizinkan (Nawawi Sahim berdasarkan cerita orang tuanya (Kyai Sahim sebagai murid K.H. Syam'un) yang ikut bergerila di sana dan menyaksikan langsung pada waktu wafatnya K.H. Syam'un di gunung Cacaban). Dapat dijelaskan pula bahwa K.H. Syam'un sebelum meninggal dunia, beliau kepada yang hadir di sana (Gunung Cacaban anyer), menitipkan beberapa wasiat yakni:

1. Menitip anak-anak K.H. Syam'un supaya dijaga,
2. Menjaga Panji Al-Khairiyah (dalam hal ini Pesantren Al-Khairiyah yang telah beliau dirikan), dan
3. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia (Nawawi Sahim, 2017).

**Penghargaan Pemerintah**

Setelah 51 tahun wafatnya K.H. Syam'un, Pemerintah Indonesia menganugrahinya penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Maha Putra Utama dari Presiden RI ke-5 K.H. Abdurahman Wahid berdasarkan dengan nomor 2981/II/2000. Tanda Kehormatan ini diberikan berdasarkan Kepres RI nomor 119/TK/Th. 2000 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2000. Sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan Negara kepada warganya atas jasanya yang sangat luar biasa kepada Negara dan Bangsa. Piagam penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden RI kepada salah satu cucu K.H. Syam'un, K.H. Fathullah Syam'un, di Istana Negara bertepatan dengan hari Pahlawan Nasional,10 November 2000. Pada saat yang sama Presiden RI ke-5 juga menganugerahkan penghargaan serupa kepada Ki Wasid yang diterima oleh K.H. Mansyur Muhyidin, cicit dari Ki Wasid (Mufti Ali, dkk., 20015: 261-262).

Dalam perjalanan waktu pemerintah Provinsi Banten sudah berulang kali mengajukan K.H. Syam'un untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional, namun penghargaan tersebut tak kunjung diberikan (Mufti Ali, Rahayu Permana, dan Farhan al-Fuadi, 2018: 181). Tahun 2015 Laboratorium Bantenologi melakukan riset guna menyusun naskah kademik usulan Pahlawan Nasional untuk K.H. Syam'un, namun belum membuahkan hasil. Tahun 2017 kembali diusulkan, dan tetap belum mendapat respon. Bulan Mei 2018 Presiden RI Joko Widodo berkunjung memenuhi undangan PB Al- Khairiyah pada saat memperingati hari lahir Al-Khairiyah 11 Mei 2018.

Pada momen tersebut, Pengurus Al- Khairiyah menyampaikan aspirasinya agar K.H. Syam'un segera ditetapkan Pahlawan Nasional. Jokowi menyambut aspirasi tersebut dan berjanji akan memenuhi permintaan tersebut jika persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi. Sampai hari itu, Jokowi mengaku dirinya belum menerima berkas usulan Pahlawan Nasional atas nama K.H. Syam'un sejak tahun 2017 (Mufti Ali, Rahayu Permana, dan Farhan al-Fuadi, 2018: 184).

Makam K.H. Syam'un di Kamasan Anyer Serang

(Sumber: Koleksi pribadi)

Menyambut statemen Presiden Joko Widodo keluarga besar Al-Khairiyah segera merencanakan membentuk tim yang akan menangani usulan Pahlawan Nasional untuk K.H. Syam'un (Mufti Ali, Rahayu Permana, dan Farhan al-Fuadi, 2018: 184; merdeka.com.,11/05/2018). Beberapa bulan setelah

pertemuan tersebut Pemerintah Kabupaten Serang mulai memiliki kesibukan untuk mempersiapkan Naskah Akademik usulan Pahlawan Nasional untuk K.H. Syam'un. Media Radar Banten menurunkan berita tanggal 14 September 2018 dengan tajuk *"Selangkah Lagi,*

*K.H. Syam'un Jadi Pahlawan Nasional"*. Dalam artikel tersebut dikabarkan Pemkab Serang melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali mengusulkan Brigjen K.H. Syam'un bisa meraih gelar Pahlawan Nasional. Kepala Dinsos Kabupaten Serang Ahmad Saefudin menjelaskan kepada Radar Banten, Tim dari Kemensos sudah melakukan survey kepada keluarga besar K.H. Syam'un untuk mengkroscek kelayakan usulan Pahlawan Nasionalnya. "Sekarang tinggal menunggu keputusan saja dari Kemensos terkait penobatan Brigjen KH Syam'un sebagai Pahlawan Nasional," terangnya. Karena memang seluruh berkas persyaratan dan kelengkapan dokumen usulah Pahlawan Nasional seperti diakui disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial pada Dinsos Kabupaten Serang Sri Rahayu Basukiwati sudah lengkap (www.radarbanten.co.id., 4/09/2018).

Naskah akademik usulan Pahlawan Nasional kembali disusun dalam kurun waktu 27 Mei-15 Juni 2018. Merujuk kepada catatan revisi dari Kemensos Pusat, tim melengkapi naskah ini dengan memuat data-data baru yang diakses dari ANRI, Perpusnas, Museum Proklamasi dan Disjarah TNI AD Bandung. Naskah ini merupakan *addendum* untuk naskah akademik yang pernah digarap oleh Tim Riset Bantenologi tahun 2014 yang sudah mengalami revisi di tahun 2015 (Mufti

Ali dan Rahayu Permana, 2018: viii). Akhirnya atas peran dan jasanya kepada Bangsa dan Negara, K.H. Syam'un ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi pada 8 November 2018 (historia.id.).

Setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional yang diserahkan pada Hari Pahlawan tanggal 10 November 2018 di Istana Negara, Pemkab mempublikasikan buku *Selayang Pandang Jejak Perjuangan Brigjen K.H. Syam'un, Pahlawan Nasional dari Banten*. Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, saat acara Gelar Pahlawan Nasional dan peluncuran buku tersebut di Aula Tb. Suwandi, Pemkab Serang, Kamis, 28 Maret 2019, mengeluarkan statemen, pihaknya akan menjadikan buku selayang pandang ini sebagai buku wajib bagi anak-anak sekolah dari SD sampai SMP. Hadir pada acara itu Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang Ahmad Saefudin, tokoh Banten Nasrudin Busro, penulis buku Mufti Ali dan Rahayu Permana, perwakilan keluarga dan para santri Al-Khairiyah. Pandji Tirtayasa mengatakan, buku tersebut bisa menjadi pedoman bagi generasi berikutnya khususnya warga Banten agar mengetahui pahlawannya. Ke depan pihaknya akan memerintahkan Dinsos dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah agar membeli buku ini. Kemudian didistribusikan kepada seluruh SD dan SMP (https://khazanah.republika.co.id.,28 /03/2019).

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku dan Makalah**


Ali, Mufti, *dkk,* Biografi KH. Syam'un (1893-1949), (Serang: Dinas kebudayaan dan Lab. Bantenologi, 2015.)

Ali, Mufti, *dkk,* Selayang Pandang Jejak Perjuangan KH. Syam'un Pahlawan Nasional Dari Banten, (Serang: FTK Banten Press dan Yayasan Bhakti Banten, 2018.)

_____, *Tahanan Banten di Boven Digul (1927-1942),*(Serang: Puslitpen LP2M UIN SMHB, 2017)

As'ad, Saleh, "Pahlawan dan Tindak Kepahlawanan", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Perjuangan Brigjen KH. Syam'un, (Serang: Dinas sosial, 2014)

Bachtiar, Mahmud, *Kepemimpinan K.H. Syam'un (Tokoh Agama, Pendidikan dan Militer Serta Perannya Dalam Perubahan SDM di Banten),*Desertasi Pascasarjana, (Jakarta: UNJ, 2014)

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Indonesia,* (Bandung: Mizan, 1999)

Caldwell, Malcolm dan Ernst Utrecht, *Sejarah Alternatif Indonesia,*(Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe, 2011)

Djajadiningrat, P.A. Achmad, *Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat,* (Jakarta: Paguyuban Keturunan P.A. Achmad Djajadiningrat,1996)

Disjarahdam VI/Siliwangi, *Siliwangi Dari Masa Ke Masa*, Bandung, (Angkasa, 1979).

Ensering, Else, *Banten in Time of Revolutions, in Banten DineRegion,* in Archipel, vol.50.1995.

Gesink, Indira Falk, *Reform and Conservatism al-Azhar and The Evolution of Modern Sunni Islam,* (London: Tauris Academics Studies, 2010)

Hakim, Lukman, *Banten Dalam Perjalanan Jurnalistik,*

(Pandeglang: Banten Heritage, 2006)

Herawan, Irwan, *Lubang Tambang Batu Bara Bayah: Jejak Ramusha di Banten Selatan,* http://kapata-arkeologi.kemendikbud.go.id.

Lubis, Nina H., *Sejarah Banten: Membangun Tradisi dan Peradaban,* (Serang: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, 2014).

Madjiah, Matia, *Kisah Seorang Dokter Gerilya dalam Revolusi Kemerdekaan di Banten*, (Jakarta, Sinar Harapan, 1986).

Maftuh, *Lembaga Pendidikan al-Khairiyah di Banten 1916- 1942*, Disertasi, (Yogyakarta: UGM, 2015)

Mansur, Khatib, *Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi*, (Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2001).

Michrob, Halwany, dan A. Mudjahid Chudori, *Catatan Masa Lalu Banten*, (Serang: Saudara, 1993)

Muljana, Slamet, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan,* (Yogyakarta: LKiS, 2008)

Muhyidin, Mansyur, "Karya Seorang Prajurit Asal Banten (KH. Syam'un)", Yayasan Al-Khaeriyah Citangkil Cilegon, *Kumpulan Pengalaman Anak-anak K.H. Syam'un*, (Cilegon: Yayasan al-Khairiyah, 1990).

Nata, Abudin, *Sejarah Pendidikan Islam dari Era Klasik sampai Era Modern,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)

Notosusanto, Nugroho, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia,* (Jakarta: Gramedia, 1979)

Pengurus Besar Perguruan Islam Al-Khaeriyah, *Perguruan Islam Al-Khaeriyah Dari Masa Ke Masa,* (Cilegon, Yayasan Al-Khaeriyah Citangkil, 1984).

Permana, Rahayu, *KH. Syam'un Gagasan dan Perjuangan 1893-1949*, (Yogyakarta, Ejapublisher, 2017).

Putuhena, Muhamad Saleh, *Historiografi Haji Indonesia,* (Yogyakarta: LKiS, 2007)

Richlefs, C.M., *Sejarah Indonesia Modern,* (Yogyakarta: UGM Press, 2011)

Soenji, T, dkk, *Sejarah Perjuangan Brigade Tirtayasa di daerah Banten 1945-1950*, (Serang: Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia, 1980)

Suharto, Dinamika Suatu Daerah Terisolasi (Banten, Antara Dua Agresi Militer Belanda), L*aporan Hasil Penelitian*, (Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996)

_____,Banten Masa Revolusi, 1945-1949, Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, (Depok: Fakultas Sastra, 2001).

Supriatna, Nana dan Wiyanarti, Erlina. (*ed*). *Sejarah Dalam Keberagaman*. (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 2013).

Williams, Michael Charles, *Communism, Religion and Revolt in Banten*, (Ohio: Ohio University Center for International Studies, 1996)

Yayasan gedung Arsip Nasional RI, *RI: Napak Tilas Persahabatan*, (Jakarta, Yayasan Gedung Arsip Nasional RI, 2009).

Yoesoef, H. M., *Riwayat Hidup Kiyai H. Mas Muhamad Arsyad Thawil*, (Cilegon: Yayasan Pendidikan al- Chasanah, 2014)

Nationaal Archief, Den Haag, Belanda Afschrift no. 173/geheim Eigenhandig, Nationaal Archief De Haag

**Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta**

Gunseikanbu 2604. Koleksi Arsip Pendaftaran Orang Indonesia Jang Terkemoeka Jang ada di Djawa, no. inventaris 75.

Pimpinan Umum Kementerian Penerangan kepada Menteri Pertahanan surat tanggal 3 Mei 1947, tentang Laporan Hasil Peninjauan dan Penyelidikan di Daerah Keresidenan Banten. Koleksi Arsip Kementerian Pertahanan 1946- 1949, no. inventaris 1694.

Surat H. Syam'un kepada Mahkamah Tinggi Tentara, surat tanggal 14 April, tentang Tahanan-Tahanan Penjara di Rangkasbitung. Koleksi Arsip Kementerian Pertahanan 1946-1949, no. inventaris 1689.

Surat Perintah Presiden RI Panglima Tinggi Angkatan Perang, tanggal 6 Desember 1947 Pengangkatan Opsir Seluruh APRI hanya dilakukan oleh Presiden RI atau Menteri Pertahanan. Koleksi Arsip Kementerian Pertahanan, no. inventaris 212.

Surat Wakil Presiden RI kepada Kolonel Hidayat Kepala Staf Divisi I Siliwangi TNI AD: Surat perintah tanggal 24 Februari 1948 tentang Kerusuhan di Banten. Koleksi Arsip Sekretariat Negara RI 1945- 1949, no. inventaris 935.

## Arsip Disjarah Angkatan Darat Bandung

Divisi I Banten Komandemen Jawa Barat, Periode 1 Oktober 1945-19 Mei 1946. Koleksi Dokumen Organisasi Badan Perjuangan di Jawa Barat 1945- 1949, no. inventaris 15.

Reorganisasi Divisi Siliwangi Tanggal 20 Mei 1946. Koleksi Dokumentasi Organisasi Badan Perjuangan Jawa Barat 1945-1949, no. inventaris 15.

Reorganisasi Divisi Siliwangi tanggal 15 Maret 1947. Koleksi Dokumentasi Organisasi Badan Perjuangan Jawa Barat, 1945-1949, no. inventaris 15.

Siliwangi Penjelmaan dari Divisi I, II (sebagian) dan Divisi III Komandemen Jawa Barat, Mei 1946- Februari 1948. Koleksi Dokumentasi Organisasi Badan Perjuangan Jawa Barat 1945-1949, no. inventaris 15.

Intruksi Pasukan Gerilya Desa No. 11/MBKD/49, 25 Januari 1949, Himpunan Intruksi Pemerintah Militer dari Panglima Tentara dan Teritorium Djawa 1948-1949. Koleksi Markas Besar Angkatan Darat Bandung.

**Arsip Yayasan Pembela Tanah Air, Serang**

M. Soekarahardja, *Catatan Pengalaman Perjuangan Pribadi sebagai ajudan Brigjen K.H. Syam'un*, tanggal 6 april 1982.

**Koran Sezaman**

*Asia Raja, Harian, Djakarta, 2602-2605 (1942-1945).*

*Berita Indonesia, 1945.*

*Merdeka, Harian, Djakarta, 1945-1949.*

*Merdeka, Madjallah Berita Mingguan, Djakarta, 1949-1950. Soeara Merdeka, Djakarta, 1947-1949*

*Sinpo, Jakarta, 1945-1946*

*Kedaulatan Rakjat, Harian, Djakarta.1945-1946 Pikiran Rakyat, Harian, Bandung, 30 Juli 1978 Kompas, Harian, 30 Juli 1978*

*Kompas, Harian, 10 Juli 1988*

*Kompas, Harian, 11 Juli 1988*

**Media Online**

*Pemkab Jadikan Buku K.H. Syam'un Bacaan Wajib Anak Sekolah*, https://khazanah.republika.co.id.,28 /03/2019

*Jokowi janji beri KH Syam'un gelar pahlawan nasional*

www.radarbanten.co.id., 4/09/2018

*Jokowi janji beri KH Syam'un gelar pahlawan nasional*,

www.merdeka.com., Jumat, 11 Mei 2018

Hendaru Tri Hanggoro, *KH Syam'un, Pahlawan Nasional dari Banten*, https://historia.id.

*Bupati Tatu dan Pejabat Pemkab Serang Ziarah ke Makam Brigjen K.H. Syam'un*, https://bantenhits.com/2019/10/08.

*Bupati Serang Minta Kades Sosialisasikan Brigjen KH Syam'un sebagai Pahlawan Nasional*, https://www.kabar-banten.com/08/10/2019.

**Wawancara**

K.H. Fatullah Syam'un (Alarhum) putra K.H. Syam'un, di

Cilegon, 18 Februari 2003

Rahmatulah Syam'un (Almarhum), putra K.H. Syam'un, di Cilegon, 1990.

Nawawi Sahim, Putra dari K.H. Sahim di Cilegon 28 Mei 2018).

Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A, MM, Serang, 14 April 2014.

Solihin, Tegal, 2 Mei 2014.

M. Asikin, Tegal, 2 Mei 2014.

Fuad Bakri, Jakarta, 26 Februari 2018.

Muhamad Azhari bin H. Acang, Sumur, 23 Maret 2015 Muhamad Fatah bin Mad Hadi, Sumur, 23 Maret 2015 Ibu Reni (89 tahun), Cibaliung, 20 Mei 2017.

# INDEKS


## A

Achmad Djajadiningrat · 17, 144
Agus Padmanegara · 98
Ali Amangku · 61, 70, 73, 76, 79, 80, 81, 82, 91, 99, 103, 136
Amir Syarifudin · 87, 108
Angkatan Pemuda Indonesia · 70, 76
Anyer · 3, 4, 6, 55, 61, 64, 65, 93, 95, 97, 112, 120, 137, 138, 141

## B

Badan Keamanan Rakyat · 77
Banten · 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81,83, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 156, 158, 159, 160, 161
Beji · 3
Belanda · xv, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 38, 39, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 67, 71, 86, 87, 88, 91, 97, 98, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 115, 117, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 147, 158,159
*Bestuur* · 17
Bojonegara · 3
Brigade Tirtayasa · 35, 108

## C

Caringin · 4, 6, 19, 69
Ce Mamat · 70
Cilegon · 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 50, 90, 120, 137, 146, 147, 151, 160

## D

Dr. Louis Bell · 106
Dudung Padmasukarta. · 91

## E

Entol Teryana · 71, 72
*Europian centris* · 2

## G

Geger Cilegon · 1, 22

GPII · 34
Gunung Cacaban Ayer · 139

## H

Haji Abdulhalim · 9
Haji Alwijan · 3
Haji Misbach · 98
Haji Sapiudin · 9
Haji Yasin · 3
Hindia Belanda · 1, 7
*Hizbullah* · 112
*hongerudde* · 121

## I

Inggris · 82, 85, 86, 88, 104, 105, 109, 159

## J

Jakarta · x, 28, 29, 46, 47, 60, 64, 70, 71, 73, 75, 82, 85, 87, 88, 91, 92, 114, 115, 121, 124, 127, 128, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 160
*Jam'iyyah Nahdat asy-Syuban al-Muslim* · 44
Jama'ah Setia Pelajar · 13
Jao van den Bosc · 4
Jawa Barat · x, 22, 28, 29, 45, 47, 56, 80, 90, 96, 114, 115, 127, 130, 148, 149
Jepang · xiii, xiv, 28, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 88, 90, 94, 96, 97, 98, 104, 146, 156
*Joyoboyo* · 69

## K

K.H. Abdul Fatah Hasan · 21
K.H. Ahmad ibn Rafi' · 10
K.H. Jasim Kamasan · 11
K.H. Syam'un · vi, xiii, xiv, xv, 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 43, 44, 51, 52, 53, 57, 61, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 89, 90, 91, 93, 95, 99, 102, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 127, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 161
Kairo · 12
KH Syam'un · 79, 80, 92, 110, 111, 116, 117, 142
KH. Syam'un · 2, 3, 10
Khairul Saleh · 127
Ki Wasid · 3, 7
Kolonel Agoes Djajaroekmantara · 80
Krakatau · 3

## L

Lampung · 13, 22, 27, 28, 29, 44, 47, 97, 117, 161
Laskar Bambu Runcing · 129
Laskar Gulkut · 100
Louis Mounbatten · 86

## M

Madrasah Daarul Ulum · 10
Madrasah Shaulatiyah · 9
Manila · 4
Martin van Bruinessen · 9
Mekah · 8
Mesir · 12
*Mijnbouw Maatschappy Zuid Bantam* · 67
Mohamad Arif Siregar · 94
MPRS · 40

## N

NEFIS · 30
NICA · 88, 92
Nusantara · 8, 9, 10, 12, 13, 23, 161

## O

Oeding Soeria Atmadja · 135
ORIDAB · 123

## P

Pangeran Dipenogoro · 1
PPKI · 74
Princes Welhelmina · 3
PT Krakatau Steel · 18

## R

Raden Oskar · 94
*Ramusha* · 67
Residen Banten · 53, 57, 76, 95, 98, 101, 102, 117, 128, 129, 135, 159
Roem · 87

## S

Samanhudi · 65
Serang · ii, iv, vi, vii, viii, ix, x, xv, 6, 13, 33, 34, 47, 56, 61, 64, 65, 69, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 107, 110, 111, 112, 116, 117, 119, 120, 121, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 159, 161
Shaulatiyah asal Nusantara · 9
Siti Hajar · 3
Soekarno · 39
Soeria Atmadja · 136
Spoor · 139
Suq Lail- Mekah · 10
Syekh Ahmad Khatib · 12
Syekh Ismail Abdul Muthalib · 12
Syekh Musyadad · 9
Syekh Nawawi · 12

## T

Tan Malaka · 71, 94, 126
Tanjung Priok · 3

Tirtayasa · 116
TKR · 88
Trikora · 40

## U

Uni Sovyet · 39
Universitas al-Azhar · 11

## V

Van Mook · 106

## W

W.H. Besse · 4

Lampiran I

Merdeka

Rakjat Banten siap memperlahankan Kemerdekaan Indonesia

Kesedjahteraan Presiden dan Wakil Presiden di Banten

Dari sana-sini

Karoseberi di Djem

Kahar pindah kebeur kota

Nonja Presiden berbijan

Kembali ke Djakarta

MENOENTOET KEADILAN

*Koran Berita Indonesia, No. II Tahunke I, Tentang rakyat Banten dengan Jepang. 18 Oktober 1945*

Demikian pula dengan Sumatera Selatan, Bangka, Djawa Timur dan Madura. Orang² jang diwakilkan untuk daerah ini adalah pemimpin² jang belum dapat dikatakan mempunjai ketjerdasan politik jang sangat tinggi. Djuga boleh dikatakan mereka itupun berpedoman pada gerak.gerik Astil. Agung dimasa lampau.

Akan tetapi lain kendaannja dengan Sumatera Timur. Sebagaimana diketahui daerah ini diwakili oleh orang² dari kalangan feodal dan kapita'. Kerakjatan di Sumatera Timur adalah sesuatu jang tidak bisa dilihat dalam pemerintahannja.

Inilah jang mendjadi sebab maka sikap mereka selalu tampak sangat reaksioner. Malahan kan djalan jang telah ditempuhnja.

Setibanja di Indonesia dari tanggal 6 Djanuari sampai tanggal 10 Djanuari belum ada jang bisa dilakukannja selain dari berunding² dengan Wakil Mahkota dan pemerintah federal. Baru pada tanggal 11 Djanuari diadakan permusjawaratan dengan negara² bagian, sedang NIT dan Pasundan diwaktu itu belum lagi mempunjai kabinet.

Sementara itu tentu bukan tidak mungkin terdjadi, bahwa ada dilakukan tekanan kepada wakil² negara supaja kabinetnja masing² dapat diadjak mendjalankan apa jang direntjanakan oleh Belanda.

untuk kepentingan perdjuangan kemerdekaan.

**Hasil besar**..... Permusjawaratan ini kemudian menelorkan „hasil besar" jang dinamakan Resolusi BFO tanggal 13 Des. Bunjinja:

„Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal jang bersidang pada tg. 13 Djanuari di Djakarta.

berkehendak agar selekas mungkin, dengan djalan jang damai, dibentuk Negara Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat, menjatakan pendapatnja:

1. bahwa sangatlah perlunja membentuk Pemerintah Federal Nasional untuk seluruh Indonesia, sebagai azas (beginsel) untuk peralihan kearah Negara Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat:

2. bahwa Beslit B.I.O. diterima sebagai pangkal pemulaan (uitgangspunt) untuk pembentukan Pemerintah tersebut;

3. bahwa sangatlah perlu sebelum membentuk Pemerintah Nasional jang dimaksudkan diatas, terlebih dahulu mengadakan permusjawaratan dengan orang² terkemuka jang berasal dari daerah² jang belum tersusun menurut *Beslit* B.I.O. fasal 5".

Inilah hasil dari keuletan Agung dan kelitjinan Djumhana. Suatu resolusi jang pada pandangan rakjat umum djauh letaknja dari segala jang dibayangkan. Tidak tampak pertalian resolusi itu dengan keinginan rakjat seluruh Indonesia. Jang tampak terang ialah pertalianna dengan usaha Belanda membentuk pemerintah interim selekas mungkin dengan tidak mempedulikan keinginan rakjat Indonesia dan Republiknja jang dia pertahankan dengan djiwa raganja.

Tidak pula tampak dalam resolusi itu kebidjaksanaan para pembuatnja dalam mempertalikan perdjuangan rakjat Indonesia dengan keadaan luar negeri Asia chususnja.

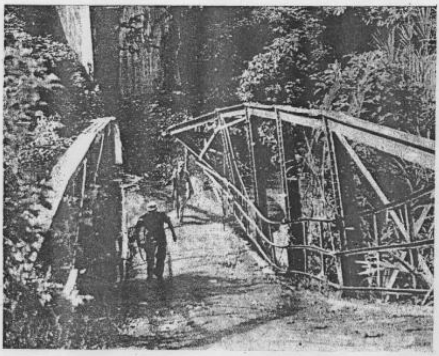

TENTARA BELANDA DI PADANG.....
*menemui djembatan rusak...*

dapat dikatakan bahwa mereka ini jang kuat beroposisi terhadap nasionalisme jang didukung oleh Agung dalam perdjuangannja.

Sikap mereka ini sangatlah sesuai dengan kehendak Belanda dan menghentu usaha Belanda pula.

**Drees dan federalis.** Ketika Drees berangkat dari negeri Belanda maka dinjatakannjalah, bahwa kepergiannja ke Indonesia adalah bertudjuan untuk pembentukan pemerintah interim jang terdiri dari orang Indonesia, persiapan pembentukan NIS dan untuk ini akan diadakan pemilihan² merdeka.

Djadi teranglah bahwa sesuai dengan apa jang kita katakan diatas. Belanda akan meneruskan djalan

Demikianlah maka dengan segera diumumkan dan disjahkan kabinet Djumhana, jang pada pandangan orang jang mengerti tidak lain berupa kabinet tambalan sadja. Pada tanggal 12 Djanuari menjusul berdirinja kabinet Anak Agung.

Dan pada tanggal 13 Djanuari bermusjawaratlah para pemimpin federal ini di Pedjambon.

Dalam permusjawaratan wakil² negara bagian, jang dinamakan BFO (Bijzonder Federaal Overleg) ini Agung mentjobakan kebidjaksaannja untuk „mengambil apa jang masih bisa diambil" guna kepentingan perdjuangan Kebangsaan.

Demikian pula Djumhana mentjobakan „kelitjinannja"

inginan rakjat seluruh Indonesia. Jang tampak terang ialah pertalianna dengan usaha Belanda membentuk pemerintah interim selekas mungkin dengan tidak mempedulikan keinginan rakjat Indonesia dan Republiknja jang dia pertahankan dengan djiwa raganja.

Tidak pula tampak dalam resolusi itu kebidjaksanaan para pembuatnja dalam mempertalikan perdjuangan rakjat Indonesia dengan keadaan luar negeri Asia chususnja.

## *BANTEN:*
## Bukan keketjualian

Ketika pada tanggal 24 Desember tentera Belanda menduduki ibu kota daerah Banten, Serang, reaksi rakjatnja adalah sama dengan Jogjakarta. Meskipun benar telah menunggu dan menduga kemungkinan akan datangnja serangan Belanda atas daerahnja, tetapi pada umumnja diahati.ketjil masing², orang di Banten toh sama berpikir, bahwa „mungkin djuga Belanda itu, orang baru pertjaja, bahwa Banten sekali ini tidak „dimakan".

TNI segera mengambil keputusan untuk mengundurkan diri keluar kota dan meneruskan pertempuran dari sana, oleh karena mereka mengerti, bahwa dengan alat² jang ada pada mereka dan mengingat perandjatuan tentera Belanda, bukanlah tandingannja untuk bertempur selain dari pada dengan pakai tjara gerilja. Kemudian tersiarlah berita² diluar daerah Banten tentang djatuhnja Serang dan beberapa kota hinanja akan „mendiamkan" daerah Banten sebagai pada aksi militer pertama, dan hanja akan lebih memperkuat pengepungannja dalam lapangan perekonomian". Bahkan ketika seorang anggota PMI, jang ditempatkan di Balaradja — 45 kilometer dari Serang didjalan ke Tanggerang — membawa kabar ke Serang, bahwa tentera Belanda telah sampai di Balaradja,' dia dianggap pengatjau, jang membawa „berita proposkas". Baru setelah pasukan² TNI tiba dari front Tanggerang dan mengabarkan tentang penjerbuan tiba² dari Belanda dilaerah Banten dengan tidak ada perlawanan sedikitpun, sedangkan politik bumi hangus tidak didjalankan sama sekali, Tentu sadja berita² itu tidak mengatakan, mengapa pada waktu itu tidak didapatkan perlawanan. Dan tentang politik bumi.hangus jang tidak didjalankan itu, tidak dikatakan, bahwa sebetulnja di Banten boleh dikata tidak ada gedung² atau bangunan² jang besar — misalnja gedung² pemerintah jang besar² atau paberik² — jang memang perlu benar di hantjurkan. Dan djuga tidak disiarkan berita, bahwa satu².

nja paberik di Banten jang agak besar, jaitu paberik minjak kelapa di Rangka bitung, telah dikenakan politik bumihangus, sedangkan tentang keadaan tambang batu-bara dan tambang emas di Bajah dan Tjikotok, oleh karena sampai sekarang belum diterima kabar² jang pasti, maka belum bisa dikatakan apakah tambang² itu masih dalam keadaan utuh atau sebaliknja.

**Rakjat mula² ketjewa.** Sebagai djuga berita² tentang djatuhnja Jogja, Solo dan kota² lainnja „dengan tjepat dan hampir tidak mendapat perlawanan" telah menimbulkan rasa ketjewa kepada siapa jang mendengarnja dan sedikit-banjaknja menimbulkan perasaan putus-asa, rasa ketjewa demikian, bukan sadja pada orang² diluar daerah tsb., tetapi — bahkan mungkin terutama — pada penduduk daerah itu sendiri, jang tidak mengerti sikap pertama dari Angkatan Perang Republik didaerah tsb. Dan melihat TNI sama mengundurkan diri dari kota² dengan tidak atau hampir sama sekali tidak memberikan perlawanan maka ketjewa sangat rakjat Banten. Bahkan pada beberapa orang, mundurnja TNI, ini telah menimbulkan rasa marah jang tidak sedikit dan edjekan serta hinaan dilemparkan kepada TNI, jang „hanja tjuma melarikan diri dan menjerahkan penduduk begitu sadja kepada tentera Belanda", hal mana dengan sengadja dibesar²kan atau diandjurkan oleh mereka, jang memang mengingini, bahwa rakjat sama sekali hilang kepertjajaannja terhadap TNI. Untuk sekedar gambaran sadja dari perasaan pada permulaan itu, pembantu kita wartakan peristiwa sebagai berikut: Isteri seorang pemimpin TNI, jang suaminja mengundurkan diri kepegunungan untuk memimpin pasukan gerilja, pada suatu hari menjuruh budjangnja pergi membeli sirih. Tetapi oleh penjual sirih, jang rupanja kenal budjang siapa pemempuan itu, didjawab: „Pergi sadja beli sirih pada TNI dipegunungan".

Perasaan „anti" TNI ini sedikit banjaknja pada rakjat „biasa" bertambah lagi dengan tindakan² Belanda terhadap mereka: pembagian makanan, pakaian dan obat²an, sehingga ada beberapa orang jang mengetahui dan mengerti mengapa tentera Republik mengundurkan diri keluar kota, ketika melihat kelakuan serta sikap rakjat itu, bertanja dalam hati, nja: „Adakah faedahnja untuk mempertahankan Banten dengan mati²an?".

Tetapi..... Tetapi, perasaan rakjat seperti diluiskan diatas tidak seberapa lama demikian. Walaupun mula² TNI ditjelanja, kemudian datanglah kabar² tentang pertempuran dan sebaganja dari luar kota. Rakjat mendengar bahwa Dr. Eri Sudewo masih giat diantara beberapa kota besar, serta terus kesebelah Barat masih ada diuga pertahanan fihak TNI Djuga tentang Kjai Hadji Tubagus Achmad Chatib didengar kabar² jang menggembirakan rakjatnja.

Kyai Hadji Sjam'un, seorang jang djuga banjak pengaruh dan pengikut²nja dan jang ketika tentara Belanda memasuki kota Serang masih ada dalam kota, kemudian tidak tampak lagi, entah kemana perginja, entah telah kembali kepesantrennja di Tjitangkil, entah diuga telah menggabungkan diri dengan kaum gerilja. Wakil gubernur Djawa Barat, mr. masih utuh, disarah² pegunungan diluar kota² besar. Dan rakjatpun mulai pertjaja kembali, walaupun menerima apa jang diberikan kepada mereka. Pertjaja dan menunggu kepada pembesar² dan pemimpin²nja, sedangkan perut serta badannja tidak usah begitu menderita kelaparan, kekurangan pakaian dan penjakit dengan adanja pembagian makanan, pakaian dan obat²an.

Kabar fihak resmi Belanda, jang² disiarkan Aneta pada tgl. 15 Djanuari misalnja menjatakan, bahwa di Rangkasbitung sadja setiap hari dibagikan 500 porsi makanan, sedangkan pembagian pakaian — meskipun sementara dalam djumlah ketjil²an — katanja djuga telah dimulai. Dapur² umum menurut berita itu djuga didirikan di Pandeglang, Serang, Tjilegon dan Anjar, jang membagi²kan makanan² sekedarnja kepada penduduk, jang tengah menunggu tadi. Tetapi berita fihak resmi Belanda itu djuga menjatakan, bahwa sebelah timur dari kota Rangkasbitung boleh dikatakan seluruhnja binasa karena pembakaran² dan peperangan², setasiun dan gedung² Tjiudjung dikota itupun mendapat kerusakan². Tentang kota Pandeglang dikatakan „swar gehavend" — mendengar² ia sangat banjak kerusakan — belum lagi berita itu mengabarkan tentang tempat² seperti Warunggunung, Sakati, Menes, Batubantar, Tjilegon dll. Tentang keadaan djalan kereta-api berita Aneta itu menjatakan, bahwa fihak S.S. (diawatan kereta api Belanda) sedang sibuk membetul²kan djalan kereta-api dan katanja telah diadakan perdjalanan-pertjobaan (proefrit) dari Rangkasbitung ke Serang.

Demikianlah rakjat kota² besar melihat kedjadian² sehari². Ada jang mereka rasakan dan pikir dalam hatinja masing², djarang mereka mau mengutjarkannja, djika tidak terhadap orang jang betul² mereka kenal. Siapa tahu, kata mereka dengan penuh arti. Dengan begitu maka keadaan didalam kota² jang agak besar itu pada umumnja boleh dikatakan tenteram. Tetapi djangan dikira, kan keadaan diluar kota² itu atau ditempat² jang ketjil. Tempat² seperti Tjikeusal, Pa-

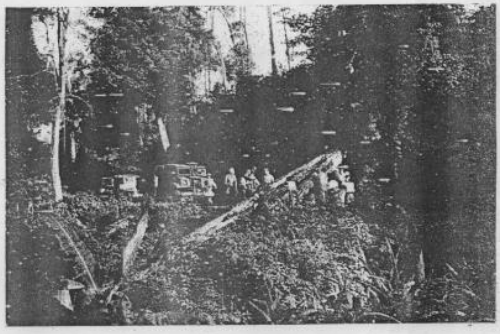

DAN DI BANTEN
.....barikade pohon di djalan.

Jusupadi, djuga telah „menghilang". Begitu djuga kepala Polisi Negara daerah Banten, tuan Jusuf, serta anak-buahnja. Dan in baru² pembesar² dari kota Serang sadja. Belum lagi terbitnja pembesar² dari kota² lainnja, seperti misalnja bupati Pandeglang, jang tadinja diuga mendjadi pemimpin tentera, tuan Djajarukmantara, dan pembesar² lainnja. Belum lagi jang dari Rangkasbitung, Tjilegon, Anjar Kidul dan Lor, Labuan, Menes dll. Orang² itu dikatakan telah „menghilang". Semua ini menimbulkan perasaan pertjaja kembali dalam hati rakjat terhadap pemerintah daerah Republik dengan TNI-nja, jang meskipun untuk sementara mungkin terpentjar dan tidak teratur, tetapi toh marajan. Kramat Watu dan lain² tempat sematjam itu boleh dikatakan telah kosong ditinggalkan penduduknja, dan djika ada tempat² jang masih mempunjai penduduk, maka kebanjaknja mereka terdiri dari kaum wanita atau orang² tua. Orang² mudanja merasa tidak aman untuk tetap tinggal ditempatnja masing² dan merasa lebih baik „menghilang" atau menggabungkan diri dengan pasukan² gerilja.

Keadaan didaerah Banten seperti digambarkan diatas ini tidaklah merupakan sesuatu jang istimewa dan agaknja sama sadja dengan keadaan ditempat² lain di Djawa dan Sumatera setelah tgl. 19 December jl. tu. Banten bukan suatu kekecualian.

*Masa Agresi Militer Belanda II, Banten Bukan Kekecualian. (Merdeka, 22 Januari 1949. No. 1. Hal. 6)*

BIOGRAFI PENULIS

**Mufti Ali, Ph.D**

Lahir di Cikeusal Serang Banten tanggal 7 Agustus 1972 dari pasangan Aslihuddin (w. 1993) dan Hj. St. Aminah (w. 2013). Anak ke-5 dari 8 bersaudara ini menempuh pendidikan strata-2 dan strata-3 nya di Fakultas Humaniora Universitas Leiden dan lulus Nopember 2008. Peneliti dan Dosen yang pernah memimpin Laboratorium Bantenologi 2007-2015 dan LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2015-2017) ini saat ini sedang menyusun dan merampungkan 4 videografi 4 pejuang Banten, 50 laman Ensiklopaedia Pejuang Banten, Penerbitan Sumber Sejarah Kota Serang dan menjadi konsultan untuk konten narasi sejarah perjuangan di Museum Gedung Joeang. Penulis belasan buku, dan puluhan artikel di jurnal nasional dan internasional serta kolumnis tetap di harian Kabar Banten ini saat ini sedang menjalankan tugas dari Gubernur Banten untuk mengumpulkan data-data dan sumber sejarah Banten di Belanda, Inggris, Perancis, Denmark, Portugis dan Mesir. Lima buku hasil riset-risetnya pada akhir tahun 2019- awal 2020 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Serang: (1) Revolusi Banten 1926 & Penjara Neraka Boven Digoel (2) Brigjen KH. Syam'un, Kiyai Panglima para Pejuang Kemerdekaan di Banten (1893-1949) (3) Banten & Manila Hubungan Perdagangan 1663-1682 (4) Revolusi Banten 1926 & Penjara Neraka Boven Digoel (5) KH. Tb. Achmad Sochari Chatib Catatan Seorang Putera Residen Banten (1920-2005)

**Dr. Rahayu Permana M.Hum**

Dilahirkan di Tanggerang 26 Nopember 1976 dari pasangan H. Mukri dan hj. Karinah. Studi di S1 pada jurusan Syariah di STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selesai pada tahun 2000, dan pada tahun 2001 meneruskan kembali pada jenjang Sekolah Pascasarjana S2 di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Jurusan Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia Depok, selesai tahun 2004. Pada tahun 2011 kembali meneruskan ke Sekolah Pascasarjana S3 pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) do Univeristas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, selesai 2015. Penulis dari tahun 2016 – sekarang adalah dosen tetap di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Menyusun karya ilmiah diantaranya menulis buku bersama tim dari S3 UPI Bandung tentang Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial dari Konsep sampai Implementasi, Yogyakarta, Eja Publisher, 2013. Buku kedua, K.H Syam'un Gagasan dan Perjuangan 1894-1949, Yogyakarta. Ejapublisher, 2017. Buku ketiga, Sejarah Al-Khairiyah, Cilegon, PB. Al-Khairiyah, 2018. Selain itu aktif menulis berbagai artikel di beberapa jurnal nasional dan internasional.

**Farhan Alfuadi, S.Ud**

Penulis yang mengasuh Pesantren Turats Islam-Bhakti Banten adalah alumnus Pondok Modern Daar el Istiqomah Serang-Banten, dan Jurusan Filsafat Agama UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Serang, anggota Komunitas Sastra Gunung Karang – Pandeglang. Sekarang aktif sebagai tim riset Sultan Abul Mafakhir Institut, Banten. Penulis telah menghasilkan beberapa karya tulis ber-genre fiksi dan non fiksi termasuk laporan riset soal sejarah kebantenan dan biografi tokoh-tokoh Banten. Beberapa buku yang pernah ditulisnya adalah Biografi Ulama Banten seri 1 bersama Laboratorium Bantenologi UIN SMH Banten tahun 2014. Ensiklopedi Tokoh Agama Nusantara yang diterbitkan oleh Litbang Kemenag RI tahun 2014. Matlaul Anwar dan Tantangan Modernitas (Serang: Bhakti Banten Press, 2018) bersama Mufti Ali, Ph.D. dan Dr. Jihadudin. Perguruan al-Khairiyah, Jejak Akademis Brigjen K.H. Syam'un, Pahlawan Nasional dari Banten (Serang: Bhakti Banten Press, 2018) bersama Mufti Ali, Ph.D. dan Dr. Rahayu Permana, M.Hum. Penulis juga aktif menulis karya tulis fiksi berupa puisi dan prosa. Puisi-puisinya dimuat dalam antologi bersama Komunitas Penulis Tepi Rumah Seribu Jendela (Yogyakarta: CV. Intishar Publishing, 2017). Sepasang Camar (Lampung: Perahu Literasi, 2018) ditulis bersama komunitas sastra Silaturahim Masyarakat Lampung dan Banten (Simalaba). Beberapa judul cerpennya dipublikasikan di Majalah Mutiara Banten, media online Simalaba. Tahun ini terlibat dalam penyusunan antologi cerpen bersama 58 penulis Indonesia berjudul Peti Mayat Koruptor (Serang: GolAgong Publisher, 2020) di bawah koordinator Gol A Gong.